

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD, serta mengacu kepada RKPD Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dengan demikian, RKPD berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah itu sendiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan Daerah Padang Pariaman dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesinambungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 serta Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di samping itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana



Pembangunan oleh Kepala Daerah Tahun 2016-2021 dalam implementasi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 juga disusun dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, perkembangan pembangunan yang sedang berlangsung, prediksi yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan arah kebijakan program Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Padang Pariaman. Disamping itu juga dengan memperhatikan kondisi makro ekonomi nasional akibat dampak krisis global yang terjadi, serta ketersediaan sumber daya yang terbatas.

Proses penyusunan RKPD melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip sebagai berikut:

- 1. Prinsip partisipatif (participative)
 - Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa masyarakat harus turut serta dalam proses perencanaan. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.
- 2. Prinsip kesinambungan (sustainable)
 - Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya terdiri pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terusmenerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.
- 3. Prinsip Keseluruhan (holistic).
 - Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

Di samping memenuhi prinsip sebagaimana yang disebutkan di atas, penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman juga dilakukan melalui pendekatan politis, teknokratik, demokratis, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang sesuai dengan syarat teknis perencanaan serta memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Pendekatan bottom-up dilakukan melalui Musrenbang Tahun 2016 secara berjenjang dari tingkat korong, nagari, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, hal ini untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sementara pendekatan top-down diperlukan untuk memberikan arahan dan panduan agar sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk tahun 2017.



Substansi RKPD adalah program dan kegiatan dari Satuan Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

Proses RKPD dilakukan secara terpadu antar SKPD, sehingga memungkinkan untuk melengkapi dan saling memberi masukan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat menuju pencapaian visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yaitu **Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul di Bidang Agribisnis dan Perdagangan berdasarkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**.

Selanjutnya RKPD akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2017.

Secara garis besar, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan pagu indikatif. Di samping itu, RKPD juga memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain daripada itu, RKPD juga merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama.

Kebijakan pembangunan Padang Pariaman tahun 2016 mengasung tema "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Guna Menunjang Perekonomian dan Daya Saing Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat dengan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2. Peningkatan pengamalan kehidupan beragama dan berbudaya;
- 3. Peningkatan pembangunan Infrastruktur penunjang ekonomi berwawasan Lingkungan;
- 4. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi;
- 5. Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan;
- 6. Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha serta pengembangan pariwisata Daerah secara terpadu;
- 7. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya;
- 8. Peningkatan Pembangunan berbasis mitigasi bencana;



9. Penurunan Tingkat Kemiskinan secara terintegrasi.

Pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2016 melalui pendekatan *Common Goals* serta kewilayahan dengan melakukan evaluasi tahun sebelum serta penetapan anggaran untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Penetapan plafon anggaran dan bagaimana mendorong konsistensi pagu pendanaan dari awal sampai akhir.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017 adalah sebagai berikut :



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 adalah :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);



- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



- 16.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015);
- 17.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
- 18.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137)
- 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Perencanaan Wilayah Terpadu;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- 24.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- 26.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030;
- 27.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- 29.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- 30.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman;



- 31.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Pariaman;
- 33.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Padang Pariaman;
- 34.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015;
- 36.Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Perjalanan.
- 37.Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum.
- 38.Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- 39.Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015.

1.3 Hubungan antar Dokumen

RKPD tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun dimana 2016 adalah tahun pertama periode Kepala Daerah Tahun 2015-2020, oleh sebab itu dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan tahun 2015-2020, maka RPJMD Tahun 2010-2015 masih dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya untuk program pembangunan strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sampai tersusunnya RPJMD yang baru dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang



berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2016 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan SKPD sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Secara lebih rinci dapat kita lihat hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman

Sehubungan dengan belum tersusunnya dokumen RPJMD Tahun 2015-2020 yang merupakan RPJMD ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, maka RPJMD Tahun 2010-2015 masih dapat digunakan. Dalam RPJMD memuat Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Padang Pariaman, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, RPJMD Propinsi 2010-2015 dan RPJM Nasional Tahun 2014-2019.

2. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran teknis operasional dari RPJMD ke dalam arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan, bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2020, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

4. RKPD dan Rencana Kerja SKPD

Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan merupakan pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan.



1.4 Sistematika Dokumen RKPD

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3 Hubungan antar Dokumen
 - 1.4 Sistematika Dokumen RKPD
 - 1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan secara lebih terperinci berisikan :

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

Dalam sub bab ini dijelaskan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sub ini menguraikan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKP Provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabpaten Padang Pariaman. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta isu strategis daerah, sebagai



payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun rencana.

i. Kondisi ekonomi daerah tahun 2014 dan perkiraan tahun 2015

Memuat penjelasan tentang kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah, yang antara lain mencakup: PDRB, tingkat inflasi, sumbangan sektoral, tingkat investasi (PMA dan PMDN), Eksport, dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman.

- ii. Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2016 dan tahun 2017
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 Dalam sub ini menggambarkan arah kebijakan pendapatan
 daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan
 pembiayaan daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas dan Pembangunan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI. PENUTUP

Telah dijelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian rancangan awal pada bab-bab di atas, sehingga memberikan gambaran pemerintah daerah Kabupaten dalam penyusunan RKPD.



1.5 Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan tata urut penyusunan dokumen perencanaan, maka penyusunan RKPD 2016 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun.

Tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 ini adalah:

- 1. Menjadi acuan perencanaan program dan kegiatan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun;
- 3. Menciptakan kepastian kebijakan pemerintah bagi seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman;
- 4. Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman;
- 5. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- 6. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- 7. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta
- 8. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman yang terletak antara 00 11' – 00 49' Lintang Selatan dan 98036' – 100028' Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 1.328,79 Km2, dan panjang garis pantai 42,11 Km. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen dari luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan dengan Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah paling luas, yakni 228,70 Km2, dan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki luas terkecil, yakni 25,56 Km2.

Sesuai dengan data BPS Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015, ratarata curah hujan secara keseluruhan untuk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2014 adalah sebesar 348 milibar (mb), dengan rata-rata hari hujan sebanyak 16 hari per bulan. Temperatur rata-rata untuk Kabupaten Padang Pariaman adalah 25,13 derajat celcius dengan kelembaban relatif 86,91 persen dan tekanan udara rata-rata 996,57 milibar.

Batas wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Agam

- Sebelah Timur : Kabupaten Tanah Datar dan Kab. Solok

- Sebelah Selatan : Kota Padang

- Sebelah Barat : Kota Pariaman dan Samudera Indonesia

Lahan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan yaitu untuk pertanian, perdagangan dan jasa, perumahan maupun untuk pembangunan berbagai fasilitas pelayanan perkotaan. Disini penggunaan lahan dikelompokkan atas 3 kategori yaitu lahan hutan, lahan persawahan dan lahan non persawahan. Sekitar 30,05 % lahan Kabupaten Padang Pariaman berbentuk hutan. Jumlah ini cukup ideal yaitu 30 % dari luas lahan suatu wilayah.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan lahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jelas mempengaruhi pergeseran penggunaan lahan di Kabupaten Padang Pariaman. Sesuatu yang dikhawatirkan di masa yang akan datang adalah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan produktif dan perubahan pemanfaatan lahan pada kawasan lindung yang tanpa terkendali. Berbagai kegiatan seperti pembukaan lahan berpindah, kegiatan pertanian, perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan ataupun jasa masih banyak yang belum



sesuai dengan konsep lingkungan. Adanya upaya untuk memanfaatkan kawasan lindung menjadi areal budidaya semakin meningkat. Di samping itu juga adanya kecenderungan masyarakat menggunakan sistem ladang berpindah serta pembukaan lahan bagi keperluan pertanian dan kawasan terbangun.

Pada kawasan-kawasan tertentu terlihat kecenderungan perkembangan yang pesat dalam penggunaan alih fungsi lahan untuk kegiatan pertanian, ladang berpindah, pembangunan perumahan, jasa dan keperluan kegiatan lainnya. Dimana pada beberapa kecamatan ini yang semula mempunyai kawasan lindung yang cukup signifikan dengan daerah tangkapan air (catchment area) Kabupaten Padang Pariaman yang seharusnya dipelihara atau dilestarikan, terlihat sudah mulai berubah fungsi dan dialihkan untuk peruntukan lain seperti untuk kegiatan perladangan dan kegiatan lainnya.

Lahan di Kabupaten Padang Pariaman dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan, yaitu untuk pertanian, perdagangan, perumahan, maupun untuk pembangunan berbagai fasilitas pelayanan. Penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari wilayah hutan yang terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam dan wisata, serta hutan bakau. Lahan persawahan terdiri dari sawah beririgasi, sawah tadah hujan, sawah pasang surut, dan sawah lainnya. Lahan non sawah terdiri dari rawa-rawa, ladang/tegalan, perkebunan, permukiman, kolam air tawar, padang rumput alami, tanah tandus/rusak, tanah terlantar dan lain lain.

Dalam pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan di Kabupaten Padang Pariaman terdapat berbagai masalah seperti :

- 1. Terjadinya konversi lahan hutan menjadi lahan permukiman dan kebun
- 2. Pembangunan yang melanggar sempadan bangunan yang ditetapkan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan penggunaan lahan yang ditetapkan.
- 3. Pemanfaatan lahan di kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat mengganggu fungsi ekologis DAS tersebut sehingga berdampak terhadap kawasan pemukiman di hilirnya.
- 4. Batasan kepemilikan lahan yang masih banyak kurang jelas

Luas wilayah Kabupaten Padang Pariaman menurut penggunaan lahan pada tahun 2014 adalah 132.879 Ha yang terdiri dari lahan non pertanian 7.493 Ha, sawah 27.099,5 Ha, lahan kering 19.705,5 Ha, perkebunan 36.444 Ha, Hutan 39.951 Ha, badan air 2,186 Ha. Penggunaan lahan yang besar adalah hutan, perkebunan dan persawahan.

Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

-

Gambar 2.1
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama
di Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: Data Olahan SLHD Kabupaten Padang Pariaman 2015

Luas lahan terbesar ada di Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam 22.870 Ha dan yang terkecil Kecamatan Sintuak Toboh Gadang 2.556 Ha. Lahan non pertanian paling banyak di Kecamatan Batang Anai 1.048 Ha, Tutupan hutan terbanyak di Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam 14,761 Ha dan yang terkecil Kecamatan Padang Sago, Nan Sabaris, Sintuak Toboh Gadang 0 Ha, Luas lahan sawah terbesar di Kecamatan Batang Anai 3.187 Ha dan yang terkecil di Kecamatan Padang Sago 228 Ha.

Untuk penggunaan lahan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.2
Penggunaan Lahan di Kabupaten Padang Pariaman





Kabupaten Padang Pariaman dengan luas wilayah 1.328,79 km² memiliki 17 kecamatan berpenduduk sebanyak 400.890 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,01 % dari tahun sebelumnya dan tingkat kepadatan rata-rata 302 jiwa/km². Kecamatan Batang Anai merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 45.954 jiwa dan sebaliknya adalah Kecamatan Padang Sago dengan 8.096 jiwa. Namun dilihat dari tingkat kepadatannya, kecamatan yang terpadat adalah Nan Sabaris (dengan tingkat kepadatan 943 jiwa/km²). dan sebaliknya yang terjarang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam (dengan tingkat kepadatan 114 jiwa/km²). Penduduk laki-laki berjumlah 196.873 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 204.017 jiwa. Berdasarkan angka tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak, dengan selisih 7.144 jiwa dari jumlah penduduk laki-laki.

Dengan tingkat pertumbuhan 1,01 % dan kepadatan penduduk 302 jiwa/km² pada tahun 2014, maka prosentase ini relative kecil dibandingkan laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat yang 1,4% namun kepadatannya relatif tinggi dibandingkan tingkat kepadatan penduduk rata-rata provinsi sebesar 129 orang/km².

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015

Tahun	Luas wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
2010	1,328.79	392.503	295
2011	1,328.79	395.420	298
2012	1,328.79	398.223	300
2013	1,328.79	400.890	302
2014	1,328.79	403.500*	304*
2015	1,328.79	406.100**	306**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

Sedangkan persentase orang yang bekerja tahun 2014 sebanyak 65,12 persen, mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang hanya 63,02 persen dengan rincian 82,80 persen laki-laki dan 82,80 persen. Dilihat dari tingkat pendidikan pekerja di Kabupaten Padang Pariaman, pada tingkat pendidikan Tamat Sekolah Dasar sebanyak 24,81 persen, SMP/sederajat sebanyak 25,56 persen, pekerja berpendidikan SLTA sebanyak 22,29 persen dan yang tidak/belum tamat SD sebanyak 3,64 persen. Selanjutnya pekerja yang berpendidikan diatas sekolah menengah atas (Diploma dan Universitas) masing-masing terdapat sebanyak 1,24 persen dan 4,22 persen.



2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD berdasarkan Fokus Pembangunan

2.2.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

RKPD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016, secara nyata merupakan RKPD tahun pertama yang mengacu pada periode ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005–2025 Kabupaten Padang Pariaman, Periode tahap ke-2 RPJMD tahun 2010–2015. Pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015, Aspek Kesejahteraan Masyarakat menjadi salah satu Prioritas untuk menangkis berbagai isu yang berkembang. Pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2010-2015 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Padang Pariaman yang tercantum dalam RPJMD 2010 – 2015 yaitu "Menjadi Kabupaten Unggul Dalam Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Cerdas dan Sejahtera".

Dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Padang Pariaman 2015, dijabarkan dalam 5 (lima) misi, yaitu :

- 1. Mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya yang berkualitas berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi mutu berbasiskan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.
- 3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkeperibadian wirausaha.
- 4. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berbasiskan sistem agribisnis dan agroindustri
- 5. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator utama yaitu perkembangan PDRB, struktur ekonomi serta laju pertumbuhan ekonomi.



a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke tahun 2010. Perubahan tahun dasar ini, dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam 2008 System Of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan PDRB Kabupaten untuk menjaga konsisitensi hasil penghitungan.

Manfaat dengan dilakukakannya perubahan tahun dasar PDRB adalah :1). Menginformasikan perekonomian segional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;2). Meningkatkan kualitas data PDRB; 3). Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Sementara itu, dengan adanya pergeseran harga tahun dasar akan memberikan dampak seperti : 1). Meningkatkan nominal PDRN, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian. 2) Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi, serta 3). Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk model dan peramalan.

Perubahan tahun dasar PDRB ini, telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993 dan tahun 2000. Tahun 2010 merupakan perubahan ke-6 dari tahun dasar PDRB dikarenakan beberapa hal dan salah satunya pada tahun 2010 tersebut perekonomian indonesia relatif lebih stabil dan adanya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti sensus penduduk 2010 dan indeks harga produsen (Producers Price Index).

Secara umum, dari total PDRB yang terbentuk dari Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2014, memberikan konribusi sebesar 8,72 persen, sementara itu, Kota Padang adalah pemberi kontribusi tertinggi yaitu sebesar 25,20 persen mengingat Kota Padang sebagai ibu Kota Provinsi memegang peranan penting dalam roda perekonomian Sumatera Barat.

PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 adalah sebesar 14.412,40 juta rupiah**, pada tahun 2013 adalah sebesar 12.277,89 juta rupiah*. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 2.134.518,1 juta rupiah.

Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dengan kontribusi sebesar 28,50 persen dari total PDRB menurut Lapangan Usaha pada tahun 2014. Sedangkan Lapangan Usaha Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang paling sedikit memberikan kontribusi yaitu hanya sebesar 0,04 persen. Kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku ini masih mengandung unsur nilai inflasi. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2010-2014

No	Lapangan			Tahun			Rata Rata
NO	Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2010-2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.975.353,6	2.178.232,3	2.351.018,1	2.595.668,9	3.010.060,1	2.422.066,6
2	Pertambangan dan penggalian	514.435,7	555.571,0	618.063,9	718.529,6	893.625,9	660.045,2
3	Industri pengolahan	1.145.249,9	1.282.926,0	1.413.781,3	1.569.313,3	1.713.063,7	1.424.866,8
4	Pengadaan listrik dan gas	2.307,0	2.329,0	2.422,0	2.373,6	3.103,7	2.507,1
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4.729,7	4.782,3	4.877,9	5.267,2	5.671,0	5.065,6
6	Konstruksi '	607.265,8	700.998,3	803.751,9	939.257,9	1.094.073,2	829.069,4
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasai mobil dan sepeda motor	799.743,3	897.086,1	982.128,7	1.064.113,1	1.191.533,7	986.921,0
8	transportasi dan pergudangan	1.766.832,6	2.165.447,9	2.604.260,1	3.281.447,5	4.107.764,5	2.785.150,5
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	69.040,1	77.292,6	85.793,5	96.036,1	112.673,0	88.167,1
10	Informasi dan komunikasi	260.269,7	287.501,4	324.973,2	348.686,6	398.148,7	323.915,9
11	Kjasa keuangan dan Asuransi	125.225,0	141.917,5	163.715,5	182.754,2	206.942,4	164.110,9
12	Real Estat	89.707,9	96.831,0	103.313,0	115.825,4	132.464,5	107.628,4
13	Jasa perusahaan	6.492,8	7.081,2	7.926,0	8.906,2	10.118,3	8.104,9



No	Lapangan			Tahun			Rata Rata
NO	Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2010-2014
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib	435.745,2	493.402,9	547.507,2	618.048,5	682.825,9	555.505,9
15	Jasa Pendidikan	330.438,0	385.449,0	446.378,5	518.348,7	606.798,6	457.482,6
16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	43.109,7	49.854,3	60.258,7	68.690,6	77.433,6	59.869,4
17	jasa lainnya	95.904,0	107.348,4	119.221,4	144.617,9	166.102,7	126.638,9
	Total PDRB	8.271.850,0	9.434.051,2	10.639.390,9	12.277.885,3	14.412.403,5	11.007.116,2

Sumber Data : Kab. Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2015

Sementara itu, kenaikan produktifitas ekonomi secara riil, dapat dilihat dari kenaikan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2014 PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Konstan adalah sebesar 10.441.132,4 juta rupiah **.Hal ini mengalami peningkatan sebesar 593.787,1 juta rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya berjumlah sebesar 9.847.345,3 juta rupiah*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2010-2014

	Lapangan			Tahun			Rata Rata
No	Ûsaha	2010	2011	2012	2013*	2014**	2010-2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.975.353,6	2.028.368,6	2.082.864,0	2.162.920,6	2.316.660,8	2.113.233,5
2	Pertambangan dan penggalian	514.435,7	518.878,9	541.217,2	578.891,5	624.225,7	555.529,8
3	Industri pengolahan	1.145.249,9	1.198.762,5	1.277.752,1	1.375.718,9	1.453.065,4	1.290.109,8
4	Pengadaan listrik dan gas	2.307,0	2.456,7	2.756,3	2.793,3	3.488,1	2.760,3
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4.729,7	4.846,8	4.920,4	5.152,9	5.377,3	5.005,4
6	Konstruksi '	607.265,8	649.586,8	703.577,2	782.164,8	853.961,2	719.311,2
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasai mobil dan sepeda motor	799.743,3	836.659,7	889.179,5	951.004,8	1.029.652,3	901.247,9
8	transportasi dan pergudangan	1.764.832,6	1.954.885,2	2.103.347,8	2.184.855,1	2.240.238,4	2.049.631,8



	Lapangan			Tahun			Rata Rata
No	Ûsaha	2010	2011	2012	2013*	2014**	2010-2014
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	69.040,1	70.734,0	73.759,9	77.111,5	82.198,6	74.568,8
10	Informasi dan komunikasi	260.269,7	281.567,9	314.354,6	346.413,2	383.064,0	317.133,9
11	Kjasa keuangan dan Asuransi	125.225,0	136.149,3	149.285,6	160.344,4	169.886,2	148.178,1
12	Real Estat	89.707,9	93.040,4	96.863,3	102.361,3	108.204,8	98.035,5
13	Jasa perusahaan	6.492,8	6.974,4	7.548,6	8.188,5	8.897,0	7.620,3
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib	435.745,2	466.457,7	478.404,8	521.661,0	531.095,6	486.672,9
15	Jasa Pendidikan	330.438,0	357.464,7	389.074,8	417.248,8	447.619,3	388.369,1
16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	43.109,7	46.584,5	51.459,9	55.495,7	60.191,1	51.368,2
17	jasa lainnya	95.904,0	100.621,4	107.461,1	115.019,1	123.306,5	108.462,4
	PDRB	8.269.850,0	8.754.039,5	9.273.827,1	9.847.345,4	10.441.132,3	9.317.238,9

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015

Pada perubahan tahun dasar penyusunan PDRB ini, peningkatan tersebut belum mampu memberikan gambaran positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman. Buktinya, pertumbuhan ekonomi secara umum di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 sedikit mengalami pelambatan. Kabupaten Padang Pariaman yang pada tahun 2013 perekonomiannya tumbuh diangka 6,18 menjadi 6,03 pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang mengalami fluktuasi beberapa tahun terakhir. Namun walaupun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2014 tersebut, berada di urutan ke-8 jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat itu sendiri yang hanya sebesar 5,85 persen.

Sama hal nya dengan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014 didukung oleh berbagai sektor dalam perekonomian Kabupaten Padang Pariaman, namun sektor yang dominan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman tersebut adalah sektor pertanian dan sector transportasi dan pergudangan.

Selanjutnya, peningkatan PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku mengakibatkan adanya peningkatan nilai pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Padang Pariaman. Selama kurun waktu 2010-2014, PDRB per kapita penduduk Padang Pariaman selalu mengalami peningkatan yang cukup



signifikan. Pada tahun 2010, PDRB per kapita Padang Pariaman tercatat sebesar 21,07 juta rupiah, selanjutnya terjadi kenaikan sebesar 13,24 persen di tahun 2011 sehingga menjadi 23,86 juta rupiah.

Selanjutnya pada tahun 2012 dan 2013, PDRB per kapita kembali mengalami peningkatan menjadi 26,72 juta rupiah dan 30,63 juta rupiah per tahunnya. Hingga akhirnya pada tahun 2014, PDRB perkapita Padang Pariaman meningkat cukup signifikan dengan pertumbuhan sebesar 16,62 persen menjadi 35,72 juta rupiah per tahun atau sekitar 2,97 juta rupiah per bulannya.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari perkembangan nilai tambah masing-masing lapangan usaha yang ikut membentuk nilai tambah perekonomian suatu negara/region secara keseluruhan. Selama kurun waktu 2010 –2014, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman mengalami fluktuasi.

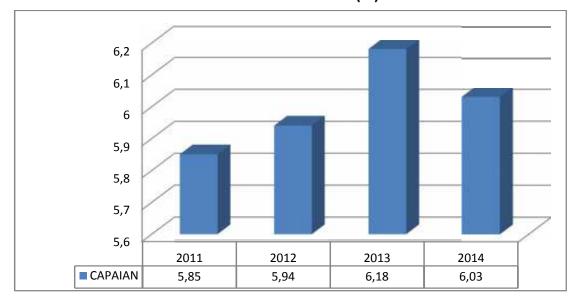
Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2014, mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Padang Pariaman tahun 2014 sebesar 6,03 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai di lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas dengan peningkatan yang signifikan yakni sebesar 24,87 persen. Selanjutnya lapangan usaha informasi dan komunikasi juga memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi yakni sebesar 10,58 persen. Pada urutan ketiga pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014 adalah lapangan usaha konstruksi yakni sebesar 9,18 persen.

Pada tahun 2014, sebagian besar lapangan usaha tumbuh dikisaran 7 s.d 8 persen antara lain : lapangan usaha Jasa Perusahaan (8,65 persen), lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial (8,46 persen), lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasai mobil dan sepeda motor (8,27 persen), lapangan usaha pertambangan dan penggalian (7,83 persen), lapangan usaha jasa pendidikan (7,28 persen), lapangan usaha jasa lainnya (7,21 persen) serta lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (7,11 persen).

Sementara itu, lapangan usaha lainnya mampu tumbuh di bawah 7 persen. Termasuk juga lapangan usaha transportasi dan perdagangan yang merupakan kontributor tertinggi dalam pembentukan PDRB Padang Pariaman, justru hanya tumbuh sebesar 2,53 persen di tahun 2014.



Gambar 2.2.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2010 – 2014 (%)



Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2015

c. PDRB Perkapita

Secara konsep, PDRB perkapita diartikan sebagai Nilai PDRB atas dasar harga pasar dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukan nilai PDRB per kepala atau per satu penduduk. Selama kurun waktu 2010-2014 PDRB perkapita Padang Pariaman selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada tahun 2010 PDRB per kapita Padang Pariaman tercatat sebesar 21,07 juta rupiah, selanjutnya terjadi kenaikan sebesar 13,24 persen di tahun 2011, sehingga menjadi 23, 86 juta rupiah.

Selanjutnya pada tahun 2012 dan 2013 PDRB perkapita kembali meningkat menjadi 26,72 juta rupiah dan 30,63 juta rupiah per tahun. Hingga akhirnya pada tahun 2014, PDRB perkapita Padang Pariaman meningkat cukup signifikan dengan pertumbuhan sebesar 16,62 persen menjadi 35,72 juta rupiah per tahun atau sekitar 2,97 juta rupiah per bulannya.

Berdasarkan jenis lapangan usaha, nilai PDRB perkapita yang paling tinggi adalah PDRB perkapita dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan nilai sebesar 10,18 juta rupiah per tahun. Kemudian disusul dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang mempunyai PDRB perkapita sebesar 7,46 juta rupiah. Sementara itu, lapangan usaha lainnya memiliki PDRB perkapita di bawah 5 juta rupiah pada tahun 2014.

Tabel 2.4
PDRB per kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2010-2014

				Tahun			Rata Rata
No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2010-2014
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,030	5,510	5,900	6,470	7,460	6,074
2	Pertambangan dan penggalian	1,310	1,410	1,550	1,790	2,210	1,654
3	Industri pengolahan	2,920	3,240	3,550	3,910	4,250	3,574
4	Pengadaan listrik dan gas	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
6	Konstruksi '	1,550	1,770	2,020	2,340	2,710	2,078
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasai mobil dan sepeda motor	2,040	2,270	2,470	2,650	2,950	2,476
8	transportasi dan pergudangan	4,500	5,480	6,540	8,190	10,180	6,978
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,180	0,200	0,220	0,240	0,280	0,224
10	Informasi dan komunikasi	0,660	0,730	0,820	0,870	0,990	0,814
11	Kjasa keuangan dan Asuransi	0,320	0,360	0,410	0,460	0,510	0,412
12	Real Estat	0,230	0,240	0,260	0,290	0,330	0,270
13	Jasa perusahaan	0,020	0,020	0,020	0,020	0,030	0,022
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib	1,110	1,250	1,370	1,540	1,690	1,392
15	Jasa Pendidikan	0,840	0,970	1,120	1,290	1,500	1,144
16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,110	0,130	0,150	0,170	0,190	0,150
17	jasa lainnya	0,240	0,270	0,300	0,360	0,410	0,316
	PDRB perkapita	21,080	23,870	26,720	30,610	35,710	27,598

Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2015

2.2.1.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator kesejahteraan sosial seperti seperti indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pendidikan dan indeks kesehatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Pariaman sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan daerah, nilai IPM Kabupaten Padang

Pariaman masih yang rendah capiannya untuk Propinsi Sumatera, hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2011–2014

		_				gking		
PROVINSI`		1.	P M		(Provinsi)			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
Kep. Mentawai	55,90	56,10	56,33	56,73	19	19	19	19
Pesisir Selatan	65,80	66,49	67,31	67,75	12	11	11	11
Kab.Solok	65,28	65,62	66,15	66,44	13	14	14	14
Sijunjung	62,92	63,70	64,48	64,95	16	16	16	16
Tanah Datar	66,92	67,29	68,12	68,51	10	10	10	10
Pdg Pariaman	65,89	66,20	67,15	67,56	11	12	12	12
Agam	66,94	67,95	68,73	69,32	9	8	8	8
Lima Puluhkota	65,20	65,87	66,30	66,78	14	13	13	13
Pasaman	61,57	62,26	62,91	63,33	18	18	18	18
Solok Selatan	64,81	65,12	65,86	66,29	15	15	15	15
Dharmasraya	67,40	67,76	68,71	69,27	8	9	9	9
Pasaman Barat	62,55	63,33	63,92	64,56	17	17	17	17
Padang	78,68	79,00	79,23	79,83	1	1	1	1
Kota Solok	74,68	75,02	75,54	76,20	4	4	4	4
Sawahlunto	67,97	68,59	69,07	69,61	7	7	7	7
Pdg Panjang	73,76	74,22	74,54	75,05	5	5	5	5
Bukitinggi	76,30	76,92	77,67	78,02	2	2	2	2
Payakumbuh	75,39	75,89	76,34	76,49	3	3	3	3
Pariaman	73,07	73,47	74,51	74,66	6	6	6	6
SUMATERA BARAT	67,81	68,36	68,91	69,36	9	9	9	9

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Tahun 201

Indeks Pendidikan Masyarakat

Selama periode 2010-2014 perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan kualitas hidup manusia yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan kondisi ekonomi. Variabel pembentuk IPM antara lain angka harapan hidup manusia, Expected Year Schooling (EYS), Mean Year Schooling (MYS) dan rata-rata pengeluaran per kapita. Pada tahun 2010, nilai IPM Padang Pariaman sebesar 65,16 persen, lebih kecil dibanding IPM Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 67,25 persen. Selanjutnya di tahun 2011 angka IPM Padang Pariaman sedikit naik menjadi 71,45 persen. Tahun 2012 dan 2013 angka IPM Padang Pariaman tercatat



sebesar 71,98 persen dan 72,53 persen namun masih lebih rendah dibandingkan angka provinsi yang mampu mencapai kisaran 74,28 persen dan 74,70 persen. Sementara itu, pada tahun 2014 angka IPM Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan yaitu 72,93 persen dan 75,01 persen.

Pada tahun 2015, metodologi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara nasional mengalami perubahan, dimana adanya pergantian salah satu variabel pembentuk IPM yaitu angka meleh huruf diganti dengan angka Expect Year Schooling (EYS). IPMm Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari 67,25 di tahun 2010 menjadi 69,36 di tahun 2014 dengan menempati urutas ke-9 di tingkat nasional. Begitu juga dengan IPM Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang juga mengalami peningkatan selama periode 2010-2014 dengan reduksi shortfall yang beragam. Pada tahun 2010, tercatat IPM Kabupaten Padang Pariaman sebesar 65,16 dan pada tahun 2014 sebesar 67,56 dan berada pada peringkat 12 se-Sumatera Barat.

Untuk meningkatkan posisi IPM di Kabupaten Padang Pariaman, memang diperlukan terobosan dan kerja keras secara simultan dan terus menerus terutama pada pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, karena variabel utama dalam penghitungan IPM sangat ditentukan oleh keberhasilan peningkatan kualitas manusia dari segi pendidikan dan kesehatan dan ditunjang dengan pendapatan per kapita yang lebih baik dari waktu ke waktu. Memperpanjang angka harapan hidup, meningkatkan angka melek huruf, memperpanjang angka rata-rata lama sekolah dan meningkatkan pendapatan perkapita.

Sasaran pembangunan pendidikan dititikberatkan pada peningkatan mutu dan erluasan kesempatan belajar di semua jenjang pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan yang ingin dicapai tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan manusia seutuhnya. Sedangkan perluasan kesempatan belajar dimaksud agar penduduk usia sekolah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sejalan dengan laju pertumbuhan pendudukan yang dapat memperoleh kesempatan belajar yang seluas-luasnya.

Untuk lebih jelasnya, mengenai Jumlah Sekolah, Kelas, Guru dan Murid di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6.

Jumlah Sekolah, Kelas, Guru, dan Murid di Kabupaten Padang Pariaman

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
No	Uraian	Sekolah	Kelas	Guru	Murid
1	SD/MI	413	2.756	4.217	55.956
2	SLTP/MTs	86	962	2.347	24.964
3	SLTA/MA	47	580	1.739	15.473

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2015

Rasio kelas murid pada tingkatan SLTP/MA memiliki jumlah terpadat yaitu 27 orang orang murid per kelasnya. Sedangkan tingkat SLTP/MTs dan SD/MI rasio kelas murid berjumlah 26 dan 20 orang per kelasnya. Sementara itu, rasio guru-guru-murid di tingkat SD paling banyak yaitu 13 orang murid per gurunya. Sedangkan tingkatan SLTP/MTs dan SLTA/MA tercatat sebanyak 11 dan 9 orang murid per gurunya.

Rasio Kelas Murid dan Rasio Guru Murid SD/MI. SLTP/MTs dan SLTA/MA di Kabupaten Padang Pariaman

Gambar 2.4.



Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2015

Indeks Pendidikan dihitung berdasarkan Expected Year Schooling (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada tahun 2014 EYS mengalami peningkatan dari 12,01 pada tahun 2011 menjadi 13,45 tahun.

Dari sisi lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah (ARLS), mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 6,88 tahun yang artinya setara dengan kelas 1 SLTP.

Indeks Kesehatan Masyarakat

Kondisi kesehatan penduduk Padang Pariaman semakin membaik, terlihat dari semakin menin0katnya fasilitas dan tenaga kesehatan di Padang Pariaman. Dalam rangka penolong persalinan pada tahun 2014, terjadi peningkatan kesadaran masyarakt terhadap eplayanan kesehatan yang baik. Selama tahun 2014 sebagian besar masyrakata Kabupaten Padang Pariaman lebih memilih bidan untuk penolong kelahirannya yakni sekitar 75,1 persen. Sedangkan yang



menggunakan jasa dokter 21,5 persen, Namun masih ada masyarakat yang masih mengandalkan tenaga dukun bersalin yaitu sekitar 3,4 persen.

Sementara itu, derajat kesehatan masyarakat Padang Pariaman juga semakin membaik. Hal tersebut diindikasikan meningkatnya angka harapan hidup penduduk Padang Pariaman. Selama kurun waktu 5 tahun angka harapan hidup penduduk Padang Pariaman semakin bertambah. Pada tahun 2014 angka harapan hidup mencapai 67,24.

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah wanita usia subur semakin meningkat, dari 63.367 di tahun 2012, menjadi 64.860 di tahun 2013 dan 66.311 di tahun 2014. Sama halnya dengan jumlah peserta KB aktif yang selalu meningkat dari tahun ke tahun dari 40.995 orang pada tahun 2012, menjadi 42.328 orang pada tahun 2013 dan mencapai 44.093 orang pada tahun 2014.

2.2.1.2 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Berdasarkan survei terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2015, kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Padang pariaman menunjukkan trend yang meningkat.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman menggunakan 14 (empat belas) indikator kepuasan dalam mengukur 5 (lima) unit layanan terhadap masyarakat yang meliputi Kantor Camat Batang Gasan, Kantor Camat IV Koto Aur Malintang, Kantor Camat padang Sago, kantor Camat VII Koto Sungai Sarik dan Kantor Camat V Koto Timur. Secara umum hasil dari pengukuran Indeks Kepauasan Masyarakat terhadap kinerja SKPD tersebut mencerminkan tingkat kualitas dan kinerja pelayanan yang baik dengan mutu pelayanan "B".



Secara lebih terperinci dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7.

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Lima
Unit Pelayanan di Kabupaten Padang Pariaman

No.	Unit Pelayanan	Unit Pelayanan Nilai IKM Mutu Pelayanan		Kinerja Unit Pelayana
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Batang Gasan	69,05	В	Baik
2	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	72,05	В	Baik
3	Kecamatan Padang Sago	70,17	В	Baik
4	Kecamatan VII Koto Sungai Sarik	73,06	В	Baik
5	Kecamatan V Koto Timur	72,82	В	Baik

Sumber: Hasil Executive Report Bagian Organisasi dan PAN Tahun 2015

2.2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.2.1.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Data pengeluaran penduduk bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2013 (Susenas 2013). Pola Pengeluaran penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2013 didominasi oleh pengeluaran makanan, yaitu sekitar 61,98 persen.

Apabila dipisah menurut komoditi barang, pengeluaran makanan paling banyak adalah untuk konsumsi makanan dan minuman jadi. Pada Kelompok Makanan didominasi oleh makanan dan minuman jadi sebanyak 26% dari total kelompok makanan, dan pada kelompok non makanan didominasi oleh perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air sebanyak 30%.

2.2.1.3.2 Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah

Menurut data BPS panjangnya, jalan raya di Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2014 mengalami penambahan sehingga menjadi sebesar 2.240,35



Km pada dengan rincian menurut status jalan adalah Jalan Negara 84,30 Km, Jalan Propinsi 83,65 Km dan Jalan Kabupaten 2.072,40 Km.

Kualitas jalan kabupaten pada umumnya sudah diaspal. Dari 2.072,40 Km, permukaan jalan yang sudah diaspal sepanjang 1.087,84 Km, atau sekitar 52,49 persen. Selanjutnya, jalan Kabupaten dengan permukaan kerikil tercatat sepanjang 279,78 Km atau 13,50 persen dan sisanya sekitar 704,77 Km atau sekitar 34,01 persen adalah jalan dengan permukaan tanah.

Sementara itu, sebagian besar kondisi permukaan jalan Kabupaten Padang Pariaman dalam kondisi rusak yakni tercatat sebanyak 46,68 persen. Sedangkan kondisi permukaan jalan kabupaten dengan kondisi baik dan sedang tercata 38,42 Km atau 15,10 persen.

Selanjutnya, pada tahun 2014, di Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebanyak 206 jembatan kabupaten dengan panjang 2.742 m, jembatan negara sebanyak 47 buah dan jembatan provinsi sebanyak 39 buah.

Sedangkan jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Padang Pari-aman tahun 2013 sebanyak 2.449 buah kendaraan, dengan rincian 115 mobil penumpang, 457 bus, dan 1.877 truk.

Sarana perhubungan darat lain yang beroperasi di Kabupaten Padang Pariaman adalah sarana transportasi kereta api. Sarana kereta api merupakan salah satu sarana transportasi di Kabupaten Padang Pariaman yang masih tetap dilestarikan, sekalipun pendapatan dari alat transportasi ini masih relatif belum sesuai dengan yang diharapkan, namun keberadaannya masih tetap dinantikan masyarakat. Sepanjang tahun 2014, tercatat penumpang kereta api sebanyak 325.592 penumpang sisata Padang-Pariaman dengan jumlah pendapatan sekitar 1,05 milyar rupiah.

Kegiatan transportasi udara melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) selama tahun 2012-2014 jumlah pesawat yang datang dan berangkat dari BIM mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 jumlah pesawat domestik yang datang sebanyak 8.510 dan yang berangkat sebanyak 8.582 kali. Namun untuk penerbangan internasional pada tahun 2014 mengalami penurunan. Tercatat sebanyak 902 pada tahun 2013 menjadi 765 kali di tahun 2014.

Seiring dengan perkembangan jumlah pesawat komersial yang menggunakan BIM, jumlah penumpang mengalami pasang surut yang sama. Jumlah penumpang domestik mengalami peningkatan yakni 1.278.696 penumpang yang datang dan 1.315.356 orang yang berangkat.

Walaupun jumlah pesawat penerbangan internasional sedikit menurun, namun dari segi jumlah penumpang internasional justrumeningkat dari 97.039



yang datang menjadi 98.521 penumpang penumpang. Sedangkan penumpang internasional yang berangkat tercatat sebanyak 95.909 orang pada tahun 2014.

Berdasrkan hasil susenas 2013 dan 2014 kualitas perumahan penduduk di Kabupaten Padang Pariaman menunjukan adanya peningkatan. Hal ini dapat ditunjukan dengan beberapa indikator perumahan, seperti persentase rumah tangga dengan luas lantai hunian ≥ 100 m² semakin bertambah dari 18,31 persen pada tahun 2013 menjadi 21,02 persen. Mayoritas rumah tangga di Padang Pariaman memilki luas lantai hunian pada kategori 50-99 m² yakni 52,90 persen pada tahun 2014.

Sementara itu rumah pendudukn dengan lantai bukan tanah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 terdapat sebanyak 99,40 persen sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 98,10 persen pada tahun 2013.

Rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan menjadi sebanyak 96,70 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya tercatat sebesar 95,30 persen. Dengan demikian rumahh tangga yang belum menggunakan sumber penerangan listrik pada tahun 2014 menjadi 3,30 persen.

Pada tahun 2014 sebagian besar rumah tangga meiliki fasilitas air minum sendiri yakni tercatat sebanyak 67,73 persen. Hal itu mengidentifikasikan kualitas perumahan di Padang Pariaman yang cukup baik. Selanjutnya persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum bersama dan umum tercatat sebanyak 19,69 persen dan 8,02 persen. Sedangkan rumah tangga tyang tidak mempunyai fasilitas air minum justru meningkat dari 3,25 persen di tahun 2013 menjadi 4,56 persen di tahun 2014.

Sementara itu, berdasarkan sumber air minum sebagian besar masyarakat Padang Pariaman bersumber dari sumur yakni sekitar 34,96 persen dan lainnya (misalkan air kemasan dan air isi ulang) sekitar 40,72 persen. Sedangkan yang menggunakan mata air, pompa dan ledeng masing-masing sebanyak 7,11 persen. 7,01 persen dan 9,76 persen.

2.2.1.3.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami perubahan fluktuatif, angka partisipasi sekolah (APS) penduduk 10 tahun ke atas di Padang Pariaman relatif cukup tinggi. Tercatat 27 persen yang masih bersekolah dan 69,66 persen pernag bersekolah/tidak bersekolah lagi dan 3,35 persen yang tidak/belum pernah bersekolah.

Dari 3,35 persen yang tidak/belum pernah bersekolah tersebut, tercata sebanyak 4,93 persen berasal dari perempuan, atau lebih dua kali lipat dari



jumlah laki-laki yang hanya 1,67 persen. Dengan kesimpulan, bila dikelompokan menuut jenis kelamin, maka partisipasi sekolah pada perempuan lebih rendah dibandingan laki-laki, sehingga angka buta huruf pada perempuan jauh lebih besar dibandingan dengan laki-laki.

Meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas dan terjangkau. Sebagian penduduk tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan masih mahal dan pendidikan juga dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga pendidikan belum dinilai sebagai bentuk investasi.

2.2.1.3.4 Fokus Iklim Berinyestasi

Iklim investasi di Kabupaten Padang Pariaman dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal dapat dilihat dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan investor dalam mengurus proses perijinan termasuk bea pajak dan retribusi yang dikenakan, akses terhadap bahan baku serta potensi pasar lokal dalam menyerap hasil produksi.

Kondisi kemananan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman secara umum terkendali. Pada umumnya kondisi kamtibmas berkaitan dengan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya yang akhirnya melahirkan munculnya permasalahan kriminalitas, penyandang masalah sosial, migran liar, penghuni liar, dan pada akhirnya menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Perbankan sangat berperan dalam pernatara pembayaran dalam investasi. Pada tahun 2014, terdapat sebanyak 4 unit Bank, yakni BRI, Bank Nagari, BNI dan BNI 1946 dan Bank Mandiri Syariah. Meningkatnya jumlah bank, memberikan dampak positif terhadap penmabahan jumlah nasabah bank. Salah satunya terlihat pada peningkatan jumlah nasabah. Pada tahun 2014, tercata sebanyak 1.310 nasabah giro, 168.646 nasabah tabungan dan 1.423 nasabah deposito. Sebagian besar dana nasabah yang etkumpul bersal dari tabungan senilai 577,5 milyar rupiah, sedangkan untuk nilai giro dan deposito terkumpul sebesar 206,25 juta rupiah dan 139,8 milyar rupiah.

Aktivitas perbankan di Kabupaten Padang Pariaman juga ditandai dengan adanya peningkatan jumlah dana yang disalurkan melalui berbagai macam bentuk kredit. Sebagian besar realisasi kredit investasi dan modal kerja terserap di sektor perdagangan yakni sebesar 61,89 persen. Kemudian realisasi kredit investasi di sektor jasa-jasa tercatat sebanyak 19,75 persen. Disusul sektor lain-lain (mencakup sektor angkutan, penggalian dan konstruksi) tersalurkan kredit



sebanyak 13,76 persen. Sementara itu, realisasi kredit untuk sektor pertanian dan perindustrian hanya di bawah 5 persen.

2.2.2 Capaian Kinerja RKPD dan RPJMD Berdasarkan Prioritas

2.2.2.1 Prioritas Pengamalan ABS-SBK dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya.

Untuk mewujudkan Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Beragama dan berbudaya, disadari tidaklah mudah, cukup banyak SKPD yang berperan dan menjalankan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan.

Namun demikian, secara makro terdapat beberapa indikator utama yang menjadi tolak ukur pencapaian pada prioritas ini yakni :

Tabel 2.8

Capaian Kinerja Pengamalan ABS-BK dalam Kehidupan beragama dan berbudaya di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014

			C	APAIAN INDIK	ATOR KINER	JA OUTCOME		KONDISI
	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI	2013	20)14		AKHIR
			AWAL	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	I : " MEWUJUDKAN KEHID			JDAYA YANG	BERKUALITA	S BERDASARK	AN FALSAFA	H ADAT
	ANDI SYARAK, SYARAK BASA							
	ORITAS 1 : PENGAMALAN AB					0.04	100	0.04
1	Persentase Peningkatan Majelis Taklim	%	0	0,02	0,04	0,04	100	0,04
2	Meningkatnya aktifitas rumah ibadah	%	40	60	65	65	100	70
3	Persetase Jumlah Ternak Kurban	%	100,8238552	505,3	100	75	75	100
4	Meningkatnya Peringkat Dalam MTQ Tingkat Sumbar	Rangking	9	13	9	0	0	5
5	Peningkatan Peserta Haji Daerah	%	124,19	80,37	88	66	75	90
1	Jumlah kualitas kawasan tradisional dan bersejarah	unit	2	2	2	0	0	2
2	jumlah situs sejarah dan cagar budaya yang terpelihara	Unit		1	3	0	0	3
1	Jumlah Sanggar seni tradisional yang dibina	sanggar	30	30	30	0	0	30
2	Persentase Peningkatan Pemahaman nilai-nilai budaya	%	0,5	0,7	0,75	0,75	100	0,8
3	Jumlah Lembaga adat yang dibina dan dilatih	Lembaga Adat	45	60	60	0	0	60
4	Jumlah Nagari yang dibina adat basandi syarak, syarak bersandikan kitabullah.	Nagari	51	60	60	60	100	60

Sumber: LAKIP Kab. Padang Pariaman Tahun 2014



2.2.2.2 Prioritas Penerapkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pelaksanaan Penerapkan Good Governance Dalam Pemerintahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 mengarahkan pada penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai.

Dengan reformasi birokrasi akan terwujud; 1) Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 2) Terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) Terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, 4) Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, 5) Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN, 6) Terwujudnya kepastian hukum, 7) Terhimpunnya data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, 8) Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel, 9) Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan pembangunan lintas sektor.

Hal diatas seiring dengan target nasional dalam Reformasi Birokrasi yaitu (1) Penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), (2) Kualitas pelayanan Publik, (3) Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan (4) Profesionalisme SDM aparatur.

Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan, disadari tidaklah mudah, cukup banyak SKPD yang berperan dan menjalankan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan.

Untuk lebih jelasnya capaian indikator kinerja pada prioritas Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014

	INDIKATOR KINERJA		C.F	APAIAN INDI	KATOR KINE	RJA OUTCOM	E	KONDISI		
	OUTCOME	SATUAN	UAN KONDISI _	2013	2014		CAPAIA	AKHIR		
			AWAL	REALISASI	TARGET	REALISASI	N			
	1	2	3	4	5	6	7	8		
ANT	MISI II: MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI MUTU BERBASISKAN SINERGITAS ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT PRIORITAS 2: PENERAPAN GOOD GORNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN									
1	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural sesuai dengan eselon yang dijabatnya	%	0,46	0,56	0,62	0,68	109,68	0,68		
2	Persentase Pejabat fungsional yang telah mengikuti diklat fungsional sesuai dengan klasifikasi	%	0,2	0,24	0,24	0,24	100	0,24		



	INDIKATOR KINERJA		CA	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME					
	OUTCOME	SATUAN	KONDISI	2013	20	114	CAPAIA	AKHIR	
			AWAL	REALISASI	TARGET	REALISASI	N		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	yang dimilikinya								
3	Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3	%	0,5	0,56	0,56	0,61	108,93	0,57	
4	Penanganan pelanggaran disiplin kepegawaian.	%	0,78	1	0,8	1	125	0,8	
5	Persentase PNS yang diberikan penghargaan berdasarkan prestasi dan masa kerja	%	0,35	0,29	0,35	0,25	71,43	0,35	
6	Persentase penerbitan SK tepat waktu	%	0,5	0,42	0,63	0,76	120,63	0,65	
7	Persentase pengisian jabatan sesuai formasi	%	0,95	0,95	0,95	0,97	102,11	0,95	
8	Tersedianya Database Kepegawaian	%	0,5	0,85	0,95	0,95	100	1	
1	Meningkatnya Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	opini	WDP		WTP	WTP	100	WTP	
2	Jumlah Perda tentang APBD	perda	3	3	3	3	100	3	
3	yang ditetapkan dalam 1 tahun. Jumlah Perbub tentang APBD yang ditetapkan dalam 1	perbup	3	2	3	3	100	2	
4	tahun Rasio pertumbuhan	%	0,2	0,8	0,1	0,11	110	0,12	
5	Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan	perbup	2	2	2	2	100	2	
6	aset daerah Prosentase kenaikan pajak	%	0,196	0,0296	0,336	0,35	104,17	0,0376	
7	dan retribusi daerah. Rasio PAD terhadap penerimaan APBD	%	3,50%	0,0502	0,05	0,055	110	0,055	
8	Rasio PAD terhadap pengeluaran	%	3,66%	0,0436	0,043	0,052	120,93	0,045	
	APBD								
1	Persentase peningkatan	%	0,8	0,9	0,9	0,95	105,56	0,9	
2	kinerja keuangan SKPD Jumlah aparatur yang	%	0,7	0,8	0,8	0,8	100	-	
3	mengikuti sosialisasi SPIP Penerapan system pengendalian intern	%	0	0	0,5	0,36	72	0,6	
4	pemerintah (SPIP) Temuan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	0,4	0,5	0,5	0,5	100	0,55	
5	Persentase aparatur Inspektorat yang dilatih	%	0,15	0,8	0,85	0,88	103,53	0,85	
1	Penyusunan indek kepuasan masyarakat	%	0	0,5	0,75	0,7541	100,55	1	
2	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penanganan pengaduan	%	0	0,5	0,75	0,75	100	1	
3	masyarakat. Ketersediaan SOP pelayan	dok	0	6	45	25	55,56	14	
4	persentase Kegiatan Daerah yang terpublikasi	%	20%	75%	100%	99,64%	99,64	60%	
5	Meningkatkan Layanan pengadaan Barang dan jasa	%	0%	70%	80%	80%	100	100%	



INDIKATOR KINERJA			CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME					KONDISI
	OUTCOME	SATUAN	KONDISI	2013 20		114	CAPAIA	AKHIR
			AWAL	REALISASI	TARGET	REALISASI	N	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	secara elektronik							
6	Peningkatan kualiatas SDM dalam Penyelenggaraan Publikasi informasi	%	20%	0,45	50%	50%	100	60%
7	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan	%	30%	60%	70%	70%	100	80%
8	Persentase Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	%	30%	60%	100%	99,64%	99,64	80%
9	Tingkat akses informasi dan penggunaan Teknologi Informasi	%	30%	70%	75%	75%	100	75%
10	Persentase Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	%	30%	60%	70%	70%	100	80%
11	Jumlah Koleksi Buku	%	20	90	1000	7699	769.9	60
12	Persetase Masyarakat di Nagari dan Sekolah yang dapat di layani mobil perpustakaan Keliling	%	30	90	75	75	100	75
13	Persentase Siswa/Siswi yang mengikuti Lomba Bercerita Tingkat SD/MI	%	0	99	70	0	0	80
14	Persentase Pengelola Perpustakaan yang mengikuti Bimtek gemar membaca	%	0	92	70	70	100	70
15	Persentase Nagari yang mendapat Bantuan buku dan Rak buku	%	0	99	80	0	0	85
1	% SKPD yang telah melaksanakan tata kearsipan	%	20	46	50	86	172	60
2	Aksesibilitas/ketersediaan layanan informasi arsip	%	30	90	80	0	0	80
3	Volume Arsip Statis yang terkumpul, tertata dan terkelola di lembaga kearsipan	Volume	0	4	10	10	100	15
4	Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan dan Arsip	Orang	0	1	3	3	100	3
1	Jumlah SOTK yang di sahkan	Perda	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah UPT yang terbentuk	Unit	0	121	0	0	0	0
1	Jumlah Produk Hukum daerah yang telah disahkan	buah	16	10	20	16	80	20
2	Capaian penyelesaian Hukum	Kasus	2	3	5	4	80	5
3	Jumlah RANHAM yang dilaksanakan	Kali	0	0	1	1	100	1
	D 1 11 11 11 11	2.	4	40-01	40-01	40-01		40-01
1	Persentase Kegiatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang Terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100	100%
2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari	Orang	40	80	120	120	100	100



INDIKATOR KINERJA OUTCOME		SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME					KONDISI
			KONDISI	2013 20		114	CAPAIA	AKHIR
			AWAL	REALISASI	TARGET	REALISASI	N	
	1	2	3	4	5	6	7	8
3	jumlah Pemekaran Nagari yang dilaksanakan	Nagari	40	80	90	0	0	100
4	Jumlah Tapal Batas Yang telah ditetapkan	segmen		1	2	1	50	2
5	Jumlah Rapat Kerja Daerah dengan PKDP	Pertemuan	5	4	4	1	25	4
6	Luas Tanah yang dibebaskan	Hektar			140.786	45.882	0,33	
7	Tersedianya Data e Pertanahan	Dokumen	1	1	1	0	0	1
8	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	persen	2		100	0,02	0,02	
9	Terlaksananya koordinasi Perencanaan ekonomi	paket	1	2	1	1	100	1
10	Tersedianya Pemantauan perlindungan dan konservasi SDA	Dokumen	1	1	1	1	100	1
11	Termonitoringnya pelaksanaan dana bergulir di masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	100	1
12	Jumlah Monitoring yang dilaksanakan	bulan	12	12	12	12	100	12
13	Jumlah Pameran yang di ikuti	kali	3	3	3	4	133,33	3
14	Tersedianya data perencanaan	dokumen	0	2	2	2	100	2
15	Jumlah Monitoring UKS yang dilaksanakan	bulan	12	12	12	12	100	12
16	Jumlah generasi muda yang dibina	orang	60	60	60	120	200	60
1	Jumlah Bimtek yang diikuti	kali	5	12	10	4	40	10
2	Persentase Peningkatan pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	persen	65%	90%	100%	75%	75	100%
3	Persentase hasil Reses yang ditaklanjuti	persen	60%	70%	100%	76%	76	100%
4	Jumlah Ranperda yang di hasilkan	buah	16	10 bh	25	17	68	30
5	Jumlah Kunker yang diikuti	kali	3	3 X	3	2	66,67	3
1	Rasio penduduk ber-KTP	%	36%	97%	100%	76%	76	100%
2	per satuan penduduk Kepemilikan KK	%	73%	100%	100%	100%	100	100%
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	55%	85%	90%	85%	94,44	92%
4	per-1000 penduduk Ketersediaan database	Ada/Tidak	belum	sudah	sudah	Sudah	100%	sudah
5	kependudukan skala kab Penerapan KTP Nasional	sudah / belum	belum	sudah	sudah	Sudah	100%	sudah
6	berbasis NIK Persentase penduduk yang memahami pentingnya adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	55%	90%	95%	95%	100	97%
7	Ketersediaan tenaga teknis Pelaksana SIAK	Tidak/Belum/Suda h cukup	Tidak cukup	Belum cukup	Sudah cukup	Sudah cukup	100%	Sudah cukup
8	Ketersediaan SOP pelayanan	Tidak/Ada	Tidak	ada	ada	ada	100%	ada
							- :	
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik	%	58%	0%	77%	65%	84,42	80%
2	jumlah Partai Politik yang duduk di DPRD	partai politik	13	13	13	13	100	13



	INDIKATOR KINERJA	CATHAN	CA	APAIAN INDII	KATOR KINE	RJA OUTCOM	CAPAIA N 7 7 71,43	KONDISI AKHIR
	OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	2013 REALISASI	TARGET	REALISASI		7.11.11.1
	1	2	3	4	5	6	7	8
3	Partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	kegiatan	1	4	7			7
1	Menurunnya penyakit	%	20%	12%	20%	18%	90	5%
2	masyarakat Menurunnya pelanggaran Perda	%	15	65	65	65	100	80
3	Pesentase Penurunan kasus/kejadian Pelanggaran Tramtibnas	%	15	65	20	19	95	75
4	% Peningkatan Kemampuan anggota POL PP	%	40	70	70	60	85,71	90
1	Persentase Peningkatan	%	60	71	77	50	64.04	80
2	kualitas musrenbang Kesesuaian program kerja	%	50	71	95		·	95
	SKPD dengan RPJMD							
3	Peningkatan Kualitas SDM perencanaan	%	55	70	77	60	77,92	80
4	Persentase ketersediaan data untuk penyusunan dokumen perencanaan	%	35	60	70	60	85,71	80
5	Persentase Kesesuaian kawasan yang dibangun	%	40	60	70	70	100	80
6	dengan RTRW Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi	dok	2 dok	5 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok
7	Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan bidang sosial budaya	dok	2 dok	2 dok	2 dok	1 dok	50%	2 dok
8	Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan bidang sumberdaya alam	dok	2 dok	2 dok	2 dok	1 dok	50%	2 dok
9	Terlaksana koordinasi perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	dok	2 dok	1 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok
10	Tersedianya dokumen penelitian	dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok
1	Jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	KELOMPOK	60	60	60	60	100	60
1	PKK Aktif	orang	64	78	78	78	100	78
1	Partisipasi perempuan di	%	0,08	0,1	0,105	0,33	314,37	0,11
1	Lembaga Pemerintah Partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif	%	0,086	0,086	0,086	0,05	58,33	0,15
1	Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	2,50%	0,025	0,025	2,5	100%	0,025
2	Persentase Peran swasta dan Mastarakat Dalam	%	2,50%	0,025	0,025	2,5	100%	0,025



	INDIKATOR KINERJA		CA	APAIAN INDI	KATOR KINE	RJA OUTCOM	E	KONDISI
	OUTCOME	SATUAN	KONDISI	2013	20)14	CAPAIA	AKHIR
			AWAL	REALISASI	TARGET	REALISASI	N	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembangunan							
3	Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan TTG pada masyarakat	orang	170	170	170	170	100%	170
4	Meningkatnya prosentase lembaga keuangan mikro nagari/ usaha ekonomi simpan pinjam yang berfungsi dengan baik	%	0,65	0,75	0,75	0,75	100%	0,75

Sumber: LAKIP Kab. Padang Pariaman Tahun 2014

2.2.2.3 Prioritas Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Jiwa Kewirausahaan

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan selama 4 tahun terakhir mengalami perubahan fluktuatif, meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas dan terjangkau.

Sebagian penduduk tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan masih mahal dan pendidikan juga dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga pendidikan belum dinilai sebagai bentuk investasi.

Selanjutnya, salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah perilaku hidup sehat. Dilihat dari indicator aspek pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah berupaya menyediakan fasilitas kesehatan yang dari tahun ke tahun semakin dapat menjangkau pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat Padang Pariaman. Permasalahan pelayanan kesehatan yang perlu mendapat perhatian adalah terjadinya peningkatan jumlah kasus kasus penyakit yang muncul yang perlu diantisipasi seperti DBD, HIV-AIDS,dll, peningkatan cakupan pelayanan puskesmas pembantu, polindes/poskesri, pemerataan penyebaran kesehatan tenaga serta perbaikan/rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan yang rusak.

Gambaran perkembangan pelayanan untuk capaian kinerja pada Prioritas Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Jiwa Kewirausahaan ini dapat dilihat selengkapnya pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013

			(CAPAIAN INDI	KATOR KINE	RJA OUTCOME		
INE	DIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI	2013	20	014		KONDISI AKHIR
			AWAL	REALISAS I	TARGET	REALISAS I	CAPAIAN	, , , , , , ,
	1	2	3	4	5	6	7	8
MIS	I III : "MEWUJUDKAN SUMBER	DAYA MANUS	SIA YANG BER	RKUALITAS DA	N BERKEPER	IBADIAN WIF	RAUSAHA"	
PRI	ORITAS 3 : PENINGKATAN KUA	LITAS SUMBE	RDAYA MANU	JSIA DAN JIW.	A KEWIRAUS	AHAAN		
1	Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	%	40	30,91	55	50,25	91,36	60
2	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	50	51,66	65	77,61	119,4	70
3	Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	88,84	94,44	93	92,1	99,03	94
4	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	104,26	109,75	108	107,67	99,69	109
5	Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	49,44	67,61	53	73,24	138,19	54,5
6	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	70,06	92,78	74	93,76	126,7	75
7	Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA /MA	%	36,99	52,6	44	55,34	125,77	45
8	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA /MA	%	49,3	65,93	54	67,17	124,39	55
9	Angka Melek Huruf (AMH)	%	94,5	98,5	98	98,99	101,01	99
1	Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi	%	85,11	87,29	89	86,35	97,02	90
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,58	99,13	99,9	100	100,1	99,95
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,88	99,5	99,98	100	100,02	99,99
3	Angka Kelulusan (AL) SMA /MA	%	98,7	97,02	99,9	99, 9 5	100,05	99,95
4	Angka Kelulusan (AL) SMK	%	98,7	97,02	99,9	99, 9 5	100,05	99,95
5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,13	0,19	0,4	0,14	35	0,3
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,28	0,18	0,15	0,18	120	0,1
7	Angka putus sekolah SMA/MA	%	6,05	0,42	2,15	0,34	15,81	1
8	Angka putus sekolah SMK	%	6,05	0,42	2,15	0,34	15,81	1
9	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	%	96,15	94,46	97	96	98,97	98
10	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Mts ke jenjang	%	121,52	75,95	125	86,66	69,33	125,5
11	SMA/SMK/MA Persentase lulusan SMK yang	%	10	15	15	15,67	104,47	17
	diterima di dunia kerja/wirausaha							
12	Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di PT/PTS	%	40	55	55	57,6	104,73	60
1	Persentase PKBM yang memiliki sarana dan prasarana	%	70	22,22	85	25,7	30,24	90
2	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	52,02	93,36	60	95,25	158,75	65
3	Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	73,72	77,83	77	80,23	104,19	78



				CAPAIAN INDI	KATOR KINE	RJA OUTCOME		
INI	DIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	2013 REALISAS	20 TARGET	REALISAS	CAPAIAN	KONDISI AKHIR
	1	2	3	4	5	6	7	8
4	Persentase Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	77,61	93,27	85	95,15	111,94	90
1	Jumlah cabang yang dibina	cabang	19	19	19	26	136.00	19
2	Meningkatnya prestasi Padang Pariaman pada PORPROV	Peringkat	12	7	6	3	200.00	6
3	Paskibraka	%	90%	90%	90%	90%	100	90%
4	Pemuda pelopor	%	70%	70%	70%	70%	100	70%
5	Presentase sarana dan prasaran olah raga	%	30%	35%	35%	35%	100	35%
1	Cakupan jumlah kunjungan masyarakat ke puskesmas (%)		36	50	60	60	100	65
2	Rasio Dokter per 1000 penduduk		0,144	0,124	0,164	0,164	100	0,169
3	Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk		1,717	0,174	1,778	1,778	100	0,794
4	Meningkatnya Usia Harapan Hidup (tahun)		70,9	71,84	72,2	72,2	100	72,56
5	Meningkatnya cakupan pelayanan spesialis dasar		0	0	0	0	0	
6	Meningkatnya cakupan ketersediaan obat dan vaksin		0,8	1	0,88	0,88	100	90%
7	Meningkatnya cakupan Desa		0,266	0,48	0,5	0,5	100	60%
8	Siaga Aktif Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD & setingkat		0,6	1	0,7	0,7	100	75%
9	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga		0,44	0,54	0,55	0,55	100	60%
10	Peningkatan persentase		0,22	0,39	0,4	0,4	100	40%
11	posyandu mandiri Cakupan Desa/RT yg mengonsumsi garam		0,9	0,58	0,99	0,99	100	100%
12	beryodium Cakupan bayi yg mendapat ASI-Eksklusif		0,61	0,69	0,75	0,75	100	0,8
13	Persentase siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan/tenaga terlatih (guru UKS/Dokter kecil)		0,6	0,8	0,7	0,7	100	75%
14	Tersedianya informasi kesehatan yang dibutuhkan masyarakat		1	1	1	1	100	1
1	Persentase status gizi buruk dan gizi kurang		13,30%	0,13	10,40%	10,4%	100	10%
2	Persentase balita gizi buruk yang ditangani di sarana kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk		1	1	33	33	100	100%
3	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin		1	1	2,062	69	0,033	100%
4	Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan		0,78	0,63	0,83	62,67	75	90%
5	Non Polio AFP rate per 100.000		>2	2,65	>2	3	150	>2
	penduduk							



				CAPAIAN INDI	KATOR KINE	RJA OUTCOME	<u> </u>		
INE	DIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	2013 REALISAS	TARGET	REALISAS	CAPAIAN	KONDISI AKHIR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Presentase penemuan pasien		0,75	0,75	81	78	96	0,85	
2	baru TB BTA positif Penderita DBD yang ditangani		96,30%	1	1	1	100	100%	
3	Cakupan KLB Desa/ kelurahan		1	1	1	1	100	100%	
	yang ditangani < 24 jam								
4	Desa /Kelurahan UCI		0,7	0,72	95	85	89	100	
5	Tersedianya Standar Operasional dan Standar pelayanan medis		0,5	1	1	1	100	1	
1	Meningkatnya cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar oleh dokter, bidan dan perawat		0,851		0,89	0,89	100	0,9	
2	Cakupan pelayanan anak balita		0,65	0,8	31,923	25,298	79	0,9	
3	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI		1	1	1	1	100	1	
4	Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani		1	1	1	1	100	100%	
5	Cakupan Kunjungan bayi		85,10%	0,85	7,623	6,433	84,39	0,9	
6	Meningkatnya upaya peningkatan pelayanan kesehatan lansia		0,7	0,68	0,74	0,74	100	75%	
7	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.		89,79%	0,85	0,93	0,93	100	95%	
8	Cakupan Ibu hamil dengan		0,72	0,75	0,89	0,89	100	80%	
9	komplikasi yang ditangani. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan		87,81%	0,87	0,89	0,89	100	90%	
10	Cakupan Pelayanan Nifas		0,85	0,83	0,89	0,89	100	90%	
11	Cakupan Neonatus dgn komplikasi yg ditangani		58,56%	0,43	0,75	0,75	100	80%	
12	Angka Kelangsungan Hidup		993	988,5	993	6,625	0,67	993	
13	Bayi per 1000 kelahiran hidup Angka kematian bayi (<15 per		7	11,5	71	58	81,69	72,56	
14	1000 kelahiran hidup) Angka kematian ibu (<100 per		104	98	100	6	6	94	
15	100.000 kelahiran hidup Angka Usia Harapan Hidup (Th)		70,9	71,84	72	72	100	72,56	
16	Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar dari RS (Net Death Rate=NDR= Angka kematian neto) 2.5%	0%	0,025	0,025	0,025	0,025	100		
17	Waktu Tunggu pasien di rawat	60 menit	55menit	40menit	30menit	30menit	100	30menit	
18	jalan ≤ 60 menit Angka kematian Umum untuk setiap 1.000 penderita keluar RS (Gross Death Rate=GDR 4.5%)	0%	4,50%	0,05	0,045	0,045	100	0,045	
19	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana RS (100%)	13%	20,70%	0,8	1	1	100	1	
20	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien (≥90%)	30%	0,9	0,9	0,9	0,9	100	0,9	
21	Persentase limbah cair & padat RS yang memenuhi baku mutu (BOD <30 mg/l,COD <80	0%	1	1	1	1	100	1	



				CAPAIAN INDI	KATOR KINE	RJA OUTCOME	Ē	
IN	DIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	2013 REALISAS	TARGET	REALISAS	CAPAIAN	KONDISI AKHIR
	1	2	2	4	-		7	0
	1 mg/I,TSS < 30 mg/l dan PH 6 -	2	3	4	5	6	7	8
	9) mencapai (100%)							
22	Angka pemanfaatan Tempat Tidur RS (Bed occupancy Rate=BOR) (60% – 85%)	0,85%	0,15	0,07	0,85	0,85	100	0,85
1	Peningkatan pengawasan peredaran obat-obatan dan bahan berbahaya yang beredar		0,062	0	0,062	0,062	100	0,062
2	Meningkatkan kemampuan puskesmas yang mampu PONED dan rehabilitasi polindes /poskesri		0,6	0,7	10	8	80	100%
3	Rasio Posyandu per satuan balita x 1000		14	22,15	14,3	14,3	100	14,5
4	Rasio Puskesmas, PUSTU, POLINDES/ POSKESRI persatuan penduduk x 1000				0,062	0,062	100	
5	Rasio pustu per satuan		0,17	0,1	0,179	0,179	100	0,181
6	penduduk x 1000 Rasio polindes/poskesri per satuan penduduk x 1000		0,36	0,32	0,384	0,384	100	0,386
7	Rasio RS per satuan penduduk		0,0025	0	0,0025	0,0025	100	0,0025
8	x 1000 Cakupan puskesmas (%)		141,18	0,15	0,164	0,164	100	0,169
9	Cakupan pembantu puskesmas		34,25	23,42	36,71	36,71	100	38,08
10	(%) Rasio dokter per satuan penduduk x 1000		0,144	0,12	0,164	0,164	100	0,169
11	Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk x 1000		1,717	1,61	1,778	1,778	100	1,794
1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		0,4125	0,22	60	21,99	36,65	80
2	Cakupan pelayanan kesehatan dasar miskin		0,7	0,95	75	94,85	126,47	80%
1	Jumlah Kasus KDRT yang ditangani	kasus	204	204	204	204	100	204
2	Terfasilitasinya Kelembagaan P2TP2A	KASUS	12	12	12	12	100	12
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	KASUS	12	12	12	12	100	12
4	Rasio KDRT (%)	%	30%	0,34	0,34	0,34	100	0,00023
5	Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah	%	8%	0,1	10	10	100	0,11
6	Partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif	%	8,57%	0,086	8,57	8,57	100	0,15
1	Rasio akseptor KB (%)	%	64%	0,6001	65,05	60,01	92	0,66
2	Jumlah PKBD yang dibina	kelompok	969	1029	1029	1029	100	1029
3	Jumlah Sub PKBD yang dibina	kelompok	60	60	60	60	100	60
4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	59,06%	0,35	40,05	35,01	87	0,3
5	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	kegiatan	2	2	2	2	100	2



				CAPAIAN INDI	KATOR KINE	RJA OUTCOME		
INE	DIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI	2013	20)14		KONDISI AKHIR
			AWAL	REALISAS I	TARGET	REALISAS I	CAPAIAN	ARIIIK
	1	2	3	4	5	6	7	8
6	Cakupan peserta KB aktif (%)	%	64%	0,6001	66,05	60,01	92	0,66
7	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Sekolah	3	3	3	3	100	3
8	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	kegiatan	2	2	2	2	100	2
9	Cakupan peserta KB aktif (%)	%	64%	0,6001	0,66	0,66	100	0,66
10	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Sekolah	3	3	3	3	100	3
1	Jumlah PMKS yang dibantu	orang	25.351	5.844 org	35.491	35.665	100,49	5.000
2	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomis sejenis lainnya	%	19,5	9,7	10	10	100	12
3	Persentase (%) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan	orang	25.351	5.844 org	35.491	35.665	100,49	5.000
4	Persentase lansia yang dibantu	%	8,17%	8,17	10,00%	9,80%	98,00%	10,00%
5	Jumlah anak terlantar yang dilatih	orang	15	15	15	15	100	15
6	Persentase cacat berat yang dibantu	%	8,47	8,47	10	10	100	10
7	Jumlah Panti yang dibina	12	12	13	12	12	100	12
8	Jumlah Kasus Sosial yang ditangani	kasus	10	8	10	1	10	10
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	480	480 org	480	280	58,33	480 org
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat	orang	32	32 org	32	32	100	32 org
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		32	32 org	32	32	100	32 org
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		5,8	3,2	2287	456	19,94	3,2
5	Jumlah Perusahaan yg dibina	perusahaa n	89	89 prs	89	21	23,6	89 prs
6	Persentase perusahaan yang Pengujian Peralatan		50	50	50	50	100	50
7	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		15,64	15,64	5503	4989	90,66	15,64
8	Besarnya kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		7,8	8,2	8,2	10	121,95	8,2

Sumber: LAKIP Kab. Padang Pariaman Tahun 2014

2.2.2.4 Prioritas Peningkatan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berdaya Saing

Salah satu sektor andalan penopang roda perekonomian Kabupaten Padang Pariaman adalah sektor pertanian. Hal ini memang sangat disadari bahwa sektor pertanian memang merupakan sektor unggulan. Untuk itulah upaya untuk terus

mempertahankan budi daya pertanian dilakukan dengan meningkatkan cakupan pembinaan kelompok tani. Cakupan bina kelompok tani yaitu kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Lebih rinci perkembangan indikator kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian dapat dilihat pada Tabel berikut.

Gambaran perkembangan pelayanan untuk capaian kinerja pada Prioritas Peningkatan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berdaya Saing ini dapat dilihat selengkapnya pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Peningkatan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berdaya Saing di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014

				CAPAIAN INDI	IKATOR KINE	RJA OUTCOME		
	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI	2013	20)14		KONDISI AKHIR
	00.002		AWAL	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	7
	1	2	3	4	5	6	7	8
DAN	I IV: "MEWUJUDKAN PEMBAI I AGROINDUSTRI"						KAN SISTEM A	AGRIBISNIS
PRI	ORITAS 4 : PENINGKATAN PE		PERTANIAN \	YANG TANGGU 17.180*	H DAN BERDA 18.790	AYA SAING 17.676.83	0.00	18795
1	Jumlah areal lahan sawah Irigasi	На	18.770	17.180*	18.790	17.676,83	94,08	18795
2	Panjang Jalan Usaha Tani	meter	31.455	1.300	15.000	15.000	8.890	15.000
1	Panjang Jalan Produksi	Km	9,3	0	5	1.280	25.60	5
2	Produksi padi	ton	255.053,55	284.340,31	291.448,82	284.341,29	97,56	298.735,04
3	produksi jagung	ton	8.284,48	13.310,71	13.643,48	14.054,70	103,01	13.984,57
4	Produksi ubi kayu	ton	13.387,44	12.906,09	13.349,68	13.026,19	97,58	13.683,42
5	Produksi kakao	ton	11.220,00	7.500,52	8.250,57	7.500,50	90,91	9.075,63
6	produksi kelapa	ton	34.942,20		34.030,79	32.410,26	95,24	32.329,25
7	produksi pepaya	ton	533.497,57	414,37	424,73	4.144,37	975,77	435,35
8	produksi pisang	ton	6979,92	13.004,53	13.394,67	15.683,93	117,09	13.796,51
9	produksi naga	ton	4,56	442,27	464,38	418,11	90,04	487,6
10	Luas Lahan Peremajaan Perkebunan Kakao	На	7.903,00		5.305,60	-57,6	-1,09	
11	Luas Lahan Peremajaan Perkebunan Kelapa	На	200	200	200	853	426,5	200
12	Sapi Potong	ekor	31.944	39.903,00	96,907	35,688	36,83	
13	Sapi Perah	ekor	-	12	20	40	200	
14	Kerbau	ekor	12.662	15.950,00	64,98	11,99	18,45	16.200,00
15	Kuda	ekor	33	35	46	28	60,87	43
16	Kambing	ekor	29578,25	32.750,00	41,41	32,02	77,32	37.845,00
17	Ayam Buras	ekor	828546,3	1.148.140,00	1.157.318	1.079.292	0,93	1.060.109,00
18	Ayam Ras Petelur	ekor	263838,75	632.240,00	388,64	585,59	150,68	337.576,00
19	Ayam Ras Pedaging	ekor	3914811,3	3.833.529,00	4.770.404,00	3.833.529,00	80,36	5.008.924,00
20	Itik	ekor	167.637	145.078,00	204.275,00	1.450.788,00	710,21	214.488,00



				CAPAIAN IND	IKATOR KINE	RJA OUTCOME		
	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI	2013	20)14		KONDISI AKHIR
			AWAL	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
21	1 Produksi Sapi Potong	2 kg	3 6.988.556	4 878.127,00	5 8.252.130,00	6 849.176,00	7 10,29	8 8.664.736,00
22	Produksi Kerbau	kg	2.658.936	252.669,00	3.240.053,00	252.669,00	7,8	3.402.056,00
23	Produksi Kambing	kg	73.767	39.923,00	94,15	48,73	51,76	756.900,00
24	Produksi Ayam Buras	kg	747.982	1.398.435,00	323.081,00	803.698,00	248,76	756.900,00
25	Produksi Ayam Ras Pedaging	kg	1.698.993	4.177.293,00	2.075.242,07	4.931.472,00	237,63	2.179.004,17
26	Produksi Itik	kg	67.343	85.306,00	82.060,57	783.420,00	954,69	86.163,60
27	jumlah pelaku utama dan pelaku usaha (KK tani miskin) yang melaksanakan usaha tani terpadu dengan	KK	200	360	280	325,00	116,07	300
28	jam kerja standar Tersebarnya Informasi Pasar hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah	Komoditi	4	7	8	5	62,5	9
29	Peningkatan kemampuan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	orang	100	310	325	250	76,92	350
30	Luas Lahan kawasan Pertanian Organik	ha	10	50	60	60	100	60
31	Jumlah Nagari Model Pertanian Terpadu	Nagari	2	5	5	1,00	20	5
32	Persentase peningkatan pendapatan rata-rata nelayan dan pembudidaya ikan	%	10%	10%	10%	11%	107,3	10%
33	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	21.718,60	34.813,80	23.732,50	36.813,80	155,12	24.444,50
34	Tingkat Pendapatan nelayan/bulan (Rp)	Rp	1.094.368	1.324.185	1.456.604	1.527.000	104,83	1.602.264
35	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	15.879	35.572,25	21.879,00	35.572,25	162,59	23.879,00
36	Tingkat Pendapatan pembudidaya/bulan (Rp.)	Rp	1.650.000	1.996.500	2.196.150	2.150.000	97,9	2.415.765
37	Persentase kontribusi usaha perikanan terhadap PDRB	%	2,90%	3,40%	4,50%	4,00%	88,89	5%
1	jumlah pelaku utama dan pelaku usaha (KK tani miskin) yang melaksanakan usaha tani terpadu dengan	KK	200	280	325	116,07	#DIV/0!	200
2	jam kerja standar Tersebarnya Informasi Pasar hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah			8	5	62,5	#DIV/0!	
3	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	orang	0	325	250	76,92	#DIV/0!	270 org
4	Luas Lahan kawasan Pertanian Organik	ha	1	60	60	100	#DIV/0!	3
5	Jumlah Nagari Model Pertanian Terpadu	Nagari	0	5	1	20	#DIV/0!	3
6	Terwujudnya kawasan eko wisata pesisir dan laut	lokasi	1	1 lokasi	1	2	200	1
7	Terwujudnya kawasan budidaya payau	ha	0,5	20	25	125	0	30
8	Selesainya pelabuhan perikanan representatif (%)	%	0	60	80	133	0	100
9	Jumlah Balai Benih Ikan yang dibangun (unit/th)	unit	0	0	0	0	0	1
10	Pertambahan jumlah sarana dan prasarana kelautan perikanan (%/th)	%		60	80	80	100	100
11	Berkembangnya kawasan minapolitan (Kawasan/th)	unit	0	2	2	100,00	0	2



				CAPAIAN INDI	KATOR KINE	RJA OUTCOME		
	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI	2013	20	114	CAPALAN	KONDISI AKHIR
			AWAL	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPATAN	
	1	2	3	4	5	6	7	8
12	Persentase kelompok yang dibina (%)	%	66,14	78,32	88,77	88,24	99,4	93,09
13	Tingkat konsumsi makan ikan per tahun	kg/kap/th	33kg/kap/th	39 kg/kap/th	42 kg/kap/th	42 kg/kap/th	100	54kg/kap/th
14	Unit pengolahan ikan mandiri	unit	71	94	95	94	98,95	100 unit
15	Tersedianya pasar ikan higienis	unit	1	3	1	1	100	1
16	Jumlah kegiatan sosialisasi mitigasi yang dilaksanakan	%	2 kali/ tahun	0	10 kali/ tahun	10	100	10 kali/ tahun
17	Kegiatan budaya dan wawasan maritim yang dilaksanakan	ton	0	0	2	2	100	2 kali
18	Terwujudnya kawasan konservasi pesisir dan laut daerah	На	684	684	984	838	85,16	984
19	Terwujudnya kawasan konservasi lubuk larangan	Lokasi	79	90	95	128	134,74	100
20	Terlaksananya restocking Benih Ikan	ekor	200.000	300.000	200.000	720.000	360	200.000
21	Terlaksananya restocking tukik penyu	ekor	1.000	0	1.500	1.427	95,12	2.000
22	Ekosistem pesisir yang direhabilitasi	На	20	0	20	20	100	20
23	Penurunan Persentase tindak pelanggaran	%	10	0	10	10	100	10%
1	Jumlah Poktan, Gapoktan dan kelompok Perikanan	kelompok		78	78	224	287,18	78
2	Persentase Kelembagaan Petani yang dibina	%	50	100	100	88,77	88,77	100
3	Terlaksananya Gerakan Pensejahteraan Petani	Kec	17	17	17	17	100	
4	Desa Mandiri Pangan	desa	2	7	7	7	100	
5	Jumlah Ketersediaan Pangan	ton/beras	132.696,65	142.899,36	168.127,70	168.127,70	100	132.696,65

Sumber: LAKIP Kab. Padang Pariaman Tahun 2014

2.2.2.5 Prioritas Pengembangan Pelaku UMKM dan Koperasi yang Handal dan Profesional sebagai Basis Ekonomi Kerjakyatan

Usaha perdagangan di kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2010-2014 mengalami pasang surut. Jumlah pedagang kecil yang memiliki SIUP pada tahun 2010 tercatat sebanyak 175, kemudian pada tahun 2011 dan 2012 jumlah pedagang kecil bertambah cukup signifikan menjadi 289 dan 303 orang. Akan tetapi di tahun 2013 jumlah pedagang kecil yang terdaftar kembali berkurang menjadi 234 orang. Kemudian di tahun berikutnya jumlah pedagang kecil yang memilki SIUP menjadi 254 orang.

Pedagang mengenah yang populasinya sedikit juga mengalami hal yang sama, dimana selama periode tahun 2010-2014 terjadi pasang surut. Pada tahun 2014 jumlah pedagang menengah tercatat 12 unit usaha. Sementara itu, jumlah pedagang besar pada tahun 2014 bertambah menjadi 3 orang.

Selama kurun waktu 2010-2014, jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan dari 207 di tahun 2010 menjadi 230 pada tahun 2014. Perkembangan jumlah koperasi juga diikuti dengan bertambahnya jumlah anggota koperasi, tercatat pada tahun 2014 jumlah anggota koperasi di Padang Pariaman sebanyak 24.431 orang.

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian kinerja pada Prioritas Pengembangan Pelaku UMKM dan Koperasi yang Handal dan Profesional sebagai Basis Ekonomi Kerjakyatan di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Pengembangan Pelaku UMKM dan Koperasi yang Handal dan Profesional sebagai Basis Ekonomi Kerjakyatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME								
				1				KONDISI
INE	DIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI	2013	20)14 I	CAPALAN	AKHIR
			AWAL	REALISASI	TARGET	REALISASI		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	I IV: "MEWUJUDKAN PEMBANC IBISNIS DAN AGROINDUSTRI'		NOMI YANG T	ANGGUH DAN	BERDAYA SAI	NG BERBASIS	KAN SISTEM	
PRI	ORITAS 5 : MENGEMBANGKAN		IKM DAN KOPE	ERASI YANG H	ANDAL DAN P	ROFESIONAL	SEBAGAI BAS	IS
EKO 1	NOMI KERAKYATAN jumlah koperasi Baru	koperasi	5	2	5	4	80	5
2	Jumlah Koperasi aktif	koperasi	138	172	166	174	104,82	173
		'						
3	Jumlah kop. Yang dibina kelembagaan	koperasi	31	60	55	60	109,09	60
4	Koperasi yg mampu membuat laporan secara mandiri	%	15	30,43%	25	29	116	30
5	jumlah UKM/ calon UKM yang berkonsultasi di KKB	UKM	0	11	10	14	140	10
6	Jumlah KUMKM yang memperoleh sosialisasi dan pembinaan	KUMKM	0	50	50	50	100	50
7	Jumlah UMKM dan Koperasi yang mendapat bantuan Permodalan	KUMKM	0	10	5	6	120	5
8	Volume usaha koperasi	%	88.995.564	4,74%	5	6	120	5
9	Nilai Produksi IKM	%	121.731.000.000	2,05	200.000.000.000	133.820.573.400	66,91	2
10	Jumlah Industri yang menerapkan sistem mutu	IKM	0		7	10	142,86	10
11	jumlah IKM yang mandiri	IKM	0	8	7	9	128,57	10
12	Jumlah klaster industri	klaster	0	3	3	3	100	3
13	Jumlah sentra industri	sentra	16	26	24	27	112,5	26
14	Jumlah pasar yang kondusif (BANA) di bangun/ diperbaiki	pasar	0	2	1	2	200	1
15	Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh	orang	0	4	2	4	200	2
16	Cakupan binaan terhadap PKL	%	0	9,63	10	15,53	155,3	13
1	jumlah UTTP yang ditera	UTTP	610	1488	800	2014	251,75	800
2	Cakupan penyelesaian kasus sengketa konsumen	%	0	57,14	40	0	0	40

				CAPAIAN IND	IKATOR KINE	RJA OUTCOME		
INE	DIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI	2013	20)14	CAPAIAN	KONDISI AKHIR
			AWAL	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPATAN	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelesaian izin rata-rata pertahun.	%	99,55%	9,9979	1	1	100	1
2	Penyelesaian pengaduan	%	0	0,42	0,3	0,3	100	0,4
3	Pertumbuhan Investasi	%	0	0	0,4	0,09	21,52	0,5
	PMA							
4	Pertumbuhan Investasi	%	-7,28%	-0.01867	0,5	0,34	68,71	0,5
	PMDN							
5	Pertumbuhan Investasi	%	-7,72%	-0.2013	0,5	-0,152	-30	0,5
	Masyarakat							
1	Peningkatan Fasilitas Obyek Wisata Unggulan	objek wisata	0	4	4	4	100	2
1	jumlah kunjungan wisatawan	orang			4.147.297	4.293.605	103,53	
1	Jumlah Kawasan Wisata Kuliner	objek wisata	1	1	1	1	100	1
		Width						
1	Jumlah Kawasan Wisata Religi	objek wisata	1	1	1	1	100	1

Sumber: LAKIP Kab. Padang Pariaman Tahun 2014

2.2.2.6 Prioritas Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Daerah Tertinggal

Prioritas 6 adalah Penurunan tingkat kemiskinan dan Daerah Tertinggal dengan arah kebijakan :

- 1) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social.
- 2) Peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi PMKS, anak jalanan, anak terlantar,
- 3) Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
- 4) Peningkatan pembangunan Infrastruktur di daerah tertinggal.
- 5) Peningkatan kapasitas masyarakat miskin
- 6) Penanganan kemiskinan secara terpadu antar SKPD

Nagari tertinggal di kabupaten Padang Pariaman berada mulai dari nagari yang berada di dataran rendah (daerah pantai) hingga daerah pegunungan. Nagari tertinggal juga berada pada daerah yang memiliki kerawanan bencana seperti, daerah rawan banjir, longsor, gempa dan tsunami. Pada daerah yang berada dikawasan pegunungan atau daerah ketinggian memiliki curah hujan yang cukup



sehingga tanaman perkebunan sangat cocok untuk dikembangkan. Adapun Kondisi Ketertinggalan Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

- 1. Lebih dari 87% penduduk yang tinggal di Nagari tertinggal bergantung kehidupannya pada sektor pertanian, dimana hampir 100% penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.
- 2. Lebih dari 68% penduduk didaerah tertinggal adalah masyarakat miskin dan 2% diantaranya sangat miskin.
- 3. Sementara untuk sumber bahan bakar 99% penduduk di Nagari tertinggal masih menggunkan kayu bakar.
- 4. 90% Fasilitas pendidikan yang ada baru sampai tingkat Sekolah Dasar (SD).
- 5. 82% Nagari/korong tertinggal tidak memiliki fasilitas kesehatan.
- 6. 50% jalan utama di Nagari/Korong tertinggal dalam kondisi di perkeras.
- 7. 21% tanah dan 29% dalam kondisi sudah diaspal.
- 8. 54% dari Nagari/korong sudah dialiri listrik rumah tangga penduduknya lebih dari 71%.

Perkembangan Pembangunan Nagari/Korong Tertinggal di Padang Pariaman sebagai berikut :

- 1. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 kondisi daerah tertinggal sudah mengalami perubahan, tetapi masih belum cukup untuk melepaskan nagari/korong dari ketertinggalannya.
- 2. Pemekaran Nagari dan Korong yang dilakukan berdampak pada penambahan jumlah nagari dan korong tetapi secara persentase tidak menyebabkan penambahan jumlah nagari/ korong tertinggal.
- 3. Pada tahun 2010 dari 46 Nagari ada 38 Nagari tertinggal, yang berarti 56,5% Nagari tertinggal.
- 4. Pada tahun 2012 dari 60 Nagari tinggal 26 Nagari yang tertinggal, yang bearti 43,33% Nagari tertinggal.
- 5. Sementara untuk tingkat korongnya, tahun 2010 dari 366 Korong , ada 130 Korong tertinggal (48%).
- 6. Pada tahun 2012 dari 444 Korong ada 183 Korong tertinggal (41,22%)

Tabel 2.13
Indeks Ketertinggalan Kabupaten Padang Pariaman 2011

KRITERIA	INDIKATO	R	DATA TAHUN 2011	DATA TAHUN 2013
Infrastruktur	Jumlah Desa dengan	Aspal	98,33	59 Desa
	permukaan jalan terluas	Diperkeras	1,67	1 Desa
		Tanah	0 Desa	0 Desa
		Lainnya	0 Desa	0 Desa
	Jumlah Desa yang mempu Bangunan Permanen	nyai Pasar Tanpa	53,33 %	32 Desa
	Jumlah Prasarana Kesehat Penduduk	an Per 1000	1,19	1,19 Unit



KRITERIA	INDIKATOR	DATA TAHUN 2011	DATA TAHUN 2013	
	Jumlah Dokter Per 1000 Penduduk	0,18	0,18 Orang	
	Jumlah SD/SMP Per 1000 Penduduk	1,22 Unit	1,22 Unit	
	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (2010)	91,99 %	95,27 %	
	Persentase Rumah Tangga Pengguna Telepon (2010)	6,60 %	2,68 %	
	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (2010)	35,55%	55,56%	
Aksessibilitas	Rata-rata Jarak dari Kantor Desa/Kelurahan ke kantor Kab yang membawahi (Km)	22,34 Km	22,34 Km	
	Akses ke Pelayanan Kesehatan > 5Km (jumlah desa)	0 Desa	0 Desa	
	Akses ke Pelayanan Pendidikan Dasar (Km)	2,75 Km	0 Km	
Karakteristik	% Desa Gempa Bumi	100%	100%	
Wilayah	% Desa Tanah longsor	41, 67%	41%	
	% Desa Banjir	53,33%	53,33%	
	% Desa Bencana lainnya	41,67%	41,67%	
	% Desa di kawasan Hutan	16,67%	23,33%	
	% Desa Berlahan Kritis	18,33 %	18,33 %	
	% Rata2 Desa konflik 1 Tahun Terakhir	1,67%	1,67%	
Ekonomi	Persentase Penduduk Miskin 2010	11.86 %	9,17 %	
	Pengeluaran Konsumsi Perkapita (Ribu Rupiah) (2010)	Rp 630.4	Rp 640,82	
Sumber Daya	Harapan Hidup (2010)	68,65Th	71,84Th	
Manusia	Rata-rata Lama Sekolah (2010)	7,26 Tahun	8,30 Tahun	
	Angka Melek Huruf (2010)	94,49%	94,86%	
Kapasitas Kelembagaan	Fiscal gab	109,476	Rp 29.643430.649	

Tabel 2.14
Hasil Capaian Daerah Tertinggal Padang Pariaman Tahun 2014 (Pendataan Tahun 2014)

KRITERIA	INDIKATO)R	DATA BPS, MENKEU dan SKPD Terkait	DATA BPS DAN MENKEU
Infrastruktur	Jumlah Desa dengan	Aspal	59 Desa	59 Desa
	permukaan jalan terluas	Diperkeras	1 Desa	1 Desa
		Tanah	0 Desa	0 Desa
		Lainnya	0 Desa	0 Desa
	Jumlah Desa yang mempunyai Pasar Tanpa Bangunan Permanen Jumlah Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk		32 Desa	32 Desa
			0,0625 Unit	1,19 Unit
	Jumlah Dokter Per 1000 P	enduduk	0,124 Orang	0,18 Orang
	Jumlah SD/SMP Per 1000	Penduduk	1,22 Unit	1,22 Unit
	Persentase Rumah Tangga (2013)	Pengguna Listrik	95,27 %	95,27 %
	Persentase Rumah Tangga Telepon (2013)	Pengguna	2,68 %	2,68 %
	Persentase Rumah Tangga Bersih (2013)	Pengguna Air	55,56%	55,56 %
Aksessibilitas	Rata-rata Jarak dari Kanto Desa/Kelurahan ke kanton membawahi (Km)		22,34 Km	22,34 Km
	Akses ke Pelayanan Keseh (jumlah desa)	atan > 5Km	0 Desa	0 Desa
	Akses ke Pelayanan Pendi	dikan Dasar (Km)	0 Km	0 Km
Karakteristik	% Desa Gempa Bumi		100%	100%
Wilayah	% Desa Tanah longsor		41%	41%
	% Desa Banjir		53,33%	53,33%
	% Desa Bencana lainnya		41,67%	41,67%
	% Desa di kawasan Hutan		23,33%	23,33%

KRITERIA	INDIKATOR	DATA BPS, MENKEU dan SKPD Terkait	DATA BPS DAN MENKEU
	% Desa Berlahan Kritis	18,33 %	18,33 %
	% Rata2 Desa konflik 1 Tahun Terakhir	1,67%	1,67%
Ekonomi	Persentase Penduduk Miskin (20130	9,17 %	10,13 %
	Pengeluaran Konsumsi Perkapita (Ribu Rupiah) (2013)	Rp 640,82	Rp 640,82
Sumber Daya	Harapan Hidup (2013)	71,84Th	69,44 Th
Manusia	Rata-rata Lama Sekolah (2013)	8,30 Tahun	7,47 Th
	Angka Melek Huruf (2013)	94,86%	94,86 %
Kapasitas Kelembagaan	KKD (2013)	Rp 29.643430.649	Rp 29.643430.649

Secara lebih terperinci capaian kinerja kemiskinan dan daerah tertinggal Padang Pariaman tahun 2014 dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Daerah Tertinggal di
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014

				CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME						
	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	UAN KONDISI	2013	20)14	CADALANI	KONDISI AKHIR		
		AWAL	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
DAN	SI IV: "MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG TANGGUH DAN BERDAYA SAING BERBASISKAN SISTEM AGRIBISNIS AN AGROINDUSTRI" RIORITAS 6 : PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN									
1	Jumlah korong tertinggal	Korong	366	183	183	183	100	0		
2	Persentase penduduk miskin	%	11,86	9.83 *	9,17	9,17	100	10,1		

Sumber: LAKIP Kab. Padang Pariaman Tahun 2014

Penanggulangan kemiskinan merupakan hasil komulatif dari seluruh proses pembangunan, setiap upaya pembangunan hasilnya akan berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan, seperti pembangunan jalan, jembatan, investasi sektor swasta, bahkan pengangkatan pegawai. Namun ada program-program yang langsung dialokasikan dengan sasaran khusus penduduk miskin sebagai bentuk afirmasi terhadap kemiskinan.

Pada tahun 2011, persentase penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman sejumlah 11,26 persen dengan jumlah sebanyak 44,63 ribu jiwa. Pada tahun 2013, jumlah ini berurang menjadi 36,80 jiwa dengan persentase 9,17 persen.

2.2.2.7 Prioritas Peningkatan Ketahanan Masyarakat dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana serta Mendorong Pembangunan Pemukiman yang Ramah bencana.

Dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam dilakukan oleh beberapa SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya

dengan sasaran meningkatnya prasarana penanggulangan bencana, tersedianya informasi wilayah rawan bencana serta meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Adapun sumber pendanaan yang dipergunakan melalui APBD, APBN dan sumber lainnya.

Beberapa program, indikator kinerja dan target dengan pendanaan APBD serta capaiannya terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Peningkatan Ketahanan Masyarakat dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana serta Mendorong Pembangunan Pemukiman yang Ramah
Bencana di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014

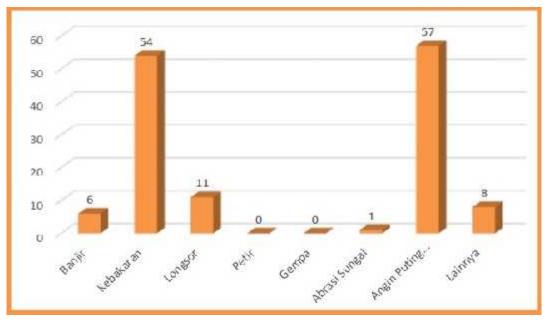
				CAPAIAN IND	KATOR KINE	RJA OUTCOME		
I	NDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI	2013	20)14	CADALANI	KONDISI AKHIR
	OUTCOIVIL		AWAL	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANIIK
	1	2	3	4	5	6	7	8
	V : "TERWUJUDNYA PEME		NG RAMAH LI	INGKUNGAN M	ELALUI PENA	NGGULANGAN	RESIKO BENG	CANA DAN
	<u>GELOLAAN LINGKUNGAN H</u> PRITAS 7 : PENINGKATAN I		MASYARAKAT	DAN KESIAPSI	AGAAN TERH	ADAP BENCAN	A SERTA MENI	OORONG
PEME	BANGUNAN PERMUKIMAN	YANG RAMAH	BENCANA					
1	Tingkat ketersediaan pranata penanggulangan bencana	dok	0	7	8	9	112,5	
2	Peningkatan Kualitas SDM	%	0,1	0,16	0,18	0,21	116,67	0,2
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	%	0,7	0,83	0,78	0,83	99,95	0,8
4	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	0,07	0,8	0,9	0,9	100	1
5	Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	80%	0,87	88%	88%	100	90%
6	Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap	%	74%	8,0	90%	90%	100	1
7	darurat lengkap Peningkatan jalur Evakuasi	%	0	0	80%	0%	0	1
1	Penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan Evakuasi, rambu evakuasi.	%	0	0,1	40%	40%	100%	0,5
2	Penambahan Rambu rambu bahaya, pengeras suara di sepenjang pantai dan togor EWS.	%	0%	0,25	30%	36%	120%	0,4
3	Jumlah sarana Evakuasi	%	0%	0,3	20%	20%	100	0,4
4	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK	%	12%	0,29	29%		0	0,35
						29%		
5	Jumlah sarana penyelamatan tanggap darurat bencana	%	50%	0,7	80%	80%	0	0,9
6	Peningkatan Rekonstruksi Pasca Bencana	unit	92.534	87.060	92.534	87.060	0	92.534

INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN KONDISI		2013	2014		CARALANI	KONDISI AKHIR
OUTCOME		AWAL	REALISASI	TARGET REALISASI		CAPAIAN	ANTIK
1	2	3	4	5	6	7	8

Sumber: LAKIP Kab. Padang Pariaman Tahun 2014

Untuk kegiatan kebencanaan pada tahun 2014, musibah bencana alam mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Jenis musibah yang mendapat bantuan sosial bencana alam selama periode 2014 ini adalah 54 kasus kebakaran, dan 8 kasus lainnya.

Gambar 2.5 Jumlah Kejadian Bencana Alam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 -2014



Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2015

2.2.2.8 Prioritas Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/Kabupaten, yang meliputi fasilitas transportasi berupa jalan, jembatan, dan irigasi. Tersedianya infrastruktur tersebut menunjang kegiatan perekonomian masyarakat yang didominasi oleh sektor pertanian.

Peningkatan dan perbaikan infrastruktur terus dilakukan berupa pemeliharaan (periodik & rutin) jalan dan jembatan, irigasi. Menurut panjangnya, jalan raya di Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2014 mengalami penambahan yaitu sepanjang 2.240,35 Km, dengan rincian menurut status jalan,: jalan negara 84,30 Km, jalan provinsi 83,65 Km, dan jalan kabupaten 2.072,4 Km,

Sedangkan jalan kabupaten menurut jenis permukaannya mengalami perubahan. Pada tahun 2014 jalan kabupaten dengan permukaan aspal tercatat sepanjang 1.087,85 Km, selanjutnya jalan dengan permukaan kerikil tercatat sepanjang 279,78 Km, dan panjang jalan dengan permukaan tanah tinggal 704,77 Km.

Jumlah dan panjang jembatan negara sebanyak 47 buah jembatan dengan panjang 1.153,7 m, sedangkan jembatan provinsi sebanyak 39 buah dengan panjang 741,15 m dan jembatan kabupaten sebanyak 212 buah dengan panjang 2.796,0 Km.

Sedangkan jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014 sebanyak 2.504 buah kendaraan dengan rincian 116 mobil penumpang, 445 bus dan 1.849 truk.

Sarana perhubungan darat lainnya yang beroperasi di Kabupaten Padang Pariaman adalah sarana transportasi kereta api. Jumlah penumpang tahun 2014 adalah sebanyak 325.592 orang dengan total pendapatan 1,05 milyar rupiah.

Selanjutnya sumber air sebagai bahan baku air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2014 tercatat sebanyak 22 buah terdiri dari 9 mata air, 10 sungai grafitasi, dan 3 sumur pompa. Pelanggan PDAM selama tahun 2013 berjumlah sebanyak 12.340 pelanggaran dengan jumlah konsumsi air bersih sebanyak 1.880.120 m3

Luas Irigasi yang dalam kondisi baik tahun 2014 seluas 77,34% yang dapat mengairi areal tanam seluas 22.856 ha. Upaya peningkatan cakupan infrastruktur khususnya irigasi terus ditingkatkan, hal ini terbukti dengan hampir selesainya pembangunan irigasi Anai II.

Secara lebih lengkap capaian kinerja pada prioritas Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dapat kita lihat pada table berikut ini :

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013

				CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME					
INE	DIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDICI	2013	2	014		KONDISI	
			KONDISI AWAL	REALISAS I	TARGET	REALISAS I	CAPAIAN	AKHIR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	MISI V : "TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN YANG RAMAH LINGKUNGAN MELALUI PENANGGULANGAN RESIKO BENCANA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP"								
PRIORITAS 8 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN									
1	Persetase Gedung Kantor yang terbangun di kawasan Ibukota Kabupaten	%	15%	0	0,55	0,25	45,45	0,6	
2	Pembangunan ruang terbuka hijau	%	0%	0%	60%	32%	53	70%	
3	Akses jalan menuju Ibukota	km	0.5	4,5	7	4	57,14	9	
4	terbangunnya drainase	%	15%	0,3615	0,3	0	0	0,8	
5	Terbangunnya jaringan air bersih	%	20%	0,37	0,45	0,4	88,89	0,5	



LNIE	UVATOD VINEDIA OUTCOME	CATHAN	0.	APAIAN INDIR 2013		014	- I	KONDISI
IINL	IKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL	REALISAS	TARGET	REALISAS	CAPAIAN	AKHIR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tercapainya pengembangan wilayah untuk pemerataan pembangunan	%	30%	0,35	0,55	0,33	60	0,6
1	Jumlah kawasan strategis dan	Unit	2	2	2	0	0	
2	cepat tumbuh yang terbangun Persentase peningkatan fasilitas ekonomi dan infrastruktur pendukung	%	20%	49%	42%	42%	100	45%
	1							
1	Meningkatnya produktivitas pertanian sehingga pendapatan petani meningkat	%	45%	73%	76%	100,20%	131,84	82%
2	Jml sarana prasarana jar. Irigasi yang dapat diperbaiki secara maks.	На	250	346,92	500	500	100	550
3	Tersedianya dok. Perencanaan teknis pemb. Jar. Irigasi	Dok	1	1	1	1	100	1
4	Jml sarana prasarana jar. Irigasi yang dapat diperbaiki secara partisipatif masyarakat	На	150	2194	500	500	100	1000
5	Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat dilingkungan permukiman	%	20%	32%	40%	40%	100	50%
6	Koord./Monev keg. Pemb. penyehatan lingkungan	Keg.	1	3	3	3	100	3
7	Terbangunnya jaringan air	%	10%	18%	30%	25%	83,33	40%
8	bersih (perpipaan) Jumlah Nagari yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (persen)	Nagari	8	12	25	25	100	35
1	Pertumbuhan jalan mantap	%	5	20	30	52,53	175,1	35
2	Panjang jalan yang dibangun (km)	km	18	42	30	186,76	622,53	35
3	Panjang Peningkatan Jalan Kabupaten	Km		42	30	30	100	25
4	Panjang jalan yang terpelihara secara periodik (km)	km	14	25	28	30	107,14	33
5	Panjang jalan yang terpelihara	Km	100	125	300	300	100	400
6	secara rutin (km) Tersedianya data base jalan	Dokumen	1	2	1	1	100	4
7	Terbuka dan terhubungnya daerah terisolir /Panjang Peningkatan Jalan Pedesaan (km)	km	6	10,13	7	4,29	61,22	7
	, ,							
1	Tersedianya Lingkungan Permukiman yang sehat	%	10%	34%	50%	50%	100	55%
2	Terlaksananya gerakan standar lingkungan dan hidup sehat	Dokumen	0	2	3	3	100	2
3	(dokumen) Tersusunnya data masyarakat miskin dikawasan kumuh	Dokumen	0	0	4	4	100	4
4	Tersedianya rumah sehat bagi masyarakat miskin di kawasan kumuh dan padat penduduk (unit)	unit	150	250	500	500	100	1500
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	buah	580.442	520.162	500.089	530.200	106,02	480.197



			C.	APAIAN INDIK	KATOR KINE	RJA OUTCOMI		
INE	DIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDICI	2013		014		KONDISI
			KONDISI AWAL	REALISAS I	TARGET	REALISAS I	CAPAIAN	AKHIR
	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Rasio ijin trayek	%	14	23	25	25	100	28
3	Jumlah uji keur angkutan umum	buah	3.650	544	4.034	4.649	115,25	4.254
4	Jumlah Terminal Bis	unit	2	2	2	2	100	2
5	Jumlah Pelabuhan Laut	unit		1	1	1	100	1
6	Jumlah Bandar Udara (Bandara)	unit	1	1	1	1	100	1
7	Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang angkutan darat x 100%	%	14,50%	0,115	11%	10%	90,91	10,5
8	Kepemilikan KIR angkutan umum	unit	2.014	544	2.442	2.324	95,17	2.570
9	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	bulan	6	6	6	6	100	6
10	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp	61.000	53.500	61.000	53.500	87,7	61.000
11	Jumlah Rambu-rambu	buah	213	350	530	1351	254,91	600
1	Prosentase akurasi data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kab. Padang Pariaman	%	75%	85%	90%	90%	100	90%
2	Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan : SD, SMP dan SMA	unit	40 SD, 3 SLTP dan 3 SLTA	6, 7, 5	12, 5, 3	17, 5, 3	125%	12, 5, 3
3	Prosentase akurasi data penghijauan di Kab. Padang Pariaman	%	70%	85%	85%	85%	100	90%
1	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen Amdal atau UKL/UPL	Dokumen	31	70	89	82	92,13	100
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal atau UKL/UPL	50%	62,50%	59,50%	64,40%	49,00%	76,09	
3	Pencemaran status mutu air	48,8	52,27	70,21	71,43	54,2	75,88	
1	Prosentase perusahaan yang wajib mentaati adm dan teknis emisi gas buang sumber tidak bergerak	%	15%	35,70%	42,90%	50%	116	42,90%
1	Jumlah wilayah yang diindikasikan mengalami penurunan kualitas tanah	titik	4	7	9	10	88,89	9
1	Penambahan tutupan vegetasi di wilayah tangkapan air	ha	21	25,3	28,3	43,3	153	31,3
2	Prosentase luas pantai yang ditanami tanaman penghijauan	%	16,80%	28%	0,3	31,8	10600	0,33
3	Penambahan tutupan lahan diluar kawasan hutan	batang	29.522	42.872	48.052	57.200	119,04	54.452
	December D. P.	04	F00/	70.000	70.0007	70.000	100	70.000
1	Prosentase Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	%	50%	73,30%	73,80%	73,80%	100	79,90%
		21	25.15	40		0	0.11	
1	Capaian target PAD	%	95,13	124,05	100	86,39	86,39	100
2	jumlah rekomendasi izin yang dikeluarkan	rekomendas i izin	0	17	15	52	346,67	16



			C.					
INE	DIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDICI	2013	2	014		KONDISI AKHIR
			KONDISI AWAL	REALISAS I	TARGET	REALISAS I	CAPAIAN	ANIIK
	1	2	3	4	5	6	7	8
3	sarana dan prasarana sektor pertambangan	%	0%	80%	60%	80%	133,33	60%
4	luas tambang yang ditertibkan	ha	5	17,8	7	5,34	76,29	7
5	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)	ha	357		112	509	454	
6	Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	%	8,20%		0,82	61,19	74,62	

Sumber: LAKIP Kab. Padang Pariaman Tahun 2014

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal kota, regional maupun global melalui pendekatan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015 yakni:

2.3.1 Prioritas Pengamalan ABS-SBK dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya.

Yang masih menjadi permasalahan serta sasaran yang belum tercapai dalam prioritas Pengamalan ABS-SBK dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya dalam kehidupan masyarakat antara lain masih kurangnya peran masyarakat dalam mengaktifkan wirid dan pengajian di Korong masing-masing. Kemudian dalam pengembangan seni dan budaya belum dilaksanakan secara optimal. Belum optimalnya pemanfaatan, peran dan fungsi pemangku dan lembaga adat dalam penanaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau. Perlunya peningkatan pembinaan generasi muda di temngah-tengah masyarakat baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat.

2.3.2 Prioritas Penerapkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Salah satu ciri dari good governance adalah adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan publik dan dalam pelaksanaan serta pengawasannya. Hal tersebut dijamin secara hukum dengan berlaku efektifnya Undang-undang No. 4/2008 tentang Keterbukaan Informasi



Publik pada tanggal 1 Mei 2010 berikut PP 61/2010 sebagai petunjuk teknisnya. Sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mengembangkan infsatruktur bagi keterbukaan informasi publik. Dan ini berkaitan juga dengan ketersediaan data-data yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan publik.

Isu lain terkait dengan tatakelola pemerintahan adalah perlunya peningkatan pengelolaan arsip pemerintah, peningkatan kualitas data dan perencanaan dan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga secepatnya dapat diwujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bukti tertib administrasi keuangan daerah. Mendapat predikat WTP mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dinyatakan bersih, transparan dan akuntabel.

Masih terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan masyarakat, belum tercapainya penegakan perda terutama perda perijinan membutuhkan sinergitas lintas SKPD. Terkait dengan upaya penertiban kegiatan masyarakat dibutuhkan solusi yang menyeluruh yang terkait dengan program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Masih terdapat beberapa kelemahan, diantaranya terdapat tumpang tindih tugas serta penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan manajemen organisasi, belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, antara lain disebabkan belum mantapnya pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Misalnya, masih sulit untuk memastikan bahwa terdapat hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan instansi pemerintah dengan anggaran yang dikeluarkan. Permasalahan lain yang setiap tahunnya, yaitu program dan kegiatan pada masing-masing SKPD pada umumnya belum sepenuhnya disertai dengan indikator kinerja yang jelas, sehingga sulit diukur pencapaian dan akuntabilitas kinerjanya.

2.3.3 Prioritas Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Jiwa Kewirausahaan

Kualitas pendidikan sangat mendesak untuk ditingkatkan perlu dijadikan sebagai salah kualitas pendidikan satu tujuan penyelenggaraan pendidikan. Perbedaan kualitas antar sekolah mengakibatkan ketimpangan mutu pendidian antar sekolah dan wilayah. Oleh karena itu pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah dan wilayah merupakan dimensi penyelenggaraan pendidikan yang harus dijadikan perioritas. Mutu yang harus dibangun kedepan adalah mutu pendidikan yang mengintegrasikan tiga dimensi utama yaitu cerdas intelektual, emosional dan spiritual. Keterpaduan ketiga dimensi mutu inilah yang akan dijadikan sebagai basis dalam membangun masyarakat yang berkarakter dan memiliki jati diri.

Pelayanan kesehatan dasar menjadi isu strategis penting lainnya demi terpenuhinya pelayanan kesehatan masyarakat yang semakin berkualitas. Oleh



karena itu penuntasan penyakit harus menjadi perioritas utama. Jenis penyakit utama yang perlu segera dipercepat pengurangannya adalah Malaria, ISPA, TBC, Diabetes, Gondok serta jenis penyakit lainnya. Fokus kebijakan kesehatan adalah mengurangi persoalan utama tersebut disamping memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan dasar.

Pembangunan dan pengembangan RSUD Kabupaten Padang Pariaman berstandar nasional merupakan program dan kegiatan strategis yang harus direlaisasikan dalam 5 tahun kedepan dan pada gilirannya bisa menjadi cikal bakal rumah sakit berstandar internasional. Tantangan utama lainnya yang perlu mendapatkan prioritas adalah perubahan paradigma pelayanan kesehatan yang harus eksis dalam pemikiran dan pemahaman para pelayan kesehatan dasar (tenaga medis dan paramedis). Perubahan paradigma pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan hospitality approach merupakan tantangan utama sektor kesehatan dan harus dijadikan perioritas dalam pembangunan sektor kesehatan. Perwujudan paradigma ini menghadapi dua permasalahan utama: (1) kualifikasi tenaga paramedis yang masih jauh dari standar mutu, (2) Rasio jumlah dokter dengan jumlah penduduk yang masih jauh dari standar mutu yang telah ditetapkan, (3) Masih belum lengkapnya sarana dan prasrana RSUD sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

2.3.4 Prioritas Peningkatan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berdaya Saing

Dalam periode 2005 -2010 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB kabupaten Padang Pariaman cendrung menurun dari 26,39 % pada tahun 2006 hingga 24,14 % pada tahun 2010. Sedangkan sektor industri sedikit berfluktuasi, dimana rerata kontribusi sektor industri terhadap pembantukan PDRB kabupaten Padang Pariaman hanya sebesar 11,21% dan cendrung stagnan dalam 3 tahun terakhir. Namun pada tahun 2009 dan 2010 terjadi sedikit pergeseran dimana sektor pengangkutan dan komunikasi menempati sektor pertama yang memberikan konstribusi terbesar dalam perekonomian kabupaten Padang Pariaman yakni 25,86 % pada tahun 2009, meningkat menjadi 26,52 % pada tahun 2010. Gambaran data ini memperlihatkan bahwa sektor pertanian yang sebelumnya (tahun 2005-2008) merupakan sektor yang menempati urutan pertama dalam komposisi struktur ekonomi Kabupaten Padang Pariaman sekarang sudah tergeser oleh sektor angkutan dan komunikasi, dimana secara riil tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteran masyarakat. Masalah pada sektor pertanian di Kabupaten Padang Pariaman; (1) belum optmalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian dan hal ini diperlihatkan oleh rendahnya produktivitas usaha pertanian dan pada gilirannya mengakibatkan rendahnya produktivitas marginal usaha pertanian; (2) rendahnya adopsi tehnologi pertanian dan kurangnya infrastruktur penunjang; (3) aktivitas usaha pertanian yang belum berorientasi pasar dan ekspor.

2.3.5 Prioritas Pengembangan Pelaku UMKM dan Koperasi yang Handal dan Profesional sebagai Basis Ekonomi Kerjakyatan

Isu strategis yang eksis di sektor industri adalah: (a) untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah yang relatif tinggi; (b) menciptakan kreasi dan inovasi produk industri kecil. Seluruh faktor penyebab tersebut diperkirakan bersumber dari rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang bekerja di sektor industri. Buktinya, sebanyak 24,81 persen angkatan kerja yang siap untuk bekerja hanya berpendidikan SD dan tidak tamat SD. Seluruh persoalan yang dihadapi dalam upaya membangun kinerja ekonomi sektoral berawal dari eksisnya persoalan sumberdaya manusia sebagai pelaku yang tidak didukung oleh knowledge and technologi yang memadai.

2.3.6 Prioritas Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Daerah Tertinggal

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok orang laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat.

Jika tidak segera ditanggulangi masalah kemiskinan ini akan berdampak serius pada permasalahan sosial yang lain. Berbagai dampak yang bisa timbul antara lain; (i) peningkatan beban sosial ekonomi masyarakat yang semakin berat, (ii) menurunnya kualitas dan produktifitas sosial ekonomi, (iii) menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, (iv) meningkatnya kriminalitas dan terganggunya stabilitas sosial, (v) munculnya ketimpangan dan kecemburuan sosial, maupun (vi) menurunnya kualitas sumber daya manusia, yang berimplikasi pada merosotnya mutu generasi.

Oleh karena itu permasalahan kemiskinan, disamping masalah pengangguran dan kesenjangan menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di Padang Pariaman selain itu juga penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang undang Dasar 1945 . Secara konkrit amanat konstitusi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan tercantum dalam pasal pasal Undang undang 1945 amandemen ke-empat.

Kondisi kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan data Susenas 2014 sebesar 8,91 persen atau 34.002 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman. Dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin namun juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman



kemiskinan (P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relative terhadap garis kemiskinan (GK) Pada tahun 2013, P1 mengalami penurunan dibanding tahun 2012. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Kondisi ini sudah jauh menurun dibandingkan dengan persentase kemiskinan sebelumnya pasca gempa tahun 2009. Namun kemiskinan Padang Pariaman jika dibandingkan dengan Tingkat kemiskinan propinsi masih perlu diturunkan lagi. Permasalahan utama kita adalah kurang sinerginya dan terintegrasi program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilaksanakan selama ini.

2.3.7 Prioritas Peningkatan Ketahanan Masyarakat dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana serta Mendorong Pembangunan Pemukiman yang Ramah bencana.

Kapasitas atau kemampuan daerah merupakan segala potensi sumber daya untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Semakin tinggi ancaman bahaya di suatu daerah, maka semakin tinggi risiko daerah terkena bencana. Demikian pula semakin tinggi tingkat kerentanan masyarakat atau penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Tetapi sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemampuan masyarakat, maka semakin kecil risiko yang dihadapinya. Padang Pariaman merupakan daerah yang rawan bencana baik gempa,banjir, lomgsor dan angin putting beliung. Permasalahan utama terhadap penanggungalangan bencana antara lain Belum optimalnya informasi kebencanaan kepada masyarakat. Sarana prasarana penanggulangan bencana belum memadai, Masih rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana Serta Pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam belum memadai.

2.3.8 Prioritas Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Sumberdaya alam dengan seluruh aspek lingkungannya, merupakan salah satu faktor penentu kinerja pembangunan. Namun isu strategis yang muncul adalah perencanaan pengembangan wilayah yang belum sepenuhnya mengadopsi zonasi 'ramah lingkungan' bahkan 'akrab bencana', baik dari kerawanan gerakan tanah maupun konservasi untuk antisipasi tsunami. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah rawan bencana namun isuisu zonasi akrab bencana belumlah menjadi arus utama (mainstream) dalam perencanaan pembangunan wilayah. Pembangunan pemukiman dan fasilitas umum maupun sosial di sekitar daerah-daerah rawan bencana merupakan bukti nyata yang memperlihatkan eksisnya permasalahan tersebut. Pada sisi lain meningkatnya ancaman bagi kelestarian DAS karena masih banyaknya sungai yang dimanfaatkan sebagai daerah pertambangan bahan galian golongan C maupun tempat pembuangan limbah industri dan rumahtangga. Kelestarian sungai berdampak negatif terhadap pasokan air untuk irigasi dan perikanan darat

1

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dan sungai, ancaman erosi, ketahanan infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan. Dalam 5 tahun terakhir terjadi pergeseran yang cepat dalam perubahan paradigma pengelolaan lingkungan hidup, dari paradigma 'pendayagunaan' kepada 'konservasi'. Namun hal ini belum secara kuat direspon oleh pemerintah maupun masyarakat. Kekayaan deposit bahan galian golongan C yang belum termanfaatkan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan bila pengeksploitasiannya tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.

Permasalahan utama dalam pembangunan infrastruktur di Padang Pariaman untuk pencapaian kinerja daerah adalah belum maksimalnya pembangunan sarana dan parasarana pemerintah di pusat Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman di Paritmalintang, Pembangunan Sarana air bersih yang belum maksimal perencanaan dan pelaksanaannya sehingga tidak mencapai target kiunerja, disamping itu pembangunan sanitasi yang masih jauh dari target MDGs, selain itu kita juga harus memperhatikan pembangunan irigasi disamping pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.



BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kabupaten Padang Pariman Tahun 2015 berikut proyeksi perekonomian Tahun karakteristiknya serta 2016-2017 digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Padang Pariman berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2016 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Padang Pariman harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan ekonomi Provinsi Tahun 2016 serta RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025. Berikut arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2017 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi:

1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Berwawasan Lingkungan;

Dengan 15 (lima belas) arah kebijakan:

- a. Peningkatan kinerja dan cakupan pelayanan jaringan irigasi, prasarana sumberdaya air, pelabuhan, pengembangan moda transportasi, sanitasi dan air bersih untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan pembangunan antar wilayah;
- b. Peningkatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. Penyediaan fasilitas dan pemeliharaan prasarana perhubungan;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. Percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan untuk penunjang ekonomi masyarakat;
- f. Peningkatan fasilitas dan pemeliharaan prasarana pasar dan perdagangan;
- g. Peningkatan fasilitas keselamatan dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas;



- h. Peningkatan dan pembangunan kualitas sarana dan prasaran terminal;
- i. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan limbah;
- j. Penguatan Pengelolaan PDAM dan BPSPAM;
- k. Peningkatan kualitas, kontinuitas layanan air bersih;
- 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas rumah layak huni;
- m.Pengurangan luasan kawasan kumuh;
- n. Peningkatan kualitas permukiman;
- o. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh

2. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi;

Dengan 8 (delapan) arah kebijakan:

- a. Pengembangan produk olahan dan pemasaran yang bernilai tambah;
- b. Jaminan mutu dan keamanan hasil pertanian dan perikanan;
- c. Peningkatan kemitraan bisnis bagi UMKM dan koperasi;
- d. Penguatan usaha skala kecil dan menegah dan penguatan kemitraan dengan sektor swasta;
- e. Fasilitasi dalam standarisasi produk UMKM dan IKM, perlindungan terhadap produk dalam negeri;
- f. Pembinaan dan pemberdayaan UMKM-IKM, dan koperasi;
- g. Fasilitasi sarana dan prasarana UMKM-IKM;
- h. Pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sentra dan cluster

3. Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan;

Dengan 9 (ssembilan) arah kebijakan:

- a. Peningkatan produksi komoditi unggulan pertanian dan perikanan dengan pendekatan potensi wilayah;
- b. Pengembangan sentra produksi, agribisnis dan mina politan;
- c. Penerapan standarisasi dan sertifikasi pertanian dan perikanan;
- d. Peningkatan usaha investasi pertanian dan perikanan;
- e. Peningkatan dan pemanfaatan inovasi dan teknologi pertanian dan perikanan tepat guna;
- f. Penerapan standarisasi jaminan mutu komoditi dan produk olahan pertanian dan perikanan;
- g. Peningkatan kemitraan antara kelompok pengolahan dengan pengusaha;
- h. Peningktan dan penguatan kapasitas SDM kelompok dan kelembagaan petani;
- i. Peningkatan SDM penyuluh, sarana dan prasarana serta penyelenggraan sistem penyuluhan

4. Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha serta Pengembangan Pariwisata Daerah secara Terpadu;

Dengan 8 (delapan) arah kebijakan:

- a. Peningkatan pelayanan investasi dan kejelasan regulasi;
- b. Mendayagunakan program/kegiatan sektoral di daerah untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan dunia usaha, membangun strategi untuk meningkatkan investasi dengan penyerderhanaan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, hubungan industrial dan promosi, serta dukungan infrastruktur;



- c. Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata, dan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata;
- d. Penataan dan mengelola kawasan wisata kuliner serta menata dan pengembangan mengelola kawasan wisata;
- e. Promosi Pariwisata yang terukur, efisien dan partisipatif;
- f. Pengembangan kualitas obyek dan event-event pariwisata;
- g. Sinergitas pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata dengan sektor lain;
- h. Revitalisasi dan penataan kawasan tradisional dan situs bersejarah

5. Penurunan Tingkat Kemiskinan secara terintegrasi.

Dengan 10 (sepuluh) arah kebijakan:

- a. Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral yang mengarah pada upaya penanggulangan kemiskinan disertai penguatan kelembagaan dan sinkronisasi/harmonisasi kebijakan antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin, lanjut usia, PMKS termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal yang mencakup pendidikan, kesehatan, hunian layak, air bersih, sanitasi, penyediaan bantuan dan jaminan sosial serta peningkatan cakupan jaminan kesehatan;
- c. Peningkatan kerjasama yang melibatkan dunia usaha dan perguruan tinggi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- d. Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui optimalisasi program jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga produktif dan pengembangan kewirausahaan;
- e. Peningkatan kesejahteraan nelayan, masyarakat pesisir dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
- f. Peningkatan efektifitas penggunaan data kemiskinan;
- g. Peningkatan Sinergi Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan;
- h. Peningkatan kualitas tenaga kerja;
- i. Pengembangan ketenagakerjaan secara menyeluruh mealui peningkatan usaha produktif dan terpadu;
- j. Perluasan kesempatan kerja bagi usia produktif dan angkatan kerja.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2016

Selama kurun waktu 2010-2014 struktur perekonomian Padang Pariaman menurut lapangan usaha masih didominasi oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini terlihat dari besarnya perananan lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Padang Pariaman yang mencapai lebih dari 20 persen selama 5 tahun terakhir.

Kemudian lapangan usaha yang cukup berperan dalam menentukan pembentukan PDRB Padang Pariaman adalah lapangan usaha industri pengolahan yang mampu berkontribusi lebih dari 10 persen selama periode 2010-2014. Selanjutnya, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reperasi mobil dan motor, lapangan usaha konstruksi dan lapangan usaha pertambangan dan



penggalian juga cukup berkontribusi dalam pembentukan PDRB Padang Pariaman dengan share sebanyak 6 – 8 persen. Sementara, peranan lapangan usaha lainnya di bawah 5 persen.

Untuk kinerja pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014 meningkat cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2014. Meningkatnya kinerja pembangunan ekonomi ini disebabkan karena kondisi sosial, politik dan keamanan yang lebih stabil daripada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, berbagai pengembangan proyek pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman cukup menggeliat, seperti proyek pembangunan sekolah pelayaran, pelabuhan dan perbaikan jalan lintas Padang Pariaman.

Pertumbuhan Padang Pariaman pada tahun 2014 mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Padang Pariaman Tahun 2014 sebesar 6,03 persen sedangkan pada tahun 2013 mencapai 6,18 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas dengan peningkatan yang signifikan yakni sebesar 24,87 persen. Selanjutnya lapangan usaha informasi dan komunikasi juga memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi yakni sebesar 10,58 persen. Pada urutan ketiga pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi adalah lapangan usaha konstruksi sebesar 9,18 persen.

Pada tahun yang sama, sebagian besar lapangan usaha yang tumbuh dikisaran 7 sampai dengan 8 persen antara lain : lapangan usaha jasa dan perusahaan (8,65 persen), lapangan usaha jasa kesehatan dan sosial (8,46 persen), lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (8,27 persen), lapangan usaha pertambangan dan penggalian (7,83 persen), lapangan usaha jasa pendidikan (7,28 persen), lapangan usaha jasa lainnya (7,21 persen), serta lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (7,11 persen).

6,30 6,20 6,10 6,00 5,90 5,80 5,70 5,60 2011 2012 2013* 2014**

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Padang Pariaman Tahun 2011-2014

Sumber: PDRB Padang Pariaman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015



Setiap tahunnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 sebesar 8.269.849,9 juta rupiah, pada tahun 2011 sebesar 9.434.051,1 juta rupiah, pada tahun 2012 sebesar 10.639.391 juta rupiah, pada tahun 2013 sebesar 12.277.885,4 juta rupiah dan selanjutnya pada tahun 2014 sebesar 14.412.403,5 juta rupiah.

Sedangkan nilai PDRB atas harga konstan, juga selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2010 sebesar 8.269.849,9 juta rupiah, pada tahun 2011 sebesar 8.754.039,5 juta rupiah, pada tahun 2012 sebesar 9.273.827,3 juta rupiah, pada tahun 2013 sebesar 9.847.345,3 juta rupiah, pada tahun 2014 sebesar 10.441.132,4 juta rupiah.

Untuk lebih jelasnya perbandingan PDRB Padang Pariaman atas harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.

Perbandingan PDRB Padang Pariaman atas Harga Berlaku dan Harga Konstan
Tahun 2010-2014 (Tahun Dasar 2010)

Tahun	PDRB Atas Harga Berlaku	PDRB Atas Harga Konstan
2010	8.269.849,9	8.269.850,0
2011	9.434.051,1	8.754.039,5
2012	10.639.391,0	9.273.827,1
2013	12.277.885,4	9.847.345,4
2014	14.412.403,5	10.441.132,3

Sumber: PDRB Padang Pariaman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian suatu daerah merupakan gambaran tentang komposisi perekonomian daerah dimana dalam hal ini komposisi perekonomian daerah terdiri atas sembilan sektor ekonomi/lapangan usaha. Sehingga struktur ekonomi sekaligus dapat menunjukkan tinggi rendahnya kontribusi atau peran seluruh sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB pada daerah tertentu. Dari gambaran tersebut secara umum dapat memberikan informasi tentang ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya. Apabila struktur ekonomi disajikan dari waktu ke waktu (time series) maka dapat dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi dari waktu ke waktu.

Terdapat kecenderungan bahwa setiap tahun terjadi pergeseran antar sektor ekonomi, dan pergeseran tersebut diakibatkan adanya perkembangan nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor ekonomi. Pergeseran struktur ekonomi dapat digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan adanya suatu proses pembangunan, sehingga dengan melihat pergeseran tersebut diharapkan



akan dapat bermanfaaat dalam menentukan arah kebijakan di masa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode tertentu tidak terlepas dari adanya peningkatan nilai tambah masing-masing lapangn usaha yang ikut membentuk nilai tambah perekonomian suatu negara/daerah secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya berikut diuraikan perkembangan Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha Kabupaten Padang Pariaman baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Memperhatikan latar belakang dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi umum Perekonomian Nasional dan Regional Sumatera Barat, perkembangan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 dalam konteks makro regional diperkirakan akan terus berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prediksi perekonomian Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 diharapkan dapat berkembang relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya (2014), mengingat implikasi dari diberlakukannya sejumlah kebijakan pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Meskipun trend perkembangan LPE Kabupaten Padang Pariaman selama lima tahun terakhir (2009-2013) menunjukkan indikasi pelambatan bahkan pada tahun 2009 hanya mencapai 3,94, namun perlambatan pertumbuhan tersebut secara signifikan disebabkan oleh pasca gempa 30 September 2009 yang telah memporak porandakan Padang Pariaman.

Berdasarkan kondisi dan potensi perekonomian yang ada serta memperhatikan prospek perekonomian tahun 2015, maka fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman dalam konteks mendorong sekaligus menjamin terjadinya pertumbuhan dinamis adalah: 1) Mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan sektor pertanian dan industri manufaktur, 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi 7 persen, 3) Meningkatkan kualitas belanja pemerintah melalui peningkatan belanja investasi, 4) Menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal (local economic development), 5) Menumbuhkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan hasil produksi pertanian dan kelautan, pengembangan dan pemberdayaan agroindustri, peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi serta peningkatan investasi PMA dan PMDN.

Selanjutnya, sesuai penjelasan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dalam penyusunan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2016 perlu disesuaikan dengan prakiraan asumsi ekonomi makro untuk APBN 2016; Pencapaian target pertumbuhan

P P

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ekonomi sebesar 6,6 persen; Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen; Penurunan angka kemiskinan menjadi 10,0 sampai dengan 9,0 persen; dan tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,2 persen sampai dengan 5,5 persen.

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

1. Nawa Cita 1

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

2. Nawa Cita 2

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Nawa Cita 3

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Nawa Cita 4

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Nawa Cita 5

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Nawa Cita 6

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

7. Nawa Cita 7

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8. Nawa Cita 8

Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

9. Nawa Cita 9

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha lainnya.

Kinerja pembangunan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014 meningkat cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2013. Berbagai



pengembangan proyek pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman cukup menggeliat, seperti proyek pembangunan sekolah pelayaran, pelabuhan dan perbaikan jalan lintas Padang Pariaman.

Seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi diharapkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan pendapatan riil masyarakat. Sebagaimana amanat Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan, oleh karena itu RKPD 2017 harus memiliki semangat dan kebijakan pro-growth, pro-justice dan pro-poor.

Untuk laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha selama kurun waktu 2010-2014 relatif cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2010 sebesar 5,60 persen, pada tahun 2011 sebesar 5,85 persen, pada tahun 2012 sebesar 5,94 persen, pada tahun 2013 sebesar 6,18 persen, dan pada tahun 2014 sebesar 6,03 persen.

Dari gambaran pertumbuhan riil PDRB Padang Pariaman tersebut, untuk mencapai sasaran RKPD 2017 sesuai dengan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 yang disusun berdasarkan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 yaitu "Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat", maka pembangunan ekonomi ditekankan pada upaya mengembangkan dan mendayagunakan seluruh potensi yang ada untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Adapun arah kebijakan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan maksimal sehingga mendorong masyarakat agar sadar akan kewajibannya membayar pajak/ retribusi.
- 2. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur sarana dan prasarana sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.
- 3. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada pemerintah pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat, dan akurat sehingga diperoleh peningkatan dana perimbangan.
- 4. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
- 5. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap SKPD pengelola pendapatan daerah.
- 6. Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.

PEMERINT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- 7. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Propinsi dan SKPD terkait.
- 8. Mengoptimalkan kinerja BUMD/Perusda untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- 9. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pengalokasian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money follow function).

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Datadata perkembangan realisasi anggaran, data lima tahun, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis dan diskusi juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013-2017

	URAIAN	JUMLAH					
NO		REALISASI TAHUN 2013	REALISASI TAHUN 2014	TAHUN 2015	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2016	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	
	PENDAPATAN	902.296.273.328,00	1.070.485.660.574,51	1.159.592.546.878,00	1.322.086.926.339,00	1.498.316.945.951,51	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.075.356.791,00	56.520.310.748,51	63.238.861.561,00	70.494.693.445,00	83.848.335.658,86	
1.1.1	Pajak Daerah	15.060.000.000,00	19.860.000.000,00	24.490.000.000,00	27.585.000.000,00	32.868.083.404,84	
1.1.2	Retribusi Daerah	10.733.695.000,00	20.483.200.374,51	11.326.450.000,00	12.375.902.229,00	16.389.121.806,86	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.028.675.465,00	4.874.124.048,00	3.869.897.624,00	4.256.660.279,00	12.110.486.394,91	
114	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.252.986.326,00	11.302.986.326,00	23.552.513.937,00	26.277.130.937,00	33.437.708.716,08	



		JUMLAH						
NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2013	REALISASI TAHUN 2014	TAHUN 2015	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2016	PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2017		
1	2	3	4	5	6	7		
1.2	DANA PERIMBANGAN	752.486.816.916,00	809.705.362.205,00	850.081.456.817,00	959.606.580.817,00	1.073.578.953.326,28		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.009.061.916,00	17.743.347.205,00	16.074.285.817,00	16.074.285.817,00	15.645.968.271,85		
1.2.2	Dana Alokasi Umum	633.453.395.000,00	683.752.765.000,00	724.226.441.000,00	783.592.205.000,00	870.939.265.972,79		
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	97.024.360.000,00	108.209.250.000,00	109.780.730.000,00	159.940.090.000,00	193.963.578.486,24		
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	109.734.099.621,00	204.259.987.621,00	246.272.228.500,00	291.985.652.077,00	340.889.656.966,38		
1.3.1	Hibah	914.175.000,00	914.175.000,00	964.420.500,00	964.420.500,00	1.034.322.179,32		
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.452.888.621,00	21.452.888.621,00	39.268.516.000,00	41.366.696.577,00	48.192.574.559,25		
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	87.367.036.000,00	181.892.924.000,00	195.067.240.000	197.067.240.000,00	242.969.000.954,06		
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	10.172.052.000,00	51.787.295.000,00	273.857.653.653,40		
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	800.000.000,00	800.000.000,00	489.955.969,77		
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	902.296.273.328,00	1.070.485.660.574,51	1.159.592.546.878,00	1.322.086.926.339,00	1.498.316.945.951,51		

Sumber: DPPKA Kab. Padang Pariaman 2016

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2017 yang telah ditetapkan melalui Musrenbang Tahun 2016 ini, maka pada tahun 2017 ke depan, Kabupaten Padang Pariaman berupaya untuk mewujudkan "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Menunjang Perekonomian dan Daya Saing Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat" melalui pengembangan sumber pendapatan daerah yang potensial maka peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat, disertai dengan tertib administrasi pungutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Sumber penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Retribusi Daerah diupayakan optimal dari segi hasil (yield) berdasarkan azas keadilan (equity), memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (ability to implement) dan kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (suitability as local revenue source). Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya Pajak (tax effort) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PDRB), hasil guna (eficiency) yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak;
- 2) Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegaskan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Dalam usaha mencapai efesiensi ini, tiga faktor yang mengancam yang patut diperhatikan



adalah penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, dan penipuan oleh petugas pajak. Daya guna mengukur bagian dari hasil pajak digunakan untuk menutup biaya memungut pajak yang bersangkutan;

- 3) Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah antara lain memperhatikan faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu kondisi awal daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan peraturan dan perundang-undangan;
- 4) Rencana Tindak Peningkatan Pendapatan Daerah (Local Government Revenue Improvement Action Plan) adalah program terencana dan terpadu untuk: a). mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada; dan b). mengidentifikasikan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber-sumber penerimaan daerah.

Dari kedua tujuan diatas, jelas bahwa rencana peningkatan penerimaan daerah ini merupakan program yang bersifat selfcorrected. Hal ini berarti bahwa selain untuk mencapai sasaran penerimaan daerah sesuai potensi yang ada (realistis), program terpadu ini juga ditujukan untuk mengantisipasi berbagai perubahan. Hal tersebut terutama berkaitan langsung dengan penerimaan yang rencana pembelanjaannya telah ditetapkan secara baku dalam cakupan anggaran satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dituntut untuk bisa membiayai kebutuhan infrastruktur dan kebutuhan warga Padang Pariaman dengan menggali potensi pendapatan daerah.

Pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah yang menuntut ketergantungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat semakin berkurang.

Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN. Dana perimbangan tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dalam



mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Lain-lain pendapatan daerah terdiri dari dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi.

3.2.2.1.1 Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, maka Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2017 sebagian besar mengacu kepada kebijakan umum pendapatan tahun 2016- 2021.

Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
- b. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah yang ditujukan kepada:
 - 1) Pemanfaatan pendapatan asli daerah secara proporsional pada program prioritas dan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
 - 2) Peningkatan upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dan peningkatan kerjasama dengan melibatkan organisasi masyarakat atau organisasi non pemerintah.
 - 3) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparat pengelolan pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan dan penegakan hukum.



4) Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang potensial.

3.2.2.1.2 Kebijakan Pendanaan Melalui Transfer Ke Daerah

Transfer ke Daerah merupakan instrumen utama desentralisasi fiskal dalam rangka mendorong pencapaian pembangunan nasional. Berdasarkan amanat UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer ke Daerah terdiri atas: (a) Dana Perimbangan; (b) Dana Otonomi Khusus (Otsus); dan (c) Dana Transfer Lainnya.

Kebijakan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah pada tahun 2016 akan difokuskan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama seiring dengan penerapan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Tujuannya adalah mewujudkan kesinambungan pembangunan di daerah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional maupun prioritas daerah. Selain itu, kebijakan Dana Transfer ke Daerah juga diarahkan untuk sekaligus mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi. Hal ini terkait dengan peningkatan local taxing power guna memperbesar sumber pendapatan daerah, terutama pasca dilaksanakannya devolusi Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perkotaan dan Perdesaan (PBB) sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Arah kebijakan Transfer ke Daerah dalam RAPBN tahun 2016 adalah:

- a. Peningkatan alokasi anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa menjadi lebih besar dari anggaran kementerian negara dan lembaga (belanja K/L)
- b. Reformulasi alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (sebagai equalization grant);
- c. Reformulasi dan penguatan DAK untuk mendukung Nawa Cita dan Pencapaian Prioritas Nasional dengan :
 - 1) Meningkatkan besaran alokasi DAK untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah guna mempercepat pembangunan/penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana publik.
 - 2) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan DAK melalui penyesuaian dana pendamping dengan kemampuan keuangan daerah, percepatan penetapan petunjuk teknis, serta perbaikan pola penyaluran, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.
 - a. Reformulasi DID untuk memberikan penghargaan yang lebih besar kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian dan kesejahteraan daerah.



b. Peningkatan alokasi dana Desa minimal 6 persen dari dan di luar transfer ke Daerah sesuai dengan Road Map Dana Desa tahun 2015-2019, guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ketiga komponen Dana Perimbangan tersebut bersifat saling terkait dan merupakan suatu kesatuan utuh sebagai pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya saling mengisi dan melengkapi.

Perhitungan alokasi Dana Perimbangan dilakukan dengan menggunakan formula, kriteria, dan persentase tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DBH ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal (vertical fiscal imbalance) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Jumlah alokasi DAU sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri neto yang ditetapkan dalam APBN sesuai dengan paraturan perundang-undangan. Pada tahun 2016 ini ditetapkan sebesar 27,7 persen dari produk Domestik Nasional Bruto. Sasaran yang ingin dicapai DAU pada tahun 2017 adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- 1. Alokasi DAU yang dihitung berdasarkan AD dihitung atas dasar jumlah gaji PNSD, yang mencakup gaji pokok dan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian PNS serta mempertimbangkan kebijakan terkait penggajian dan kebijakan terkait pengangkatan CPNSD;
- 2. Alokasi DAU yang dihitung berdasarkan CF merupakan komponen ekualisasi kemampuan keuangan antar daerah, karena CF mencerminkan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Kebutuhan fiskal dalam suatu daerah merupakan kebutuhan



pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur berdasarkan perkalian antara belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, Indeks PDRB per kapita.

Berdasarkan formulasi dan data dasar yang dipergunakan untuk perhitungan DAU, agar DAU dapat lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, dan sekaligus mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah (horizontal imbalance), kebijakan DAU tahun 2017 diarahkan untuk:

- 1. Menerapkan formula DAU secara konsisten melalui pembobotan AD, komponen kebutuhan fiskal, dan komponen kapasitas fiskal;
- 2. Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan daerah (sebagai equalization grant) yang ditunjukan oleh Indeks Williamsom yang paling optimal, melalui pembatasan porsi alokasi dasar, dan mengevaluasi bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dengan cara mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah;
- 3. Menetapkan besaran DAU yang bersifat final (tidak mengalami perubahan), dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan PDN Neto bertambah/berkurang.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Pada tahun 2017, kebijakan Dana Transfer Khusus Daerah (DAK) diarahkan untuk:

- 1. Mendukung implementasi Nawa Cita, khususnya cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI, cita kelima : meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, cita keenam : meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan cita ketujuh : kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik;
- 2. Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah;
- 3. Mendukung pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara dan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara, dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan kehutanan.
- 4. Mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional;
- 5. Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan;



- 6. Mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L, terutama anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang mendanai urusan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK.
- 7. Merelokasi dana transfer lainnya, yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Guru PNSD, dana Tambahan penghasilan Guru PNSD (Tamsil) dan Dana Proyek Pembangunan Daerah dan Desentralisasi (P2D2) ke Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Agar alokasi DAK Fisik sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional, maka pengalokasiannya dilakukan dengan mekanisme bottom-up, yakni daerah menyampaikan usulan (proposal based) sebagai dasar untuk penentuan alokasi. Hal ini berbeda dengan pengalokasiaan DAK pada tahuntahun sebelumnya yang lebih banyak bersifat top-down, yakni sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan 3 kriteria, yaitu kriteria umum yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah, kriteria khusus yang terkait dengan kewilayahan, dan kriteria teknis yang terkait dengan data kebutuhan teknis daerah.

Pengalokasian DAK Fisik pada tahun 2016 dilaksanakan dengan mekanisme pengusulan kegiatan dan kebutuhan pendanaan dari daerah kepada Pemerintah Pusat. Ada 3 jenis DAK Fisik yang mekanisme pengalokasiannya melalui proposal based, yaitu DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah, dan DAK Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

- 1. Penetapan alokasi DAK reguler tersebut disesuaikan dengan sasaran prioritas dari 3 dimensi pembangunan yang dituangkan dalam RKP, yaitu:
 - a) Dimensi Pembangunan Manusia meliputi: (1) bidang pendidikan; (2) bidang kesehatan dan keluarga berencana; dan (3) bidang infrastruktur perumahan, pemukiman, air minum dan sanitasi,
 - b) Dimensi Sektor Unggulan mencakup: (1) bidang kedaulatan pangan, termasuk pertanian dan irigasi; (2) bidang energi skala kecil; (3) bidang kelautan dan perikanan; dan (4) bidang lingkungan hidup dan kehutanan,
 - c) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan mencakup: (1) transportasi, termasuk jalan dan moda transportasi lainnya; (2) sarana perdagangan, industri kecil dan menengah, dan pariwisata; serta (3) prasarana pemerintahan daerah.
- 2. Penetapan alokasi DAK Infrastruktur Publik Daerah dialokasikan kepada Kabupaten/Kota untuk membantu mempercepat penyediaan infrastruktur publik secara memadai agar dapat mendukung konektivitas transportasi, perbaikan pemukiman, peningkatan produksi pertanian, serta pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Mengingat kondisi dan kebutuhan daerah relatif berbeda, maka daerah diberikan diskresi untuk



menentukan bidang infrastuktur tertentu yang akan diprioritaskan untuk didanai dari DAK Infrastruktur Publik Daerah. Namun, kegiatan yang didanai dari DAK Infrastruktur Publik Daerah tersebut harus merupakan kegiatan yang sudah direncanakan dalam RKPD, bukan kegiatan yang akan didanai dari DAK Reguler dan Belanja APBD murni, dan diharapkan bisa mendukung prioritas nasional. Bidang infrastruktur yang perlu didanai daerah dari DAK Infrastruktur Publik Daerah, antara lain meliputi jalan/jembatan, jaringan irigasi, infrastruktur perumahan pemukiman, air minum dan sanitasi, infrastruktur perhubungan, serta infrastruktur kelautan dan perikanan.

3. Penetapan alokasi DAK Afirmasi merupakan tambahan DAK yang dialokasikan khusus kepada daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal, perbatasan dengan negara lain, dan kepulauan. Mengingat kondisi beberapa jenis infrastruktur dasar daerah-daerah tersebut masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain, maka DAK Afirmasi diarahkan dapat digunakan oleh daerah tersebut untuk menambah pendanaan bagi pembangunan/penyediaan infrastruktur tertentu. Jenis infrastruktur yang didanai meliputi (1) infrastruktur air minum dan sanitasi pada Bidang Infrastruktur Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi; (2) infrastruktur irigasi pada Bidang Kedaulatan Pangan; dan (3) infrastruktur jalan dan transportasi perdesaan pada bidang Transportasi. Arah kebijakan dan sasaran bidang DAK Afirmasi tahun 2016 sama dan menjadi satu kesatuan dengan arah kebijakan dan sasaran bidang DAK Reguler tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik, pada dasarnya merupakan perubahan nomenklatur dari Dana Transfer Lainnya pada postur Transfer ke Daerah tahun 2015, yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2016, DAK Nonfisik terdiri atas dana Operasional (BOS), Bantuan Sekolah dana Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2), dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), serta dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan.

d) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sesuai dengan Rancangan Awal APBN Tahun 2016, maka penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016.



- b. Penganggaran pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2015.
- c. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam kontek daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk akselerasi pencapaian visi Kabupaten Padang Pariaman.

Pada Tahun 2016 merupakan pertama pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021, sedangkan RPJMD tersebut belum tersedia, oleh sebab itu belanja daerah masih dapat mengacu pada pencapaian prioritas pembangunan daerah harus diarahkan untuk pencapaian target kinerja yang belum tercapai dan menyesuaikan dengan arah kebijakan belanja pada Pemerintah Pusat.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

4

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk pelayanan publik, kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi daerah, maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk selanjutnya arah kebijakan belanja daerah akan ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran.

- 1. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
- 2. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam kontek daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 3. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk akselerasi pencapaian visi Kabupaten Padang Pariaman.
- 4. Pada Tahun 2016 merupakan pertama pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021, sedangkan RPJMD tersebut belum tersedia, oleh sebab itu belanja daerah masih dapat mengacu pada pencapaian prioritas pembangunan daerah harus diarahkan untuk pencapaian target kinerja yang belum tercapai dan menyesuaikan dengan arah kebijakan belanja pada Pemerintah Pusat.
- 5. Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Padarg Pariaman Tahun 2010-2015, target capaian Kinerja Tahun 2015 dan isu Strategis Daerah Tahun 2016.

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014 s.d 2018

		PALFON ANGGARAN						
NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2014	REALISASI TAHUN 2015	BELANJA TAHUN 2016	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2017	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2018		
1	2	3	4	5	6	7		
Ш	BELANJA DAERAH	1,107,302,525,907. 59	1,208,741,302,726.06	1,361,586,926,339.00	1,579,360,479,291.54	1,878,729,493,568.7 6		
II.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	721,656,515,121.59	800,876,523,762.06	895,962,233,589.00	1,061,899,801,305.43	1,303,662,154,076.0 7		
11.1.1	Belanja Pegawai	683,527,490,121.59	739,353,360,327.06	768,841,060,395.30	844,078,920,258.71	926,679,466,441.07		
II.1.2	Belanja Hibah	5,520,000,000.00	18,490,000,000.00	3,974,500,000.00	4,844,478,730.93	5,904,887,199.50		
II.1.3	Belanja Bantuan Sosial	8,852,989,000.00	7,421,980,512.00	1,793,910,512.00	1,338,081,523.71	998,077,748.08		
11.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1,055,016,000.00	3,407,125,900.00	4,053,145,000.00	6,014,107,192.56	8,923,807,394.90		
II.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	20,701,020,000.00	31,204,057,023.00	116,299,617,681.70	204,704,437,757.49	360,309,927,692.94		
II.1.6	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	919,775,842.03	845,987,599.58		
11.2	BELANJA LANGSUNG	385,646,010,786.00	407,864,778,964.00	465,624,692,750.00	517,460,677,986.11	575,067,339,492.69		

Sumber : Data Olahan Bappeda 2016



3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana Cadangan.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 dinyatakan bahwa:

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- 4. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran Berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
- 5. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan Obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 6. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian Penerusan Pinjaman



dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Sebagai upaya mengefisienkan pengeluaran pembiayaan, Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

- 1. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan Modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
 - Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- 3. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
- 4. Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5. Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan,



perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM.

Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- 6. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 7. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Kebijakan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2016 bersaldo nol.
- 2. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan



yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.





BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

RKPD Tahun 2017 merupakan pelaksanaan RPJMD tahun 2016 - 2021 pada tahun ke 2, maka prioritas dan sasaran Pembangunan tahun 2017 berdasarkan pencapaian misi, tujuan dan sasaran masa RPJMD tahun 2016-2021 serta berdasarkan Analisis terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun 2015. Adapun keterkaitan misi, tujuan dan sasaran tersebut disajikan dalam bentuk tabulasi sebagaimana tabel-tabel berikut.

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi I, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

Visi : Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera."								
MISI I		TUJUAN		SASARAN				
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana peribadatan	1	Meningkatnya sarana peribadatan yang representative				
berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	2	Mengaktifkan peran lembaga pendidikan agama islam di setiap Nagari	1	Terwujudnya peran lembaga pendidikan islam yang aktif di Nagari (Meningkatnya peran lembaga)				
	3	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang lebih baik sesuai	1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat				
		dengan falsafah adat Minangkabau " Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"	2	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan infak, zakat, dan sedekah				
	4	Mengoptimalkan peran lembaga adat disetiap nagari	1	Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia pemangku adat				
			2	Berkurangnya Penyakit Masyarakat (Pekat)				



Tabel 4.2 Keterkaitan Visi, Misi II, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011-2015

Visi : Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera."

dan Sejahtera."								
MISI II		TUJUAN		SASARAN				
Meningkatkan 1 perekonomian Kabupaten Padang		Meningkatkan produksi dan produktifitas ekonomi (meningkatkan produksi pertanian dan	1	Meningkatnya produksi dan produktivitas pada sektor pertanian dan peternakan				
Pariaman melalui daya dukung sektor		peternakan)	2	Meningkatnya agribisnis yang berdaya saing				
primer dan jasa	2	Meningkatkan ketahanan pangan	1	Meningkatnya ketersediaan dan keragaman dan konsumsi pangan				
	3	Meningkatkan kesejahteraan petani	1	Meningkatnya pendapatan petani				
	4	Meningkatnya kesejahteraan petani pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir	1	Meningkatnya pendapatan petani pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir				
	5	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya pendapatan masyarakat				
	6	Meningkatkan peluang investasi daerah	1	Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi				

Tabel 4.3 Keterkaitan Visi, Misi III, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011-2015

Visi : Terwujudnya	Kal	oupaten Padang Pariaman dan Sejahtera."	yaı	ng Baru, Religius, Cerdas
MISI III TUJUAN				SASARAN
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan kesehatan, sarana prasarana dan kualitas tenaga	1	Meningkatnya SDM yang Cerdas, Berkarakter dan Terampil (Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang cerdas, terampil dan berkarakter)	1 2	Meningkatnya tingkat pendidikan Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga
pendidik	2	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1 2	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima, dan terjangkau bagi masyarakat Meningkatnya umur harapan hidup dan berkurangnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan
	3	Memperlambat Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Meningkatnya kualitas keluarga berencana
	4	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	1 2	Pengarusutamaan Gender dan hak anak Meningkatnya peran perempuan dalam ranah publik

Tabel 4.4 Keterkaitan Visi, Misi IV, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011-2015

Visi : Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera."						
MISI IV		TUJUAN		SASARAN		
Meningkatkan Potensi daya saing daerah melalui		Mewujudkan Padang Pariaman sebagai daerah tujuan wisata		Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara		
pengembangan Pariwisata, Tranportasi, Perdagangan, Penataan Ruang			2	Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan pariwisata		
dan Pengelolaan Lingkungan	2	Meningkatkan pelayanan perhubungan transportasi	1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa transportasi		
	3	Mengembangkan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri	1	Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah		
	4	Meningkatkan pengembangan wilayah	1	Meningkatkan pelayanan dasar pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan		
	5	Meningkatkan kualitas dan menata kelolaan lingkungan hidup (meningkatkan kelestarian lingkungan hidup)	1	Mewujudkan ruang yang berkelanjutan		



Tabel 4.5 Keterkaitan Visi, Misi V, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011-2015

Visi: "Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera."

dan Sejahtera."								
MISI V		TUJUAN		SASARAN				
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1	Menurunkan tingkat kemiskinan dan permasalahan sosial	1	Menurunnya jumlah penduduk miskin				
melalui pengentasan kemiskinan			2	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial				
	2	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja (mengurangi tingkat pengangguran)	1	Meningkatkan kesempatan kerja				
			2	Mengurangi angka pengangguran pada usia produktif dan angkatan kerja				
			3	Meningkatkan kualitas angkatan kerja				
			4	Memperbaiki iklim ketenagakerjaan				

Tabel 4.6 Keterkaitan Visi, Misi VI, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011-2015

Visi: "Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman Yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera."

dan Sejahtera."								
MISI VI		TUJUAN		SASARAN				
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih,	1	Terwujudnya (mewujudkan) tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel	1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih				
Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan			2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan				
Pelayanan Publik			3	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dan dokumentasi daerah				
			4	Meningkatnya Opini BPK terhadap laporan keuangan				
	2	Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan	1	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat				
			2	Meningkatkan fungsi lembaga perwakilan daerah				

Tabel 4.7 Keterkaitan Visi, Misi VII, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011-2015

Visi: "Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas
dan Sejahtera."

dan Sejantera.							
MISI VII		TUJU	AN		SASARAN		
Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.	1	Penurunan resiko bencan	terjadinya a	2 3	Meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan Pemerintah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana Meningkatnya penanganan tanggap darurat Optimalisasi pemulihan kawasan pasca bencana		

4.2 Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2017 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.



Tabel 4.6 Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas Pembangunan RKPD
1	Peningkatan kualitas sarana prasarana peribadatan dan peranan lembaga pendidikan agama.	Peningkatan pengamalan kehidupan beragama dan berbudaya
2	Peningkatan mental dan karakter masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais beradat dan berbudaya	
3	Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta perkembangan agribisnis	Peningkatan pembangunan pertanian dan perikanan berbasis kawasan dan komoditi unggulan
4	Peningkatan produksi perkebunan, pengolahan kakao dan kelapa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di nagari	
5	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan serta SDM tenaga pendidik.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi
6	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	
7	Pengembangan potensi pariwisata unggulan melalui pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Peningkatan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi berwawasan lingkungan
8	Pengembangan sektor jasa, industri, perdagangan, UKM, koperasi dan investasi	Peningkatan iklim investasi dan usaha serta pengembangan pariwisata daerah secara terpadu
		Peningkatan pembangunan ekonomi pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi
9	Pengembangan pelayanan dasar perumahan, pemukiman dan penataan ruang	
10	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Penurunan tingkat kemiskinan secara terintegrasi
11	Pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
12	Pengurangan resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.	Peningkatan pembangunan berbasis mitigasi bencana



Agenda pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mendorong proses pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, strategi pembangunan daerah yang telah dirumuskan terdahulu serta agenda pembangunan nasional, Provinsi Sumatera Barat, maka agenda pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk periode 2010-2015 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama

Peningkatan kualitas kehidupan beragama merupakan landasan utama untuk dapat mewujudkan proses pembangunan daerah yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat umum. Melalui agenda pembangunan daerah ini diharapkan akan dapat diwujudkan keselarasan antara ajaran agama dan budaya daerah dengan tingkah laku dan kebiasaan hidup masyarakat setempat sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera dan agamais. Prioritas pembangunan Padang Pariaman lima tahun kedepan. Wujud dari pelaksanaan agenda ini melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana peribadatan, menjadikan mesjid dan surau sebagai pusat pembinaan aqidah dan ekonomi umat, peningkatan peranan kelembagaan pendidikan agama di nagari. Peningkatan jumlah dana yang bersumber dari Zakat, Infak dan Sedekah. Peningkatan kualitas tokoh agama dan adat sebagai penggerak utama pembangunan mental dan spritual anak nagari, meningkatkan peran institusi adat pada tingkat nagari sebagai basis pengembangan nilai-nilai filosofis budaya minagkabau, membangun sinergitas antara unsur pimpinan pemerintahan nagari dengan unsur pimpinan institusi adat dan institusi sosial ekonomi nagari.

2. Mewujudkan perekonomian wilayah yang kokoh melalui sistem agrobisnis yang berbasiskan nagari

Dalam rangka mewujudkan perekonomian wilayah yang kokoh melalui sistem agrobisnis yang berbasiskan nagari bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu kegiatan yang bersifat strategis dalam mendorong proses pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman melalui peningkatan produksi pertanian rakyat yang berbasis ilmu pengetahuan, menciptakan kekuatan



kelembagaan sentra perkebunan kakao sebagai pusat pertumbuhan di nagari dan pemantapan subsektor perkebunan sebagai potensi ekonomi.

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat masih tetap menjadi utama prioritas utama pembangunan daerah. Karena itu agenda untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini merupakan salah satu kegiatan yang bersifat strategis dalam mendorong proses pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Termasuk dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah disemua sektor, pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan kemampuan teknologi industri, pengembangan sentra-sentra industri potensial dan peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan serta SDM tenaga pendidik

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan landasan utama bagi terwujudnya proses pembangunan yang baik, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Termasuk dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan kualitas pendidikan yang mencakup pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, peningkatan derajat kesehatan tinggi dan pelayanan kesehatan merata, perbaikan gizi, pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penerapan serta peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.

4. Peningkatan PAD, akses transportasi dan perbaikan pelayanan

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat masih tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Karena itu agenda untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini merupakan salah satu kegiatan yang bersifat strategis dalam mendorong proses pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Termasuk dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah disemua sektor, pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan kemampuan teknologi industri, pengembangan sentra-sentra industri potensial dan peningkatan promosi dan kerjasama investasi.



5. Peningkatan keahlian dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran

Pembangunan yang baik tidak hanya dalam bentuk peningkatan ekonomi dan kemakmuran masyarakatnya tetapi juga dalam bentuk terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang baik ramah lingkungan. Oleh karena itu, agenda pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan merupakan unsur yang sangat penting dan strategi untuk meningkatkan proses pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman, termasuk dalam agenda pembangunan ini dan menjadi fokus utama adalah pada perbaikan kualitas Rencana Tata-Ruang Wilayah (RTRW), pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penangananan mitigasi bencana.

6. Peningkatan kompetensi aparatur dan perbaikan pelayanan publik

Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur dan perbaikan pelayanan publik, maka perlu dilakukan peningkatan profesionalisme aparatur pemerintahan yang bersikap dan berperilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme, responsif, transparan, akuntabel serta beretika, dan berwibawa. meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan, meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik serta meningkatkan perencanaan partisipatisf dalam penyelenggaraan pembangunan.

7. Meningkatkan sarana prasarana dan pemantapan kesadaran masyarakat terhadap bencana

Dalam rangka meningkatkan sarana prasarana dan pemantapan kesadaran masyarakat terhadap bencana dilakukan melalui sosialisasi tanggap dan siaga bencana, pemantapan tenaga dan peralatan siaga bencana, pemantapan sistem mitigasi bencana dan pengendalian bangunan dan infrastruktur ramah bencana.

Berdasarkan agenda pembangunan tersebut dan memperhatikan; (a) Permasalahan yang dihadapi dan perlu mendapat penanganan yang serius oleh Pemerintah Daerah; (b) Isu strategis perencanaan pembangunan nasional dan daerah; (c) Prioritas kebutuhan masyarakat yang berpengaruh langsung



terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan, maka Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1.2.1 Prioritas Peningkatan pengamalan kehidupan beragama dan berbudaya

1. Urusan Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Prioritas Peningkatan pengamalan kehidupan beragama diarahkan kepada implementasi prinsip-prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari diantaranya melalui: (1) Peningkatan kualitas sarana prasarana peribadatan dan peranan lembaga pendidikan agama, (2) Peningkatan mental dan karakter masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya. Dengan pengamalan ajaran agama yang baik diharapkan akan terwujud: 1) Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai, 2) Terwujudnya pribadi masyarakat yang beriman dan berakhlak mulia, 3) Tercerminnya nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi, 4) Menurunkan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat, 5) Pewarisan nila-nilai kearifan adat Minangkabau, dan 6) Terwujudnya optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga keagamaan.

Program-program pembangunan pada urusan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
- 2. Program Pengembangan Lembaga Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pedidikan Keagamaan

2. Urusan Kebudayaan

Prioritas urusan kebudayaan diarahkan pada: (1) Pengembangan dan pelestarian potensi budaya lokal, (2) Mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau yang tidak sesuai dengan budaya lokal, dan (3) Memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan kesenian lokal.

Program-program pembangunan pada urusan kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Program pengembangan nilai budaya

- 2. Program pengelolaan kekayaan budaya
- 3. Program pengelolaan keragaman budaya

Tabel 4.7 Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas Peningkatan Pengamalan Kehidupan Beragama dan Berbudaya

				KINERJA						
NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET 2017	SKPD P.JAWAB					
1	2	3	4	5	6					
	i 1 : Mewujudkan Ko				yang Berkualitas					
Bero	lasarkan Falsafah Adat	Basandi Sya	rak, Syarak	Basandi Kita	ıbullah"					
Prio	Prioritas 1 : Peningkatan Pengamalan Kehidupan Beragama dan Berbudaya									
SEK	RETARIAT DAERAH									
1	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan jenazah	Orang	60	148	Bag. Kesra					
2	Terfasilitasinya kegiatan pesantren dan safari Ramadhan	Kecamatan	17	17	Bag. Kesra					
3	Terlaksananya pembinaan majelis taklim	org	180	180 Orang	Bag. Kesra					
4	Terbina dan terfasilitasinya LDS berprestasi Tk. Kabupaten dan Provinsi		Masuk Tk Provinsi	1 LDS	Bag. Kesra					
5	Jumlah Jamaah Haji yang terfasilitasi keberangkatan dan pemulangan	org	187	190	Bag. Kesra					
6	Terselenggaranya kegiatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Sholat Idul Fitri	Kegiatan Hari Besar Islam	5	5	Bag. Kesra					
7	Jumlah Qori Qoriah yang dibina	%	50	60	Bag. Kesra					
8	Jumlah Dai Muda yang mengikuti pelatihan	orang		220	Bag. Kesra					
9	Terlahirnya Fatwa- Fatwa MUI	Jenis		20	Bag. Kesra					
KEB	BUDAYAAN			<u>, </u>						
1	Jumlah budaya tak benda				Disporabudpar					
а	Terlaksananya sosialisasi/pelatihan Cagar Budaya dan									



	Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)				
b	Terlaksananya Budaya Buru Babi				
С	Terlaksananya even Pacu Kuda				
2	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar yang dilestarikan		7	15	Disporabudpar
а	Teriventarisasinya nilai kekayaan budaya				
b	Pemeliharaan benda cagar budaya				
С	Terlaksananya pembuatan rekaman Data Cagar Budaya dan Budaya Tak Benda (WBTB)				
3	Tersusunnya Perda Cagar Budaya Padang Pariaman		1		Disporab <mark>u</mark> dpar
а	Jumlah Penyelengaraan	Festival	1	1	
	festival seni dan budaya				
b	Jumlah sanggar seni dan budaya	Buah	10	25	
С	Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah - Ceremonial			3/	
	- Penampilan kesenian di objek wisata dan BIM			1	
	- Festival dan Pekan Budaya Sumbar		1/1	4	
	- Promosi kesenian ke luar daerah				
	- Minangkabau Fashion Week				
	- Minangkabau Fashion Carnaval				
	- Festival Randai Tradisi				
	- Festival Indang Tradisi				
	- Pelatihan Instruktur				
d	tari dan musik Tersedianya sarana prasarana kesenian				
e	Tersedianya pakaian daerah				



1.2.2 Prioritas Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan

1. Urusan Pangan

Prioritas pada urusan ketahanan pangan diarahkan pada: (1) Peningkatan pembinaan sumber daya manusia pertanian dan peternakan; (2) Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna; (3) Peningkatan ketersediaan pangan utama; dan (4) Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang.

Program-program pembangunan pada urusan pangan adalah sebagai berikut:

- 1. Program diversifikasi pangan
- 2. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- 3. Program peningkatan pensejahteraan petani
- 4. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

2. Urusan Pertanian

Prioritas pada urusan pertanian diarahkan pada: Mewujudkan perekonomian wilayah yang kokoh melalui sistem agrobisnis yang berbasiskan nagari bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu kegiatan yang bersifat strategis dalam mendorong proses pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman melalui peningkatan produksi pertanian rakyat yang berbasis ilmu pengetahuan, menciptakan kekuatan kelembagaan sentra perkebunan kakao sebagai pusat pertumbuhan di nagari dan pemantapan subsektor perkebunan sebagai potensi ekonomi.

Program-program pembangunan pada urusan pertanian adalah sebagai berikut:

- 1. Program peningkatan kesejahteraan petani
- 2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- 3. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- 4. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- 5. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak



- 6. Program peningkatan produksi hasil peternakan
- 7. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
- 8. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

3. Urusan Kelautan dan Perikanan

Prioritas pada urusan kelautan dan perikanan diarahkan pada: (1) Peningkatan sentra produksi komoditi perikanan; (2) Penanganan pasca panen komoditi unggulan perikanan; (3) Peningkatan penerapan teknologi dalam bidang perikanan serta (4) Revitalisasi sistem kelembagaan perikanan.

Program-program pembangunan pada urusan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- 2. Program pemberdayaan masyarakat <mark>dalam pe</mark>nga<mark>was</mark>an dan pengendalian sumber daya kelautan
- 3. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut
- 4. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
- 5. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
- 6. Program pengembangan budidaya perikanan
- 7. Program pengembangan perikanan tangkap
- 8. Program pengembangan sistim penyuluhan perikanan
- 9. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- 10. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
- 11. Program dak bidang kelautan dan perikanan
- 12. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- 13. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
- 14.Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasankawasan konservasi laut dan hutan
- 15. Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Tabel 4.8 Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan

INDIKATOR KIN				IKATOR KINE	RJA		
NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET 2017	SKPD P.JAWAB		
1	2	3	4	5	6		
MISI		konomian F	Kabupaten Pada	ng Pariaman	melalui Daya		
	Dukung Sektor Primer dan Jasa						
	ritas 2 : Peningkatan Pemb	angunan P	ertanian dan P	erikanan Ber	basis Kawasan		
PANO	Komoditi Unggulan						
	7	Γ		T			
1	Meningkatkan ketahanan				BP3KKP		
	pangan melalui konsumsi						
	dan keamanan pangan						
	segar, distribusi dan						
	pemberdayaan ditingkat masyarakat serta						
	koordinasinya kebijakan						
	ketahanan pangan						
	Teratasinya masyarakat			60 KK			
	rawan pangan						
	Stabilisasi harga bahan			CV ≤ 3			
	pangan pokok (beras) di						
	tingkat konsumen						
	Stabilisasi harga bahan			≥ HPP			
	pangan pokok (gabah dan						
	beras) di tingkat produsen						
2	Meningkatnya sertifikasi	Sertifikat	2	3			
	keamanan pangan segar						
	(sertifikat prima)	%		76			
	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	70		76			
	masyarakat						
3	Meningkatnya ketahanan						
	pangan sampai pada						
	tingkat rumah tangga						
	sehingga terbebas dari						
	kondisi kekurangan energi						
	dan protein						
	Mempertahankan						
	ketersediaan minimal						
	terhadap energi dan						
	protein a. Ketersediaan Energi	Kkal/kap	2.000	2.400			
	a. Reteroculaan Energi	/hari	2.000	2.400			
	b. Ketersediaan Protein	gram/	52	55			
	5. Heterocalaan Hotelii	kap /hari	32				
	Meningkatnya skor Pola	1- /		85			
	Pangan Harapan (PPH)						
	rangan narapan (FFN)						



	Konsumsi pangan yang				
	Beragam, Bergizi,				
	Seimbang dan Aman				
	(B2SA)				
	a. Konsumsi Energi	Kkal/kap		2.000	
		/hari			
	b. Konsumsi Protein	gram/		52	
		kap /hari			
4	Meningkatya kualitas /	orang		20	BP3KKP
	kapasitas SDM Penyuluh				
5	Meningkatnya kelas	Kelompok		100	BP3KKP
	kelompok tani				
6	Meningkatkan penerapan	Kebun		16	BP3KKP
	teknologi tepat guna oleh	Contoh		10	21 01111
	kelompok tani	Conton			
7	Jumlah ketersediaan	Ton	151.060,37	158.707,80	BP3KKP&
•	pangan pokok (beras)	1011	101.000,07	100.707,00	Distannakhut
PER'	TANIAN				Distailliamiat
1	Persentase	%	1.1	1.20 %	Distanakhut
1	keltan/gapoktan yang	70	1.1	1.20 /0	Distallakilut
	memperoreh			100	
	bantuan/diberdayakan			-dir	
2	Jumlah kelompok tani	Kelompok	5	5 Keltan	Distanakhut
4	pengolah pangan lokal	Tani	3	3 Keitaii	Distallakilut
	yang dibina	Tan			1 1
3		Paket	1	2 malrat	Distanakhut
3	Peningkatan penerapan teknologi	Paket	1	3 paket	Distallakilut
					41
1	pertanian/perkebunan				Distanakhut
4	Peningkatan produksi				Distallakilut
-	tanaman pangan, hortukultura dan				
	perkebunan	Ton GKG	070 107	0.500/	
	- Peningkatan produksi	Ion GKG	278,127	2.50%	
	padi - Peningkatan produksi	T	00.725	F 000/	
	<u> </u>	Ton	29,735	5.00%	
	jagung	T	0.000	2.000/	
	- Peningkatan produksi	Ton	8,298	3.00%	
	kakao	Tr	25 105	0.450/	
	- Peningkatan produksi	Ton	35,107	3.45%	
	kelapa	m.	410	0.500/	
	- Peningkatan produksi	Ton	413	3.50%	
	jambu biji	m	6.050	E 0001	
	- Peningkatan produksi	Ton	6,973	5.00%	
	papaya				
	- Peningkatan produksi	Ton	19,067	3.00%	
	pisang				
	- Peningkatan produksi	_	4,043	2.00 %	
	manggis	Ton			
5	Persentase penanganan	%	96	96.50	Distanakhut
	produk hewan yang ASUH				
	dan penanggulangan				
	penyakit zoonosis, non				
	zoonosis dan gangguan				
	reproduksi				



6	Peningkatan populasi				Distanakhut
0	ternak (sapi, Kambing,				Distanakhut
	Kerbau, Ayam)				
	- Peningkatan populasi	ekor	37,415	3.00	
	sapi potong	CKOI	37,413	3.00	
	- Peningkatan populasi	ekor	52	3.00	
	sapi perah	ekoi	32	3.00	
		-1	12 442	1.05	
	- Peningkatan populasi kerbau	ekor	13,443	1.25	
		-1	020.045	0.95	
	- Peningkatan populasi	ekor	932,045	0.95	
	ayam buras - Peningkatan populasi	ekor	1,306,997	4.00	
	ayam ras petelur	CKOI	1,300,997	4.00	
	- Peningkatan populasi	ekor	5,259,214	2.50	
	ayam ras pedaging	ekoi	5,259,214	2.50	
	- Peningkatan populasi itik		150 262	3.50	
7		IZ alta sa	150,363		Distanakhut
′	Jumlah kelompok tani yang melakukan	Keltan	1	1	Distanaknut
	pengolahan produk				
	peternakan				
8	Meningkatnya promosi		91,000	3 Event	Distannak
0	atas hasil produksi		91,000	3 Event	Bag. Ekbang
	pertanian/perkebunan				Dag. Ekbang
	daerah				
KEL.	AUTAN DAN PERIKANAN			4.87/	S. Aller
1	Jumlah kelompok		0	8	DKP
-	Masyarakat Pesisir		ŭ	J	2111
	(Pokmaswas) yang dibina				
2	Jumlah kelompok		7	17	DKP
	masyarakat pengawas				
	yang terbina				
3	Jumlah operasi	Kali/th	2	6	DKP
	pengawasan	,			
4	Jumlah kegiatan	Kali	2	5	DKP
	sosialisasi Siswasmas				
5	Jumlah kegiatan	Kali	2	10	DKP
	sosialisasi mitigasi yang				
	dilaksanakan				
6	Jumlah informasi iklim		0	120	DKP
	yang diberikan kepada				
	nelayan				
7	Persentase kenaikan	%	10	25	DKP
	produksi perikanan per				
	tahun				
8	Luas kolam budidaya	На	503	525	DKP
9	Jumlah unit pembenihan	Unit	245	442	DKP
	rakyat				
10	Berkembangnya kawasan	%	10	25	DKP
	Minapolitan				
11	Selesainya pelabuhan	%	25	40	DKP
	perikanan representatif				
12	Persentase kenaikan	%	5	5	DKP
	produksi perikanan per				
	tahun				



13	Persentase kelompok yang dibina	%	10	25	DKP
14	Rasio jumlah penyuluh perikanan dengan jumlah kecamatan		1:2	1:1,5	DKP
15	Terwujudnya konsumsi makan ikan Padang Pariaman sebesar	kg/kap/ th	29.52	33	DKP
16	Unit pengolahan ikan mandiri	Unit	171	176	DKP
17	Tersedianya pasar ikan higienis	Unit	6	8	DKP
18	Terwujudnya kawasan budidaya payau	На	5	9	DKP
19	Terwujudnya kawasan perbenihan ikan gurami	Kecamat an	1	3	DKP
20	Beroperasionalnya PPI Pasir Baru	%	25	30	DKP
21	Beroperasionalnya Balai Benih Ikan	Unit	2	25%	DKP
22	Pertambahan jumlah sarana dan prasarana perikanan	%	10	25	DKP
23	Terwujudnya kawasan konservasi pesisir dan laut daerah	На	684	684	DKP
24	Terwujudnya kawasan konservasi lubuk larangan	Lokasi	79	99	Kantor LH DKP
25	Jumlah restocking Benih Ikan	Ekor	200.000	200.000	Kantor LH DKP
26	Terwujudnya kawasan eko wisata pesisir dan laut	Lokasi	0	1	Kantor LH DKP
27	Ekosistem pesisir yang terkelola	На	0	684	Kantor LH DKP

1.2.3 Prioritas Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi

1. Urusan Pendidikan

Prioritas pada urusan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan serta SDM tenaga pendidik.

Program-program pembangunan pada pada urusan pendidikan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1. Program pendidikan anak usia dini
- 2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
- 3. Program pendidikan non formal



- 4. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- 5. Program manajemen pelayanan pendidikan
- 6. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa
- 7. Program peningkatan mutu tenaga pendidik dan mutu pendidikan
- 8. Program penyelenggaraan pendidikan

2. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Prioritas pada urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan pada: (1) Pembinaan atlit dan pelaku olahraga; (2) Meningkatnya persentase pencapaian prestasi olahraga; (3) Peningkatan sarana dan prasarana olah raga; (4) Penguatan organisasi dan manajemen pengelolaan olahraga; (5) Fasilitasi penguatan lembaga kepemudaan; (6) Fasilitasi dan partisipasi event-event olahraga; (7) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan; (8) Pengembangan jiwa kepeloporan dan kemandirian pemuda.

Program-program pembangunan pad<mark>a pada urusan kepemudaa</mark>n dan olahraga yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program peningkatan peran serta kepemudaaan
- 2. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
- 3. Program peningkatan peran serta kepemudaan
- 4. Program pembinaan organisasi kepemudaan
- 5. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
- 6. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
- 7. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

3. Urusan Kesehatan

Prioritas pada urusan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Program-program pembangunan pada pada urusan kesehatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1. Program obat dan pembekalan kesehatan
- 2. Program upaya kesehatan masyarakat
- 3. Program pengawasan obat dan makanan
- 4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- 5. Perbaikan gizi masyarakat
- 6. Program pengembangan lingkungan sehat



- 7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit (menular/tidak menular
- 8. Program standarisasi pelayanan kesehatan
- 9. Program pelayanan penduduk miskin
- 10.Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pukesmas/puskesmas pembantu
- 11. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- 12. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- 13. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- 14. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- 15. Program upaya kesehatan masyarakat
- 16. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- 17. Program standarisasi pelayanan kes<mark>eh</mark>atan
- 18. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
- 19.Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata

4. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan untuk mewujudkan keluarga sejahtera melalui (1) Peningkatan pelayanan KB dan KS; (2) Peningkatan kesadaran reproduksi sehat KB pada PUS Prasejahtera dan Keluarga sejahtera I; (3) Peningkatan kesadaran keluarga akan pentingnya tumbuh kembang anak dan balita; (4) Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan.

Program-program pembangunan pada pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program keluarga berencana
- 2. Program kesehatan reproduksi remaja
- 3. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
- 4. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

- 5. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- 6. Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
- 7. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
- 8. Program pelayanan kontrasepsi

Tabel 4.9
Prioritas Pembangunan Daerah
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

	ililiu Fengetanuan dan Teknologi						
			INDI	KATOR KINE	RJA		
NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET 2017	SKPD P.JAWAB		
1	2	3	4	5	6		
mela	IIII : Meningkatkan kua alui peningkatan sarana p	rasarana dai	n ku <mark>alitas tenag</mark>	a pendidik			
Dan	ritas 3 : Peningkatan Kua Teknologi	antas Sumbe	er Daya Manusia	a serta iimu	Pengetanuan		
PEN	DIDIKAN			1000			
1	Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	Angka	29.68	50	Disdik		
2	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka	39.34	55	Disdik		
3	Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Angka	84.02	88	Disdik		
4	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Angka	104.02	96	Disdik		
5	Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Angka	52.8	65	Disdik		
6	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Angka	77.04	85	Disdik		
7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Angka	100	100	Disdik		
8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Angka	100	100	Disdik		
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Angka	0.076	0.4	Disdik		
10	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Angka	0.35	0.4	Disdik		



11	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	Angka	98	98.5	Disdik
12	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Mts ke jenjang SMA/SMK/MA	Angka	100	100	Disdik
13	Persentase sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	88	92	Disdik
14	Persentase sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	90	94	Disdik
15	Peningkatan rata-rata lama sekolah	Angka	6.88	7.25	Disdik
16	Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA /MA	Angka	40.86		Disdik
17	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA	Angka	55.48		Disdik
18	Angka putus sekolah SMA/MA	Angka	0.17	OF THE	Disdik
19	Angka putus sekolah SMK	Angka	0.17		Disdik
20	Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha	%	15		Disdik
21	Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di PT/PTS	%	54		Disdik
22	Persentase Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	94		Disdik
23	Persentase SMA/SMK kondisi bangunan baik	%	85	5	Disdik
24	Persentase DIKMAS yang dibina	%	20	50	Disdik
25	Peningkatan Angka Melek Huruf	Angka	90.39	93	Disdik
26	Peningkatan jumlah SLB Negeri	Angka	1	2	Disdik
27	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik/tenaga kependidikan	%	87.97	92	Disdik
28	Jumlah tenaga pendidik/kependidikan yang mengikuti diklat teknis	org	850	1100	Disdik
29	Persentase tenaga pendidik/kependidikan yang mendapatkan tunjangan	%	90	92	Disdik



	kesejahteraan				
30	Peningkatan jumlah sekolah terakreditasi	sekolah	35	100	Disdik
31	Peningkatan jumlah sekolah yang yang memenuhi SNP	sekolah	165	250	Disdik
32	Jumlah dosen yang terlibat penelitan dan pengabdian masyarakat		13 0rg	13 Org	Akper
33	Terlaksananya Praktik Lapangan mahasiswa		100%	100%	Akper
34	Tesedianya dana untuk proses pengeloaan keuangan secara BLUD	%		100%	Akper
35	Jumlah dosen yang mengikuti pendidikan lanjutan	org		3 org	Akper
36	Jumlah dosen yang terlibat dlm kegiatan whoshop dan seminar	org	13	13 Orang	Akper
37	Terlaksananya penyelenggaraan Mahasiswa Baru	%	80	80%	Akper
38	Telaksananya Kegiatan Caping Day	%	100	100%	Akper
39	Terlaksananya kegiatan Wisuda	%	100	100%	Akper
40	Terlaksannya Ujian Semester Ganjil dan Semester Genap	%	100	100%	Akper
41	Terlaksannya proses Pembelajaran Semester Ganjil Dosen Luar dan Semester Genap beserta honor Narasumber/Dosen	%	100	100%	Akper
KEP	EMUDAAN DAN OLAHRAG	A			
1	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan Generasi Muda	orang	76	114	Bag. Kesra
2	Terpilihnya Paskibraka kabupaten dan Propinsi	orang	42	64	Disporabudpar
3	Terlaksananya Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)	orang		4	
4	Terpilihnya utusan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) ke tingkat Provinsi	orang		5	
5	Terpilihnya utusan Kapal Pemuda Nusantara	Kegiatan		1	



6	Terlaksananya Lomba	Kegiatan		1	
	Tata Upacara Bendera				
	Tingkat SLTA se Kab.				
	Pd. Pariaman				
7	Terlaksananya Pelatihan				
	Organisasi Kepemudaan				
8	Terlaksananya pelatihan	orang		30	
	bagi tenaga				
	keolahragaan				
9	Terukurnya prestasi	orang	60	60	
	pelajar di bidang				
	olahraga (POPDA)				
10	Terlaksananya senam	Kegiatan	12	12	
	kesegaran jasmani				
11	Terlaksananya dan	Kegiatan	5	5	
	terikuti kompetisi				
	olahraga masyarakat				
	dan pelajar			E.	
12	Pemberian bonus untuk	Kegiatan	1	1	
	Atlit, Pelatih dan Official			-	
	berprestasi				
13	Pelaksanaan PORPROV			at the state of	
14	Melengkapi sarana dan	Kegiatan	1	1	Disporabudpar
	prasarana olahraga			× ///	
1.5	pada club-club olahraga			- 1	
15	Menginventarisasi sarana dan prasarana		The same of the sa	1	
	sarana dan prasarana				
	olahraga yang ada di		110		
ZEC.	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman		The same		- Marie
	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN	0/		409/	Dinlag
KES	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya	%	The state of the s	40%	Dinkes
	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat	%		40%	Dinkes
	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di	%	The state of the s	40%	Dinkes
	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan	%		40%	Dinkes
1	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan				
	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan Meningkatnya	%		40%	Dinkes Dinkes
1	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan				
1	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				
1	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas melalui Koordinasi				
1	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas melalui Koordinasi Pelayanan Kesehatan				
1	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas melalui Koordinasi				
1	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas melalui Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak, Pelayanan				
1	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas melalui Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak, Pelayanan Kesehatan Dasar dan				
1	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas melalui Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan serta				
1	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas melalui Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan serta Pelayanan Kesehatan				
2	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas melalui Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan serta Pelayanan Kesehatan Lainnya	%		40%	Dinkes
2	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas melalui Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan serta Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan pengawasan peredaran obat-obatan dan bahan	%		40%	Dinkes
2	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas melalui Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan serta Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan pengawasan peredaran obat-obatan dan bahan berbahaya yang beredar	%		20%	Dinkes
2	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas melalui Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan serta Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan pengawasan peredaran obat-obatan dan bahan berbahaya yang beredar Persentase rumah	%		40%	Dinkes
3	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas melalui Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak, Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan serta Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan pengawasan peredaran obat-obatan dan bahan berbahaya yang beredar Persentase rumah tangga yang ber PHBS	%		20%	Dinkes Dinkes
3	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas melalui Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak, Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan serta Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan pengawasan peredaran obat-obatan dan bahan berbahaya yang beredar Persentase rumah tangga yang ber PHBS Tersedianya media	%	60	20%	Dinkes
3	olahraga yang ada di Kab. Pd. Pariaman EHATAN Meningkatnya Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas melalui Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak, Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan serta Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan pengawasan peredaran obat-obatan dan bahan berbahaya yang beredar Persentase rumah tangga yang ber PHBS	%	60	20%	Dinkes Dinkes



6	Persentase kasus balita	%		40%	Dinkes
	gizi buruk yang				
	mendapat perawatan				
7	Persentase bayi usia	%		40%	Dinkes
	kurang dari 6 bulan				
	mendapat ASI Ekslusif				
8	Persentase ibu hamil	%		40%	Dinkes
	yang mendapatkan	70		1070	Biiiico
	Tablet tambah darah				
	(TTD) minimal 90 tablet				
	selama masa kehamilan				
9		%		400/	D:-1
9	Persentase ibu hamil	%		40%	Dinkes
	kurang energi kronik				
	(KEK) yang mendapat				
	makanan tambahan				
10	Persentase balita kurus	%		40%	Dinkes
	yang mendapat				
	makanan tambahan				
11	Persentase remaja putri	%		40%	D <mark>in</mark> kes
	mendapat TTD				
12	Persentase bayi yang	%		40%	Dinkes
	baru lahir mendapat				
	IMD			Co. It was a series of	
13	Persentase bayi dengan	%		40%	Dinkes
10	berat badan lahir	70		1070	Diffico
	rendah (berat badan			all a	200
	<2500 gram)		The same of	- Marie	
14	Persentase penduduk	%		40%	
14		70	1100	40%	
	yang memiliki akses				
	terhadap air minum			430	
1.5	yang berkualitas	0.4		600/	D: 1
15	Persentase kualitas air	%	4	68%	Dinkes
	minum yang memenuhi		1)		
	syarat		1/1		
16	Persentase penduduk	%		100%	Dinkes
	yang menggunakan		11.0		
	jamban sehat		1/4		
17	Persentase penduduk	%		76%	Dinkes
	stop BABS				
18	Persentase cakupan	%		87%	Dinkes
	TPM yang memenuhi				
	syarat				
19	Persentase cakupan	%		87%	Dinkes
	rumah yang memenuhi	, 0		0.75	
	syarat kesehatan				
20	Persentase cakupan	%		86%	Dinkes
40	TTU yang memenuhi	70		0070	DIIIKCS
	syarat kesehatan				
0.1	· ·	%		0.07	Disa1-a-
21	Persentase cakupan	70		86%	Dinkes
	pengelolaan limbah				
6.0	yang memenuhi syarat	0.1		0.50/	D: 1
22	Persentase cakupan	%		86%	Dinkes
	pengelolaan sampah				
	yang memenuhi syarat				



23	Persentase anak usia 0-	%		0%	
	11 bulan yang				
	mendapat imunisasi				
	dasar lengkap				
24	Persentase	%		0%	Dinkes
	desa/kelurahan UCI				
25	Persentase fasyankes	%		0%	Dinkes
	primer yang				
	melaksanakan				
	pencegahan dan				
	pengendalian penyakit				
	tidak menular secara				
	terpadu				
26	Persentase	%		0%	Dinkes
	desa/kelurahan yang				
	melaksanakan kegiatan				
	posbindu penyakit tidak				
	menular			6.	
27	Persentase perempuan	%		0%	Dinkes
	usia 30-50 tahun yang				
	dideteksi dini kanker			Control of the last of the las	
	serviks dan payudara				
28	Persentase sinyal SKD	%		0%	1707
	KLB yang direspon				
29	Persentase penjaringan	%		0%	Dinkes
	suspek TB		The same of	A 24 6	
30	Persentase proporsi BTA	%		0%	Dinkes
	positif dari suspek		110		
31	Persentase konversi TB	%	14.6	0%	Dinkes
32	Persentase kesembuhan	%		0%	Dinkes
	TB			7.1/2	
33	Persentase sukses Rate	%		0%	Dinkes
	TB				
34	Persentase Case	%	- 11	0%	Dinkes
	Notifikasi Rate TB				
35	Persentase Case	%	11.0	0%	Dinkes
	Detection Rate TB		18		
36	Persentase ODHA yang	%		0%	Dinkes
	diobati				
37	Persentase HIV < 0.50 %	%		0%	Dinkes
38	Persentase penemuan	%		0%	Dinkes
	penderita pneumonia	-			
	Balita				
39	Persentase penemuan	%		0%	Dinkes
	penderita Diare				2-2
40	Angka penemuan kasus	%		0%	Dinkes
	baru (CDR) > 5 per	-			
	100.000 penduduk				
41	Angka prevalensi Kusta	%		0%	Dinkes
-	< 1 per 10.000	. •			
	penduduk				
		%	+	0%	Dinkes
42	Persentase kematian	%		U /0	DIIIKCS
	D 4 1 4	0/		0%	Dinles



43	Angka Insiden Rate (IR) DBD < 49 per 100.000	%		0%	Dinkes
	penduduk				
44	Persentase penurunan angka mikrofilaria (filariasis) < 1 %	%		0%	Dinkes
45	Persentase penanganan kasus GHPR	%		0%	Dinkes
46	Persentase penurunan kasus malaria Annual Parasite Indek (API)	%		0%	Dinkes
47	Terstandarisasinya pelayanan kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman	%		40%	Dinkes, RSUD
48	Meningkatnya pelayanan Siaga RSUD	%	75%	80%	RSUD
49	Meningkatnya Pelayanan Siaga Keperawatan Rawat inap	%	86%	90%	RSUD
50	Terlaksananya akreditasi Rumah sakit	%	60%	0%	Dinkes
51	Terlayaninya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin	%		40%	Dinkes
52	Outcome : Meningkatnya	%		40%	Dinkes
	persentase sarana dan prasarana yang memenuhi syarat sesuai Permenkes 75 tahun 2014				
53	Meningkatnya penrencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan melalui pembangunan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota	%	1	40%	Dinkes
54	Meningkatnya persentase cakupan pelayanan kesehatan lansia	%		40%	Dinkes
55	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	%		40%	Dinkes
56	Menurunnya angka kematian inu dan anak	%		40%	Dinkes
57	Jumlah Sekolah di 4	Sekolah		68 Sekolah	Bag. Kesra



	70° 1 / 411 ·				
	Tingkatan yang dibina				
58	peringkat Kab. Padang Pariaman pada Lomba UKS	Peringkat		Peringkat 8 Besar	RSUD
59	Tersedianya media promosi RS , Brosur, Leaflet, Papan Informasi		0.6	0.7	RSUD
60	Meningkatnya pelayanan Siaga RSUD		0.75	0.8	RSUD
61	Meningkatnya Pelayanan Siaga Keperawatan Rawat inap		0.86	0.9	
62	Terlaksananya akreditasi Rumah sakit		0.6	0.76	RSUD
63	Penyempurnaan Ruang Rawat Inap kls III lt II dan III	Ruang	1	3	
64	Terbangunannya Ruang Inap VVIP,VIP	Ruang	0	-1	
65	Terlaksananya perawatan gedung rawat jalan	Gedung	1	1	RSUD
66	Terlaksananya perawatan gedung Ruang OK	Gedung			RSUD
67	Terlaksananya perawatan gedung Ruang ICU	Ruang		1	RSUD
68	Penyempurnaan Ruang Kantor RSUD	%	55	65	RSUD
69	Terlaksananya perawatan gedung IGD	Gedung	1	1	RSUD
70	1 paket obat generik, 1 paket obat BPJS, 1 paket BHP, 1 Paket	%	80	90	RSUD
71	Bahan Laboratorium, 1 paket bahan Radiologi Terlaksananya perawatan gedung rawat jalan	Gedung	1	1	RSUD
72	Tersedianya perlengkapan Rumah Tangga RS	%	78	1	RSUD
73	Cakupan penyediaan makanan minuman pasien Rawat Inap & petugas jaga diluar jam kerja	%	81	1	RSUD
74	Terlaksananya pembangunan Ruang Radiologi ,PA,traumatik	Ruang	-	1	
75	Terlaksananya	Ruang			RSUD



				,	,
	perawatan ruang gizi		1	1	
76	Terlaksananya pembangunan gedung RS	Gedung	-	1	
77	Terlaksananya perawatan Bangunan Ruang Jenazah	Gedung	1	1	
78	Terlaksananya pengadaan alat IGD dan Radiologi		2	2	RSUD
79	tersedianya dana Operasional dan administrasi DAK		ada	ada	RSUD
80	Terlaksananya pembangunan Gerbang RS		-	-	RSUD
81	Terlaksananya pengadaan perlengkapan tempat tidur	unit	65	1	RSUD
82	Terlaksananya pengadaan incenerator	unit	2	2	RSUD
83	Terlaksananya perawatan rumah dinas		1	1	RSUD
84	Terlaksananya pembuatan pagar	unit	0	1	RSUD
85	terlaksananya pengadaan Alkes ,alat labour dan Kedokteran	unit	2	2	RSUD
86	terlaksananya ;pemeliharan IPAL dan Incenerator RS	unit	1	1	RSUD
PEN	GENDALIAN PENDUDUK D	AN KELUAF	RGA BERENCAN	IA	
1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20thn	%	1		BKKBD
2	Cakupan Pasangan Usia subur menjadi peserta KB aktif	%	65	69	BKKBD
3	Cakupan pasangan usia subur yang ingin menjadi peserta KB aktif tidak terpenuhi	%	14	10	BKKBD
4	Rasio etugas KB disetiap Desa (1 desa 2 orang PPLKB)	%	6	13	BKKBD
5	Rasio pembantu pembina KB 1 etugas disetiap desa	%	100	100	BKKBD
6	Terfasilitasi Advokasi KIE tentang kesehatan reproduksi remaja	%	70	80	BKKBD
7	Terlaksananya	%	60	70	BKKBD



	Pembinaan kelompok masyarakat peduli KB				
8	Terbentuknya pusat pelayanan informasi dan Konseling KRR	%	0	60	BKKBD
9	Tersedianya Informasi yang tepat guna tentang pola pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	0	60	BKKBD
10	Terlaksananya pembinaan terhadap tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	%	70	80	BKKBD
11	Meningkatnya Penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/ AIDS	%		50	BKKBD
12	Meningkatnya jumlah pelayanan KB Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	62	64	BKKBD

1.2.4 Prioritas Peningkatan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi berwawasan lingkungan

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan pada perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah melalui (1) Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan dan pengembangan sistem transportasi; (2) Pembangunan Sarana dan prasarana air bersih; (3) Pemberdayakan PDAM dalam mengelola air bersih; (4) Pengembangan kelembagaan dan pendanaan untuk penyelenggaran SPAM; (5) Pengelolaan Lingkungan permukiman yang bersih dan sehat; (6) Pembangunan sarana dan sarana Pengelolaan sampah; (7) Pemeliharaan sumberdaya air dan air baku; (8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam sistem pengelolaan limbah setempat dan komunal; (9) Peningkatan penanganan system jaringan drainase dan pengendalian banjir; (10) Penyusunan dan Penataaan Ruang Kawasan strategis; (11) Peningkatan pembangunan kawasan Ibukota Kabupaten; (12) Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan secara konsisten.

Program-program pembangunan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:



- 1. Program pembangunan jalan dan jembatan
- 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 5. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- 6. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- 7. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- 8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
- 9. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- 10. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 11. Program pembangunan infrastruktur perdesaan

2. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Prioritas pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman diarahkan pada: (1) Pembangunan Sarana dan prasarana air bersih; (2) Pembangunan sarana dan sarana Pengelolaan sampah; (3) Pemeliharaan sumberdaya air dan air baku; (4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam sistem pengelolaan limbah setempat dan komunal; (5) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; (6) Peningkatan penanganan system jaringan drainase dan pengendalian banjir.

Program-program pembangunan pada urusan perumahan rakyat Dan kawasan permukiman yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Pengembangan Perumahan
- 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatus
- 4. Program pengedalian Banjir
- 5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

3. Urusan Lingkungan Hidup

Prioritas pada urusan lingkungan hidup diarahkan pada (1) Pembangunan sarana dan sarana Pengelolaan sampah; (2) Pemeliharaan sumberdaya air dan air baku; (3) Peningkatan Pengendalian Perencanaan dan Perusakan

Lingkungan Hidup; (4) Melaksanakan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami degradasi; (5) Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggar Aturan Lingkungan Hidup.

Program-program pembangunan pada urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Prgram Pengendalian Perencanaan dan Perusakan Lingkungan hidup
- 2. Program peningkatan Pengendalian polusi
- 3. Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan
- 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam
- 6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya alam
- 7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup
- 8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- 9. Program Sanitasi dan Penyehatan lingkungan
- 10. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 11. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- 12. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 13. Program Peningkatan Mitigasi Bencana
- 14. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
- 15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan
- 16. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Program-program pembangunan pada urusan energi dan sumber daya mineral yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
- 2. Program pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
- 3. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

*

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

5. Urusan Perhubungan

Prioritas pada urusan perumahan rakyat dan kawasan perhubungan diarahkan pada: (1) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalulintas; (2) Peningkatan dan pengembangan fasilitas keselamatan LLAJ.

Program-program pembangunan pada urusan perhubungan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- 3. Pogram peningkatan pelayanan angkutan
- 4. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
- 5. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
- 6. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

6. Urusan Komunikasi dan Informatika

Prioritas pada urusan komunikasi dan informatika diarahkan pada: (1) Pengembangan sistem informasi terpadu; (2) Peningkatan Pelayanan dan SDM Perpustakaan dan Arsip; (3) Peningkatan hubungan pemerintah dengan masyarakat dan media masa.

Program-program pembangunan pada urusan komunikasi dar informatika yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- 3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- 4. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Tabel 4.10 Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Berwawasan Lingkungan

			INDIKATOR KINERJA				
NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2010	TARGET 2015	SKPD P.JAWAB		
1	2	3	4	5	6		
MIS	I IV: Meningkatkan	potensi	daya saing d	aerah melalui	pengembangan		
	wisata, transportasi, p						
			bangunan Infra				
	wawasan Lingkungan						
	ERJAAN UMUM DAN I	PENATAAN					
1	Outcome:		43.495	7	PU		
	Meningkatnya						
	jumlah panjang						
	jalan dan jembatan di wilayah						
	kabupaten			and I			
2	Akses Jalan menuju	Km	3.495	1	PU		
	ibukota Kabupaten	1111	0.150	1			
	(km)			× 11	A distribution		
3	Panjang jalan yang	Km	40	6	PU		
	dibangun (km)						
4	Jumlah TPA (unit)	Unit	2	0	LH		
5	Terbangunnya TPA	Unit	-	1	LH		
	Regional						
6	Tingkat kebersihan	Dok.	5	8	PU		
	dan keterawatan			11.			
	lingkungan hidup	- 1			D		
7	Terkendalinya	Dok.	2	1	PU		
	pemanfatan ruang di			7			
	Kabupaten Padang Pariaman		- //				
8	Outcome : lancarnya			-	PU		
	lalu lintas jalan						
	antar wilayah						
9	Kondisi Jalan	%	52.22	58	PU		
	Mantap (persen)						
10	Peningkatan Jalan (km)	Km	1,156.65	120	PU		
11	Panjang jalan yang	Km	982	80	PU		
	terpelihara secara						
12	periodik (km) Panjang jalan yang	Km	700	200	PU		
14	terpelihara secara	IZIII	700	200	10		
	rutin (km)						
13	Penyusunan	Dok.	_	1	PU		
	informasi/data base	2011.					
	jalan (jumlah						
	dokumen)						



14	Penyusunan	Dok.	-	1	PU
	informasi/data base				
	jembatan (jumlah				
	dokumen)			_	
15	Outcome:		5	2	PU
	Tercapainya kondisi				
	fisik konstruksi yang				
	memenuhi standar				
	(unit)				777
16	Outcome:			7,000	PU
	Meningkatnya				
	produktivitas				
	pertanian sehingga				
	pendapatan petani				
	meningkat				
17	Output : Jml sarana	На	16,000	2000	PU
	prasarana jar. Irigasi				
	yang dapat				
	diperbaiki secara				
	maks.(ha)				
18	Output : Jml sarana	Ha	16,000	5000	PU
	prasarana jar. Irigasi				
	yang dapat				
	dipelihara secara				
	maks. (ha)			4,00	
19	Pembangunan	Paket	1	1	PU
	prasarana				
	pengambilan dan			17	
	saluran pembawa			/	
20	Rehabilitasi	Paket		1	PU
	prasarana			7,11	
	pengambilan dan			L. Comment	
0.1	saluran pembawa			<i>-</i>	DII
21	Outcome:				PU
	Tercapainya			<i>y</i> .	
	pengembangan		1/4		
	wilayah untuk		197		
	pemerataan				
22	pembangunan	Unit	0 /4-1	2	PU
22	Jumlah kawasan	UIIIT	2 (dalam konstruksi	2	PU
	strategis dan cepat		pembangunan)		
	tumbuh yang		pembangunan)		
23	terbangun Outcome :				PU
23					PU
	Meningkatnya				
	kualitas lingkungan permukiman				
04		V-m	16 7	1 5	Dit
24	Panjang	Km	16.7	1.5	PU
	peningkatan jalan				
ממם	pedesaan (km) RUMAHAN RAKYAT DA	N 17 A 117 A C 4	NI DEDNETIZINEAN	<u></u>	
	Jumlah rumah				PU
1		Unit	314	300	PU
	masyarakat yang direhab				
I	unchan		<u> </u>		



2 Outcome: Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat dilingkungan permukiman	PU
kebutuhan air bersih bagi masyarakat dilingkungan permukiman	
bersih bagi masyarakat dilingkungan permukiman	
masyarakat dilingkungan permukiman	
dilingkungan permukiman	
permukiman	
3 Output : Jumlah	
Pembangunan	
jaringan air bersih	
4 Terbangunnya	0
jaringan air bersih	
(%)	,
5 Terbangunnya Km 159,402.00 49,643.27	
jumlah sarana air	
minum berkualitas	_
	5
melaksanakan	
sanitasi total	
berbasis masyarakat	
(persen) 7 Outcome: Unit 6	4
	4
Tersedianya	7/1
bangunan gedung	
kantor yang memadai dalam	
menjalankan	
administrasi	1
perkantoran	
8 Panjang Pantai yang - 500 I	M
terbangun	
Infrastruktur	
Pengaman Abrasi	
9 anjang Sungai yang - 1 KI	M
ternormalisasi dan	-1
terbangunnya	
infrastruktur	
pengaman tebing	
10 Persentase Km 4.6 10.	9
pengurangan luapan	
air	
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
1 Capaian target PAD	DINAS
2,038,561.815 2,500,000,00	0 KOPERINDAG ESDM
2 Jumlah usaha Usaha 35 3	5 DINAS
pertambangan yang	KOPERINDAG
dimonitor	ESDM
3 Cakupan % 85 8	6 DINAS
pemenuhan	KOPERINDAG
kebutuhan	ESDM
masyarakat sektor	
ketenagalistrikan	
(rasio elektrifikasi)	



4	Jumlah rumah KK	KK	300	100	
	miskin menerima				
	bantuan listrik				
LIN	GKUNGAN HIDUP				
1	Indeks Pencemaran		63.4	66.5	
	Air Sungai				
2	Indeks Pencemaran		88.5	89.5	
	Udara dari Sumber				
	Tidak Bergerak				
3	Persentase Pelaku		46.7	50.1	
	Usaha/Kegiatan				
	yang Mentaati				
	aturan LH				
4	Peningkatan		32	37.0	
	Penyediaan Sarana				
	Prasarana				
	Persampahan		F0	64.0	
5	Persentase Momportobanizan		59	64.0	
	Mempertahankan				
	Fungsi Lingkungan Sesuai				
	Peruntukannya			a dir	
6	Persentase		0.033	0.035	75
	Pemulihan				
	Lingkungan hidup			1 10 10/	
7	Akurasi		85	86.0	
	Data/Informasi				
	Lingkungan Hidup			West of the second	
8	Persentase		77	79.0	CHES.
	Peningkatan RTH			10//	
9	Peningkatan		0	30.0	
10	Pembangunan IPAL			100	711
10	Terkendalinya			100	Bag. Ekbang
	Pemanfaatan SDA			9	
	HUBUNGAN				D' 1 1
1	Tersusunnya		5		Dishub
	dokumen				
	perencanaan perhubungan				
2	Jumlah Rambu-		981		Dishub
4	rambu lalulintas		901		Distinu
	yang terpelihara				
3	Jumlah terminal		2	550000	
	yang terpelihara		-		
4	Jumlah izin trayek		18	18	Dishub
	yang dikeluarkan				
5	Jumlah kelaikan		2576	2576	
	kendaraan umum				
	dan barang				
6	Jumlah terminal bis		0		Dishub
	dan truk				
7	Jumlah Halte Yang		3		
	Terbangun				
8	Jumlah Rambu		696 buah	250 buah	Dishub



		T	1	T	
	rambu lalu lintas				
	yang terpasang.				
9	Marka Yang			1500M	
	Terpasang				
10	Portal Jalan Yang				
	Terpasangdan portal				
	perlintasan sebidang				
11	Guadraill yang		200 meter		
	terpasang				
12	Jumlah APILL (Alat		0		
12	Pemberi Isyarat Lalu				
	Lintas)				
13	Jumlah RPPJ Yang		0		
13			U		
1.4	Terpasang		0		
14	Gerbang KTL		0		
15	ZOS		0		
16	Cermin Tikungan		0		
17	Deliniator dan Paku		0		
	Marka			8	
18	Angkutan			100.000	
	Kendaraan Umum			S on I	
	dan Barang Yang			0.00	
	Laik Jalan				
19	Jumlah uji		5751		Dishub
	kendaraan Umum			14//	
	dan Barang				
20	Lama Pengujian		30 menit	The state of the s	
	Kelayakan Angkutan			112	
	Umum (Keur)				1715-
21	Biaya Pengujian		61000	13//	
	Kelayakan Angkutan		01000	7.17	
	Umum			//	
KOI	MUNIKASI DAN INFOR	MATIKA	<u> </u>	-	
1	Persentase	%		100	Dishubkominfo,
1	Optimalisasi	70		100	Bag. Humas,
	Pemanfaatan				Bag. PDE, Bag.
	Teknologi Informasi		.0		
0	<u> </u>	0/	75	00	Umum
2	Meningkatnya Infrastruktur	%	75	80	
	Jaringan				
	Komunikasi dan				
	Informasi	0.4		-	D: 1 11 : 2
3	Meningkatnya SDM	%		6	Dishubkominfo,
	Bidang Komunikasi				Bagian PDE
	dan Informasi	_			
4	Meningkatnya	Orang	40	60	
	Pengetahuan				
	Aparatur				
	Pemerintahan				
	Kecamatan dan				
	Nagari Terhadap				
	Teknologi Informasi				
5	Meningkatnya				Dishubkominfo,
	Tingkat Akses				Bag. Humas,
L		II.	I.	1	· · · · /

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

	Komunikasi, Informasi dan Penggunaan teknologi informasi				Bag. PDE
	dengan Media Massa				
6	Jumlah dosen yang	Orang	13	13	Akper
	terlibat penelitan				
	dan pengabmas				
7	Terlaksananya	%	100	100	Akper
	Praktik Lapangan				_
	mahasiswa				
8	Meningkatnya	%		80	Dishubkominfo,
	Kerjasama				Bag. Humas
	Pemerintah Daerah				_
	Dengan Media				
	Massa				

1.2.5 Prioritas Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha Serta Pengembangan Pariwisata Daerah Secara Terpadu

1. Urusan Penanaman Modal

Prioritas pada urusan penanaman modal diarahkan pada peningkatan kerjasama dengan investor, peningkatan promosi komoditi dan produk unggulan daerah, peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu, dan optimalisasi standar pelayanan minimal dalam pengurusan perizinan.

Program-program pembangunan pada urusan penanaman modal yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu
- 5. Program Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan

2. Urusan Kepariwisataan

Prioritas pada urusan kepariwisataan diarahkan melalui (1) Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata; (2) Peningkatan pengelolaan objek wisata; (3) Pelestarian budaya dan situs-situs purbakala; (4) Peningkatan Destinasi Pariwisata yang Representatif; (5) Peningkatan kerjasama jaringan promosi pariwisata; (6) Peningkatan kualitas event-event pariwisata; (7) Peningkatan SDM masyarakat sekitar objek wisata; (8) Pelestarian dan

pengembangan kebudayaan dan pariwisata dengan sektor lain; (9) Pengembangan usaha ekonomi kreatif.

Program-program pembangunan pada urusan kepariwisataan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 3. Program Pengembangan Kemitraan

Tabel 4.11
Prioritas Pembangunan Daerah
Peningkatan Iklim Investasi Dan Usaha Serta
Pengembangan Pariwisata Daerah Secara Terpadu

			IND	KATOR KIN	ERJA
NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET 2017	SKPD P.JAWAB
1	2	3	4	5	6
	I II: Meningkatkan Perek ung sektor Primer dan Ja		Kabupat <mark>en Pad</mark> a	ang Pariama	n melalui daya
	ritas 5 : Peningkatan		estasi Dan IIs	saha Serta	Pengembangan
	wisata Daerah Secara Ter		estasi Dan es	sana Screa	Tengembangan
	ANAMAN MODAL	puuu	112		
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	%	50	80	BPMP2T
	Di Kab.Padang Pariaman				
2	Tercapainya Iklim Investasi yang Kondusif di Padang Pariaman	%	50	80	BPMP2T
3	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian perizinan	%	70	90	BPMP2T
	dan non perizinan				
KEF	PARIWISATAAN		<u> </u>		
1	Jumlah kinjungan wisatawan nusantara dan manca negara		33,000	45,000	Disporabudpar
	- Wisatawan Nusantara		30,000	41,500	
	- Wisatawan Mancanegara		3,000	3,500	
2	Peningkatan PAD Retribusi Objek Wisata		20,000	50,000	Disporabudpar
3	Peningkatan jumlah pokdarwis, kemitraan dengan lembaga pariwisata		3	6	Disporabudpar



1.2.6 Prioritas Peningkatan Pembangunan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

1. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Prioritas pada Urusan Koperasi dan UKM diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) Peningkatan promosi dan pemasaran produk; (2) Standarisasi produk dan mutu UMKM dan IKM.

Program-program pembangunan pada urusan koperasi usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
- 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
- 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- 5. Program Pengembangan Sistem Pend<mark>ukung Usaha Bagi Usaha Mikr</mark>o Kecil Menengah

2. Urusan Perdagangan

Prioritas pada urusan perdagangan diarahkan pada terwujudnya ketesediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat dan peningkatan ekspor melalui (1) Peningkatan diversifikasi dan nilai tambah produk eksport; (2) Meningkatkan kelembagaan dan kerjasama perdagangan serta nilai transaksi pasar; (3) Penataan pasar tradisional; (4) Optimalisasi perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan baik barang maupun jasa.

Program-program pembangunan pada urusan perdagangan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
- 4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

3. Urusan Perindustrian

Program-program pembangunan pada Urusan perindustrian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

- 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- 4. Program Penataan Struktur Industri
- 5. Pengembangan Data Base dan Potensi Industri Unggulan

Tabel 4.12
Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas Peningkatan Pembangunan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Kecil
Menengah dan Koperasi

			INDIKATOR KINERJA				
NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET 2017	SKPD P.JAWAB		
1	2	3	4	5	6		
pari ling	kungan.	asi, perdag	angan, pen	ataan ruang	dan pengelolaan		
	ritas 6 : Prioritas il Menengah dan Ko		Pembangun	an Ekonomi Pe	laku Usaha Mikro		
	ERASI USAHA KEC		ENGAH	L. L. S. L. S. S.			
1	Outcome: Bertambahnya jumlah UKM yang memperoleh sosialisasi dan pembinaan	KUMKM	100	100	DINAS KOPERINDAG ESDM		
2	Outcome : Jumlah Koperasi baru	Koperasi	5	5	DINAS KOPERINDAG ESDM		
3	Outcome : jumlah UKM/ calon UKM yang berkonsultasi di KKB	UKM	10	10			
4	Outcome : Meningkatnya volume usaha koperasi	%	5	5	DINAS KOPERINDAG ESDM		
5	Outcome: Jumlah UMKM dan Koperasi yang mendapat bantuan pendampingan KUR dan LPDB	KUMKM	50	50			
6	Outcome : Jumlah Koperasi	Koperasi	50	55	DINAS KOPERINDAG		



	yang				ESDM
	melaksanakan				
	RAT tepat waktu				
7	Outcome :	Koperasi	30	35	
-	Jumlah Koperasi	110 p 01 001			
	berkualitas				
8	Pelaksanaan	%	100	100	Bag. Ekbang
	Koordinasi,	70	100	100	Dag. Dabang
	Monitoring,				
	Evaluasi dan				
	Pelaporan				
	Pengembalian				
0	Dana Bergulir		0	0 D -1	
9	Terlaksannya		2	2 Dokumen	
	Dokumen		Dokumen		
	Pengawasan				
	terhadap PT.				
	BPRPKPP dan				
10	PDAM	- <u> -</u>	1.5		DIVIC
10	Pembubaran		1 P <mark>er</mark> da	-	DINAS
	Perusahaan				KOPERINDAG
	Daerah Saiyo	-			ESDM
	DAGANGAN	-			
1	Outcome : jumlah	UTTP	800	1000 UTTP	DINAS
	UTTP yang ditera				KOPERINDAG
_	_		_		ESDM
2	Outcome:	org	3	2 pengusaha	DINAS
	Meningkatnya		-		KOPERINDAG
	Jumlah				ESDM
	pengusaha ekspor				70
	yang tumbuh			7.1/	
3	Outcome:	Pasar	7	2 pasar	DINAS
	Meningkatnya				KOPERINDAG
	Jumlah pasar				ESDM
	yang kondusif				
	(BANA) di				
	bangun/				
	diperbaiki				
4	Outcome:	PKL	30	30 PKL	DINAS
	Jumlah PKL yang				KOPERINDAG
	memperoleh				ESDM
	binaan dan				
	bantuan				
PER	INDUSTRIAN				
1	Outcome:	IKM	20	20	
	Bertambahnya				
	Industri yang				
	menerapkan				
	sistem mutu				
2	Outcome:	IKM	20	35	
	Jumlah IKM yang				
	memiliki legalitas				
	(PIRT, Halal,				
	Merk, TDI)				
	1,10111, 1111)				L



3	Outcome:	%	2,5	2,5	
3	Pertumbuhan	/0	2,3	2,3	
	Industri			_	
4	Outcome:	%	2	2	
	Meningkatnya				
	Nilai Produksi				
	IKM				
5	Outcome: Jumlah			2	
	IKM/Kelompok				
	/Asosiasi yang				
	mendapat				
	bantuan mesin				
	peralatan				
6	Outcome:	Klaster	3	3 klaster	
0	Jumlah klaster	Master	3	J Klasici	
7	industry	Dokumen	1	1 dokumen	
1	Outcome:	Dokumen	1	1 dokumen	
	Tersedianya				
	database industri	<u>.</u>			6
8	Output :			1 do <mark>kum</mark> en	
	Tersedianya				
	dokumen data				
	base dan potensi				
	industri unggulan				
9	Outcome:		0	0	11 11 11 11
	Meningkatnya			E A A	
	jumlah kelompok				
	/ sentra IKM yang				
	mendapat			1/5	
	pembinaan dan			13/1	
	pengawasan			3.4	
	F 8a abazz				

1.2.7 Prioritas Penurunan Tingkat Kemiskinan secara terintegrasi

1. Urusan Tenaga Kerja

Prioritas pada urusan ketenagakerjaan diarahkan pada (1) Rehab Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; (2) Penyediaan sarana dan prasarana ketenagakerjaan; (3)Peningkatan informasi ketenagakerjaan; (4)Pengembangan Sistem Inovasi daerah pembangunan Technopark; (5) Peningkatan jumlah kelompok dan lembaga usaha; (6) Peningkatan lapangan usaha dan peluang investasi yang berbasis industri kerakyatan; (7) Peningkatan kemitraan bisnis pada usia produktif dan angkatan kerja; (8) Peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan produktivitasnya; (9) Penguatan regulasi ketenagakerjaan.

Program-program pembangunan pada urusan ketenagakerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Database PMKS, PSKS, Potensi Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja



- 2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- 4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak melalui (1) Peningkatan pemahanan masayarakat tentang KDRT dan Penyakit masyarakat; (2) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.

Program-program pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 2. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

3. Urusan Sosial

Prioritas pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi penyandang masalah sosial melalui (1) Peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi PMKS, Anak Jalanan, Anak Terlantar, dan penyandang cacat; (2) Fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS.

Program-program pembangunan pada urusan sosial yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Database PMKS, PSKS, Potensi Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja
- 2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- 3. Program Pengembangan Perumahan
- 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- 5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- 6. Program pembinaan anak terlantar
- 7. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- 8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 9. Program Pengembangan Lembaga Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pedidikan Keagamaa

Tabel 4.13
Prioritas Pembangunan Daerah
Penurunan Tingkat Kemiskinan secara Terintegrasi

	renulunan lingka				WINED IA				
NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2010	IKATOR KIN TARGET 2015	SKPD P.JAWAB				
1	2	3	4	5	6				
berb	MISI IV: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berbasiskan sistem agribisnis dan agroindustri Prioritas 7: Penurunan Tingkat Kemiskinan secara Terintegrasi								
TEN	AGA KERJA			0 11	4				
1	(%) Pemuthakiran data base PMKS, PSKS, Potensi Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja	%	80	70,0	Dinsosnaker				
2	Revitalisasi BLK	%	70	61,0	Dinsosnaker				
3	Jumlah Pengangguran/Pencari Kerja	%	28	61,0	Dinsosnaker				
4	Tingkat Pengangguran Terbuka		3						
5	Rasio Penduduk bekerja		11	5					
6	(%) suasana kerja yang aman dan damai di perusahaan	%	70	76,0	Dinsosnaker				
PEM	IBERDAYAAN PEREMPUAN D	AN PERLIN	IDUNGAN ANA	AK					
1	Fasilitas peningkatan kapasitas ipek sistem produksi	%	60	65 %	ВРМРКВ				
2	(%) tingkat kesehatan lingkungan perumahan masyarakat	%	45	80 %	BPMPKB				
3	Terfasilitasinya persentase lembaga keuangan mikro nagari/usaha ekonomi simpan pinjam yang berfungsi baik	%	75	100%	ВРМРКВ				
4	Jumlah Kelembagaan Pasar Nagari yang dibina	%	20	40 %					
5	Terfasilitasinya Kelembagaan PUG dan Anak	%	60	80 %	ВРМРКВ				



6	Terlaksananya Pemberian	SD	3	6 SD	BPMPKB
	Makanan Tambahan				
	Makanan Untuk Anak SD				
7	Meningkatnya Partisipasi	%	3	5%	BPMPKB
	masyarakat dalam				
	membangun nagari				
8	Persentase partisipasi	%	11	25%	BPMPKB
	perempuan di lembaga				
	pemerintah				
SOS	IAL				
1	(%) Pemuthakiran data	%		70	
-	base PMKS, PSKS, Potensi	70		70	
	Tenaga Kerja dan				
	Lapangan Kerja				
2	(%) Tingkat PMKS yang	%	80	70	Dinsosnaker
	memperoleh bantuan	70	00	70	Dilisosilakci
	sosial untuk pemenuhan				
	kebutuhan dasar				
2		%	FO	56	Dinsosnaker
3	(%) Ketersedianya rumah	70	50	30	Dinsosnaker
	sehat bagi masyarakat			-	
	miskin di kawasan kumuh			The same of	
4	dan padat penduduk	0/	F0	70	D' 1
4	(%) Keluarga miskin yang	%	50	56	Dinsosnaker
	mendapat bantuan beras		The same of the sa	2	
	miskin	0.4			
5	(%) PMKS yang	%	50	56	Dinsosnaker
_	direhabilitasi		1154		11111
6	(%) tingkat anak terlantar	%	9	11	Dinsosnaker
	yang menerima jaminan			7.100	
	sosial			//	
7	(%) tingkat penyadang	%	40	46	Dinsosnaker
	cacat fisik dan mental yang		37		
	menerima jaminan sosial		W		
8	(%) Tingkat PMKS yang	%	40	46	Dinsosnaker
	menerima program		.//	21	
	pemberdayaan sosial				
	melalui Kelompok usaha				
	bersama				
9	Terlaksananya Pembinaan	Orang	180	180	Bag. Kesra
	Majelis Taklim				
10	Terbina dan	Masuk		1 LDS	
	Terfasilitasinya LDS	Tk			
	berprestasi Tk Kab dan	Provinsi			
	Provinsi				
11	Jumlah Jamaah Haji Yang	Orang	187	190	
	terfasilitasi keberangkatan				
	dan Pemulangan				
12	Terselenggaranya Kegiatan	Kegiatan	5	5	
	Maulid Nabi, Isra Mi'raj,	Hari		9	
	Nuzul Quran, Sholat Idul	Besar			
	Fitri	Islam			
13	Jumlah Qori Qoriah Yang	%	50	60	
10	dibina	,0		33	
	dibilia				

*

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

14	Jumlah Dai Muda yang mengikuti Pelatihan	Orang	220	
15	Terlahirnya Fatwa Fatwa MUI	Jenis	20	

1.2.8 Prioritas Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya

1. Urusan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Prioritas urusan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diarahkan pada pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik.

Program-program pembangunan pada urusan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- 2. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 - Pemindahan tugas PNS
- 3. Program Pendidikan Kedinasan
 - Pendidikan Penjenjangan Struktural
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Diklat Pengawas
 - Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah
 - Bimtek PP 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja
 - Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
 - Diklat Teknis Perhitungan Angka Kredit (PAK)
- 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
 - Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
 - Pemberian Bantuan Tugas Belajar, Ikatan Dinas dan izin belajar
 - Monitoring dan evaluasi pasca diklat
 - Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat)
 - Diklat Teknis Fungsional
 - Validasi data Kepegawaian Daerah

*

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Pengelolaan arsip kepegawaian kab. padang pariaman
- Pelaksanaan Sidang MPP
- Pelaksanaan Sidang Tim Internal Pejabat Struktural, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah
- Penetapan Pengangkatan Pertama kali, Kenaikan Jenjang Karir dan Pemberhentian
- Open Recruitment pejabat struktural
- Pelaksanaan Tes urine bagi pejabat eselon II dan III
- Analisis kebutuhan Formasi Kepegawaian
- Kenaikan pangkat PNS Struktural, KGB dan Pencatuman Gelar
- Kenaikan Pangkat PNS Fungsional
- Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu Pegawa
- Peningkatan Status Kepegawaian
- Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional
- Ujian dinas dan Penyesuaian Ijazah
- Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai
- Penyusunan Produk hukum tentang kepegawaian
- Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
- Pemberian Penghargaan Satya lancana karya satya
- Pembinaan Perkawinan dan Perceraian PNS
- Pelaksanaan Tes Kompetensi Pejabat
- Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi
- Pembekalan Purna Tugas
- Pelaksanaan Sidang Baperjakat, Pelantikan dan Pengambilan sumpah
- 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2. Urusan Perpustakaan

Program-program pembangunan pada urusan perpustakaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan



3. Urusan Kearsipan

- 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
- 4. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan
- 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program-program pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- 2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari
- 4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Program-program pembangunan pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- 3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 4. Program pengembangan wawasan kebangsaan
- 5. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- 6. Program pendidikan politik masyarakat

Tabel 4.14
Prioritas Pembangunan Daerah
Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif,
Demokratis dan Terpercaya

			INDIKATOR KINERJA		
NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET 2017	SKPD P.JAWAB
1	2	3	4	5	6

MISI VI: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik

Prioritas 8 : Prioritas Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya



Fun	gsi Penunjang Kepegawaian	serta Pendi	dikan dan Pelati	han	
1	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya sesuai kebutuhan	Orang		45	BKD
2	Jumlah SK pensiun dan pengabdian PNS yang diterbitkan tepat waktu	SK		220	BKD
3	Jumlah rekomendasi pindah dan SK penempatan pindah PNS sesuai dengan kebutuhan	SK		500	BKD
4	Jumlah pejabat struktural yang lulus Diklat PIM II	Orang		5	BKD
5	Jumlah pejabat struktural yang lulus Diklat PIM III	Orang		15	BKD
6	Jumlah pejabat struktural yang lulus Diklat PIM IV	Orang	The same of	40	BKD
7	Jumlah Peserta Diklat Pengawas	Orang		35	BKD
8	Jumlah CPNSD Gol. I dan II, III yang mengikuti Diklat Prajabatan				1
9	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	Peserta		80	BKD
10	Jumlah PNS yang dikirim mengikuti kursus-kursus dan diklat singkat	Orang	444	25 org CPNS gol III dan 21 org CPNS gol II	BKD
11	Jumlah Peserta yang mengikuti diklat teknis PAK	Orang	1	140	BKD
12	Jumlah PNS berprestasi yang menerima penghargaan	Orang	11	12	BKD
13	Tertanganinya kasus- kasus pelanggaran disiplin PNS	Kasus		20	BKD
14	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Orang		28	BKD
15	Jumlah laporan hasil evaluasi terhadap alumni diklat	Paket		1	BKD
16	Jumlah peserta yang memahami pengetahuan Diklat Analisis Kebutuhan Diklat	Orang		45	BKD
17	Jumlah pejabat fungsional yang memahami pengetahuan dalam diklat fungsional	Paket		1	BKD



18	Persentase update SAPK, SIMPEG, Pendataan KPE	Tahun		1	BKD
	dan Konversi NIP				
19	Meningkatnya tertib	Tahun		1	BKD
	administrasi dan dokumentasi				
	kepegawaian				
20	Jumlah kebijakan yang	Tahun		1	BKD
	dihasilkan dalam sidang				
	MPP				
21	Jumlah Pelaksanaan	Tahun		1	BKD
	Sidang Tim Internal				
	Pejabat Struktural,				
	Pelantikan dan				
22	Pengambilan Sumpah Jumlah SK penetapan	SK		50	BKD
44	pengangkatan pertama	SK		30	DKD
	kali, kenaikan jenjang				
	karir dan pemberhentian				
	Jabatan fungsional PNS				
23	Hasil pelaksanaan	Jabatan		29	BKD
	rekruitment pejabat			7	
	struktural			7	
24	Jumlah Pejabat Eselon II	Paket		3	BKD
	dan III yang mengikuti tes			1//19	1
0.5	urine	D 1		1	DIVD
25	Tersusunnya buku	Buku		1 buku	BKD
	formasi PNS Kabupaten Padang Pariaman		118	susunan formasi, 1	
	i adding i ariaman			buah buku	
				kelebihan	
				dan	
				kekurangan	
			//	formasi, 1	
				buah buku	
			17.3	usulan	
0.0	T 1 1 OTZ TZ '1	OTZ	118	formasi	DVD
26	Jumlah SK Kenaikan	SK	///	W.	BKD
26	pangkat PNS yang	SK	41	formasi	BKD
	pangkat PNS yang diterbitkan tepat waktu			formasi 400	
26	pangkat PNS yang diterbitkan tepat waktu Jumlah SK Kenaikan	SK SK		formasi	BKD BKD
	pangkat PNS yang diterbitkan tepat waktu			formasi 400	
	pangkat PNS yang diterbitkan tepat waktu Jumlah SK Kenaikan Pangkat Fungsional yang			formasi 400	
27	pangkat PNS yang diterbitkan tepat waktu Jumlah SK Kenaikan Pangkat Fungsional yang diterbitkan tepat waktu Jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang diterbitkan	SK Buah		formasi 400 800	BKD BKD
27	pangkat PNS yang diterbitkan tepat waktu Jumlah SK Kenaikan Pangkat Fungsional yang diterbitkan tepat waktu Jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang diterbitkan Jumlah SK 100% PNS	SK		formasi 400 800	BKD
27 28 29	pangkat PNS yang diterbitkan tepat waktu Jumlah SK Kenaikan Pangkat Fungsional yang diterbitkan tepat waktu Jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang diterbitkan Jumlah SK 100% PNS yang diterbitkan	SK Buah SK		formasi 400 800 200 247	BKD BKD
27	pangkat PNS yang diterbitkan tepat waktu Jumlah SK Kenaikan Pangkat Fungsional yang diterbitkan tepat waktu Jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang diterbitkan Jumlah SK 100% PNS yang diterbitkan Jumlah SK tenaga	SK Buah		formasi 400 800 200	BKD BKD
27 28 29 30	pangkat PNS yang diterbitkan tepat waktu Jumlah SK Kenaikan Pangkat Fungsional yang diterbitkan tepat waktu Jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang diterbitkan Jumlah SK 100% PNS yang diterbitkan Jumlah SK tenaga honorer yang diterbitkan	SK Buah SK SK		formasi 400 800 200 247 74	BKD BKD BKD
27 28 29	pangkat PNS yang diterbitkan tepat waktu Jumlah SK Kenaikan Pangkat Fungsional yang diterbitkan tepat waktu Jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang diterbitkan Jumlah SK 100% PNS yang diterbitkan Jumlah SK tenaga honorer yang diterbitkan Jumlah SK	SK Buah SK		formasi 400 800 200 247	BKD BKD
27 28 29 30	pangkat PNS yang diterbitkan tepat waktu Jumlah SK Kenaikan Pangkat Fungsional yang diterbitkan tepat waktu Jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang diterbitkan Jumlah SK 100% PNS yang diterbitkan Jumlah SK tenaga honorer yang diterbitkan Jumlah SK AJUDAN/SESPRI yang	SK Buah SK SK		formasi 400 800 200 247 74	BKD BKD BKD
27 28 29 30	pangkat PNS yang diterbitkan tepat waktu Jumlah SK Kenaikan Pangkat Fungsional yang diterbitkan tepat waktu Jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang diterbitkan Jumlah SK 100% PNS yang diterbitkan Jumlah SK tenaga honorer yang diterbitkan Jumlah SK	SK Buah SK SK		formasi 400 800 200 247 74	BKD BKD BKD



	,				
33	Tindak lanjut pengururan K1	Orang		49	BKD
34	Jumlah tenaga honorer yang mengikuti tes	Orang		242	BKD
35	Jumlah PAK PNS	PAK		1900	BKD
	Fungsional yang dikeluarkan				
36	Jumlah peserta ujian	Peserta		50	BKD
30	penyesuaian ijazah	reserta		30	DKD
37	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS	Tahun		1	BKD
38	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	Perbub		2	BKD
39	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Paket		1	BKD
40	Jumlah PNS yang menerima penghargaan	Orang		190	BKD
	Satya Lancana karya Satya				
41	Terlaksananya	Tahun		1	BKD
	pembinaan perkawinan dan perceraian PNS				
42	Jumlah Hasil Penilaian Kompetensi Pejabat	Jabatan		149 jabatan eselon III	BKD
43	Jumlah aplikasi yang	Paket		1	BKD
10	mendukung pelayanan	Taket		x 24 6	DILD
	informasi				
44	Jumlah peserta yang	Paket	110	1	BKD
	mendapat keterampilan		115		101111
45	Jumlah sidang	Kali		12	BKD
	Baperjakat, pelantikan			7/100	
	dan sumpah PNS				
46	Terbinanya dan	Orang		78	Bag.
	berkembangnya Aparatur		1/		Organisasi
47	Sipil Negara Tersedianya Dokumen				
77	Tata Naskah Dinas		,// 17		
48	Tersedianya Data				
	Kepegawaian dan Tertib				
	Administrasi				
49	Tersedianya Dokumen				
	Kompetensi Masing				
	Masing Jabatan				
50	Tersedianya Dokumen				
	Pedoman Reformasi				
51	Birokrasi Tersedianya Dokumen				
31	Peningkatan Mutu				
	Pelayanan				
52	Jumlah peserta pelatihan	Orang		60	Bag. Umum,
	untuk peningkatan	0			Bag
	kapasitas sumber daya				Keuangan
	aparatur				Bag. PUM
53	Jumlah aparatur	Orang		51	



	51 6 1					
	Kecamatan yang terlatih					
	untuk meningkatkan					
	pelayanan PATEN Di					
	Kecamatan					
54	Meningkatnya peringkat			5 Besar		
	Kab. di tingkat Provinsi					
55	Jumlah PNS dan	Orang		1100		
	masyarakat yang					
	mengikuti Tabligh Akbar					
56	Meningkatnya Disiplin	Orang		130	Bag. Umum	
	Aparatur					
PERPUSTAKAAN						
1	Jumlah Perpustakaan		1 Pustaka	1 Pustaka		
	-		daerah, 60	daerah, 103		
			pustaka	pustaka		
			nagari, 5	nagari, 5		
			Perpustakaan	Perpustakaan		
			TBM, 7	TBM, 7		
			Perpustakaan	Perpustakaan		
			Pesantrean,	Pesantrean,		
			6Perpustakaan	11		
			mesjid, 2	P <mark>erp</mark> ustakaan		
			Perpustakaan	mesjid, 17		
			Sekolah	Perpustakaan		
			Denoidii	Sekolah		
2	Persentase Pustaka	%	45	55%		
_	nagari dan sekolah yang	, 0		0070		
	menerapkan sistem					
	pengelolaan		1/184			
	perpustakaan yang baku					
3	Bertambahnya Koleksi	Eksemplar	1,319.00	2000		
	Buku di Perpustakaan	Buscinpiai	1,013.00	eksemplar		
	Daerah		- 5	croemplar		
4	Peningkatan SDM	Kegiatan	1	1 Kegiatan		
	Pengelola Perpustakaan	Regiataii	1	1 Regiatan		
5	Persentase Peningkatan	%	30	40		
3	Minat Baca Masyarakat	70	30	10		
KE.A	RSIPAN					
1	Persentase tersedianya	%	10	20		
1	dokumen/arsip/informasi	/0	10	20		
	yang bernilai penting					
2	Persentase Pengelolaan	%	40	50	Dernistoles	
4	Arsip secara baku	/0	40	30	Perpustakaan dan Arsip	
3	Persentase terawatnya	%	0	10	Perpustakaan	
3		/0		10	dan Arsip	
	bahan pustaka, naskah				uan Arsip	
	kuno dan arsipdengan baik					
4	Persentase Dokumen	%	15	٥٢	Domound also ass	
4		70	15	25	Perpustakaan	
	daerah yang diarsipkan	0/		1.0	dan Arsip	
5	Persentase Dokumen	%	0	10	Perpustakaan	
	Daerah yang dipelihara	TZ - ' '		2	dan Arsip	
6	Peningkatan SDM	Kegiatan	1	2	Perpustakaan	
	Pengelola Kearsipan				dan Arsip	
PEM	IBERDAYAAN MASYARAKA	T DAN DESA				



	•				
1	Terlaksannya program PKK Kabupaten		50	60	Bag. Pemnag dan BPMPKB
2	Terfasilitasinya Kegiatan TP-PKK dan Jambore PKK Tk. Kab. Propinsi dan Pusat.		65	70	
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Perantau /Organisasi Lainnya Dalam Pembangunan Nagari		2	3 Kali Pertemuan Dengan Masyarakat Perantau	Bag. Pemnag
4	Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintahan nagari		120	206 Orang	Bag. Pemnag
5	Terbinanya Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari melalui Bimtek, Inventarisasi Pendapatan Keuangan dan Aset Nagari		120	310 Orang	,
6	Terpilihnya 1 Orang Wali Nagari dan 1 Orang Sekretaris Nagari Yang Berkompeten Untuk Mewakili Kabupaten Padang Pariaman Di Tingkat Provinsi		2	2 Paket	
7	Terpilihnya Wali Nagari dan Bamus Nagari Kabupaten Padang Pariaman		20	60 Nagari	P. Marie
8	Tersusunnya Anggaran Pedapatan dan Balanja Nagari sesuai Dengan Undang Undang dan Peraturan Nagari		60		Bag. Pemnag
9	Terbinanya Pertanggungjawaban Keuangan Desa Menurut Aturan Yang Berlaku		60	103 Nagari	
10	Terbinanya Lembaga Kerapatan Nagari (KAN) melalui Penilaian KAN Terbaik Tingkat Kabupaten		1	1 Paket	
KET	ENTRAMAN, KETERTIBAN	UMUM DAN	PERLINDUNGAN		
1	Menurunya Penyakit Masyarakat	%	35	20	Pol PP
2	% Peningkatan kemampuan anggota Pol PP	%	50	60	Pol PP
3	% Pnyelesaian Kasus pelanggaran trantib yang ditindak lanjuti	%	75	65	

4	% Penanganan kasus pelanggaran perda	%	60	65	
5	Menurunya Penyakit	Kecamatan	17	17	KESBANGPOL
3	Masyarakat	Recalliataii	17	17	RESDANGFOL
6	Tingkat partisipasi	%	50	60	KESBANGPOL
	masyarakat dalam kehidupan				
	bermasyarakat,				
	berbangsa dan bernegara				
7	Menurunya Penyakit		-	18	KESBANGPOL
	Masyarakat				
8	Tingkat partisipasi	Partai	11	11	KESBANGPOL
	masyarakat dalam bidang	Politik			
	politik				

1.2.9 Prioritas Peningkatan Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana

1. Urusan Penanggulangan Bencana Daerah

Prioritas pada urusan penanggulangan bencana daerah diarahkan pada pengurangan resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.

Program-program pembangunan pada urusan penanggulangan bencana daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- 2. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 3. Program Peningkatan Mitigasi Bencana
- 4. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
- 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan
- 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Tabel 4.15 Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana

			TARGET CAPAIAN TAHUN		SETIAP	
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET 2017	SKPD P.JAWAB	
1	2	3	4	5	6	

MISI V: Mewujudkan Ketahanan Bencana Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dan Kesiapan Sarana Dan Prasarana Yang Ramah Bencana.

Prioritas 9: Peningkatan ketahanan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta mendorong pembangunan permukiman yang ramah bencana



PEN	ANGGULANGAN BENCANA	DAERAH			
1	Jumlah Nagari yang	%	60	70	BPBD
	terpantau dan				
	tersebarluasnya informasi				
	potensi bencana alam				
2	Persentase masyarakat	%	70	75	BPBD
	korban bencana yang				
	mendapatkan bantuan pada				
	masa tanggap darurat				
3	Jumlah sarana dan	%	65	75	BPBD
	prasarana kesiap-siagaan				
	dan Pencegahan Bahaya				
	Kebakaran	0/	0.0	100	DDDD
4	Jumlah aparatur pemadam	%	98	100	BPBD
	kebakaran yang terlatih dan bersertifikasi damkar 1 dan				
	damkar 2				
5	Jumlah dokumen	%	25	45	BPBD
	perencanaan	/0	25		טם זם
	penanggulangan bencana		1.00		
	(RPB,RAD-RPB, Renkon per-		1		
	jenis Bencana, SOP				
	kebencanaan yang tersedia,				
	Jitu Pasna , laporan)				
6	Jumlah Sosialisasi dan	%	30	45	BPBD
	simulasi mitigasi bencana				
7	Jumlah Koordinasi,	%	75	85	BPBD
	Monitoring dan evaluasi		116		
	pelaksanaan program				
0	penanggulangan bencana	NT .		4	DDDD
8	Jumlah Nagari Tangguh	Nagari	11	4	BPBD
	Bencana yang terbentuk dan terbina		4		
9	Jumlah KSB yang terbina	Nagari	11	60	BPBD
10	Persentase Jumlah Tim TRC	Wagaii %	85	100	BPBD
10	dan Pusdalops yang terlatih	/0	03	100	חפשט
	dan bersertifikasi				
11	Persentase sarana dan	%	65	70 %	BPBD
	prasarana kebencanaan,	/0		10 70	טונים.
	komunikasi kebencanaan				
	yang tersedia				
12	Jumlah DED jalur evakuasi	Ruas		25	BPBD
13	Jumlah TES, TEA dan	Buah		1	BPBD
	Shelter yang tersedia				
14	Jumlah Early Warning	Unit		21	BPBD
	System(unit)				
15	Jumlag Nagari yang terdata	Nagari		4	BPBD
	di daerah rawan bencana				



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun rencana kerja yang dituangkan dalam matrik rencana kerja, yang berisi terdiri atas: matrik Rencana Kerja Kegiatan Prioritas dan matrik Rencana Kerja Pembangunan Bersumber Dana Non APBD. Matrik Rencana Kerja tersebut memuat rincian kegiatan Prioritas program, dan pembangunan Padang Pariaman yang mengacu kepada RPJM Nasional Tahun 2014-2019, RPJPD Tahun 2005-2025, dan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dan sudah dituangkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah baik Urusan Wajib dan Piliham sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan Matrik Rencana Kerja yang pendanaannya bersumber dari APBN merupakan penjabaran program dan kegiatan yang mengacu kepada Prioritas Program dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

Matrik Rencana Kerja Kegiatan tersebut merupakan uraian Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan sasaran-sasaran setiap prioritas. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih memfocuskan pencapaian target sasaran Program dan Kegiatan menurut indikator program dan kegiatan Prioritas tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran dokumen RKPD.



BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017, adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMD kab. Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dengan tetap mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2017 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari pelaksanaan RKPD tahun 2016 ini, akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Bupati beserta perangkat daerahnya pada Tahun 2017 mendatang.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2017 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2017, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 sekaligus penyesuaian terhadap RPJMN 2014-2019. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2017, mengacu pada isue-isue strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian ifocuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian 8 (delapan) tujuan bersama.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua fihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1. Pemerintah Daerah bersama masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban melaksanakan program-program RKPD tahun 2017 sebaikbaiknya.
- 2. Bagi Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, RKPD tahun 2017 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Derah (APBD) Tahun 2017.
- 3. Untuk mengupayakan keterpaduan, singkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan masingmasing Satuan Kerja Perangkat daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017, yang memuat tentang uraian penggunaan APBD Tahun 2017 berupa program dan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran sesuai dengan kewenangan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- 4. RKPD Kabupaten Padang Pariaman tetap mengacu kepada RKP dan RKPD Propinsi dalam menyusun kebijakan.
- 5. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan mendapatkan masukan dari Renja SKPD, merumuskan dan menyusun RKPD Kabupaten Padang Pariaman.
- 6. Masyarakat secara umum dapat berperan selaus-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dapat disalurkan melalui Forum Satuan Kerja Perangkat daerah dan Musrenbang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017. Sehubungan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha berperan serta dalam merencanakan pembangunan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Dalam menyusun Rencana Kerja Sat<mark>uan Kerj</mark>a Perangkat daerah (Renja SKPD) masing-masing SKPD Kabupaten melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan nagari dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha melalui berbagai forum sesuai dengan kebutuhan.
- 8. Pada Akhir tahun anggaran 2016, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan dan kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
- 9. Guna menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD dan Pemerintah Kabupaten harus melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan tindakan koreksi yang diperlukan serta melaporkannya secara berkala kepada Bupati Padang Pariaman sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Semua kaidah-kaidah pelaksanaan tersebut diatas agar dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. RKPD Tahun 2016, berlaku sejak 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan mengindahakan dan menerapkan prinsip-prinsif koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan integrasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.